



UNIVERSITAS INDONESIA

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORMULASI
KEBIJAKAN DALAM PENYUSUNAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN TAHUNAN PADA FORUM REMBUG RW
DI KELURAHAN PONDOK RANGGON**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh

Gelar Sarjana Ilmu Administrasi Negara

RAHMA UTAMI

1006817536

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM SARJANA EKSTENSI
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI**

**DEPOK
JUNI 2012**

HALAMAN PERNYATAAN OROGINALITAS

Skripsi ini adalah hasil saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

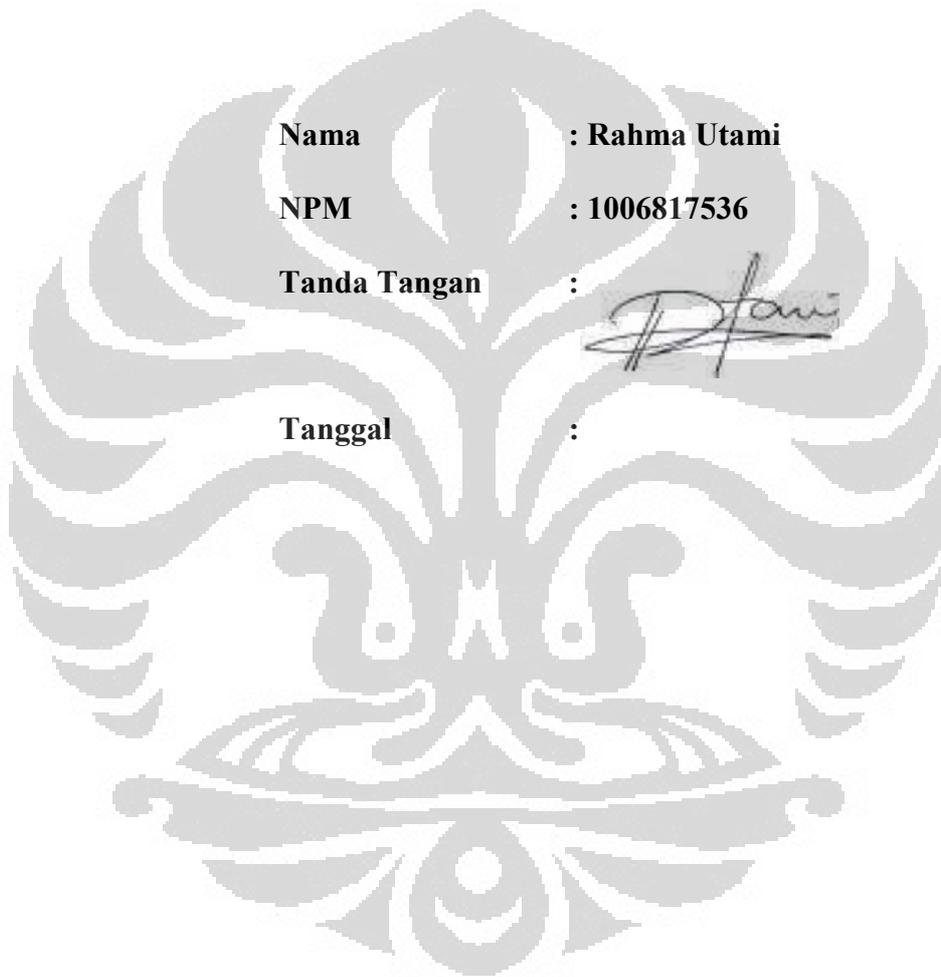
Nama : Rahma Utami

NPM : 1006817536

Tanda Tangan :



Tanggal :



HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :

Nama : Rahma Utami

NPM : 1006817536

Program Studi : Administrasi Negara

Judul : Partisipasi Masyarakat Dalam Formulasi Kebijakan Dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan Tahunan Pada Forum Rembug RW Di Kelurahan Pondok Ranggon

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyarakatan yang diperlukan untuk memperoleh gelar sarjana Ilmu Administrasi pada Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

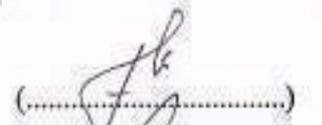
Pembimbing : Drs. Kusnar Budi, M.Bus



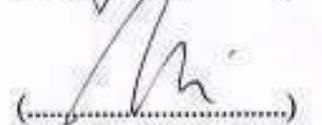
Penguji : Dra. Sri Susilih M.Si



Ketua Sidang : Dra. Afiati. Indri Wardani M.Si



Sekretaris Sidang : Erwin Harinurdin S.Sos. M.Ak



Ditetapkan di : Depok

Tanggal :

Kata Pengantar

Rasa syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir yang berjudul ***Partisipasi Masyarakat Dalam Formulasi Kebijakan Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Pada Forum Rembug RW Di Kelurahan Pondok Ranggon.***

Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana ilmu administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Peneliti menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini. Penulis tak lupa untuk memberikan ungkapan terima kasih kepada:

1. Dekan FISIP UI, Bapak Prof. Dr. Bambang Shergi Laksmono, M.Sc, yang menyediakan fasilitas perkuliahan yang dapat mendukung penyelesaiannya laporan akhir ini.
2. Ketua Program Sarjana Ekstensi Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI, Bapak Drs. Asrori, MA, FLMI.
3. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Program Sarjana Ekstensi Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI, Ibu Dra. Afiati Indri Wardani M.Si yang selalu menambahkan wawasan dan informasi bagi penulis.
4. Segenap jajaran pengajar dan staf Program Studi Administrasi Negara FISIP UI yang tidak dapat disebutkan satu-persatu disini. Penulis mengucapkan terima kasih atas ilmu yang didapat oleh penulis, baik di dalam kelas maupun diluar kelas.
5. Pembimbing penulis, Bapak Drs. Kusnar Budi. M.Bus yang telah meluangkan waktunya untuk berdiskusi, membimbing, mengarahkan, memberikan masukan, kritikan, dan juga saran kepada penulis dalam pembuatan skripsi ini.
6. Penguji dan Sekretaris Sidang, Ibu Dra. Sri Susilih M.Si dan Bapak Erwin Harinurdin S.Sos. M.Ak yang telah memberikan masukan dan kritik yang membangun untuk keterbaikan skripsi ini.
7. Orang Tua penulis, ayah Dirwandi D.A, Mama Restiowati dan adik penulis Ahmad N.F beserta keluarga besar penulis, yang telah mendidik, mengasuh,

dan juga membina penulis, khususnya yang selalu mengingatkan dan memberikan dukungan pada saat pembuatan skripsi ini.

8. Jajaran Kelurahan Pondok Ranggon yang telah menempatkan penulis untuk melakukan kegiatan riset dan bersedia melakukan penelitian dan berdiskusi
9. Seorang semangat, abdillah siddiq yang telah memberikan semangat dan motivasinya untuk selalu mengingatkan segala hal untuk terselesaikannya skripsi ini.
10. Kawan sejati (rani,anggi,ulan,sasa,fara,ayu), yang selalu memberi masukan untuk terselesaikannya skripsi ini.
11. Mahasiswa Program Studi Administrasi Negara (Ria, Intan, Kiel, Martin, Adi, dll yang tak dapat disebutkan satu persatu), yang selama ini berjuang bersama dalam menyelesaikan perkuliahan.
12. Sahabat sahabat penulis (nci,cil,dul,moy), terima kasih telah senantiasa memberikan semangat dalam penyelesaian Skripsi ini.
13. Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang tidak bisa disebutkan satu-persatu di atas, yang selama ini juga telah memberikan warna-warni yang indah di kehidupan penulis.

Besar harapan penulis semoga Penelitian ini dapat bermanfaat. Akhir kata, penulis mengucapkan permintaan maaf bila ada salah kata dan dalam proses penyelesaian Laporan Akhir ada sikap penulis yang kurang berkenan.

Depok, Juni 2012

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rahma Utami

NPM : 1006817536

Program Studi : Administrasi Negara

Departemen : Ilmu Administrasi

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non exclusive royalty free right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**Partisipasi Masyarakat Dalam Formulasi Kebijakan Dalam Penyusunan
Perencanaan Pembangunan Tahunan Pada Forum Rembug RW di
Kelurahan Pondok Ranggon**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) dengan hak bebas royalti noneksklusif ini, Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (data base). Merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Dibuat di : Jakarta

Pada Tanggal :



(Rahma Utami)

ABSTRAK

Rahma Utami (1006817536)

Program Sarjana Ekstensi Ilmu Administrasi Niaga

**”Partisipasi Masyarakat Dalam Formulasi Kebijakan Dalam Penyusunan
Perencanaan Pembangunan Tahunan Pada Forum Rembug RW Di
Kelurahan Pondok Ranggon”**

Penelitian ini membahas tentang partisipasi masyarakat Kelurahan Pondok Ranggon pada tahapan forum Rembug RW untuk menyusun perencanaan pembangunan tahunan. Rangkaian Rembug RW ini dimulai dari tingkat RT untuk membuat alternatif kebijakan yang diajukan pada forum Rembug RW. Pada Perumusan masalah pada penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dalam rangkaian Rembug RW yang di mulai dari tingkat RT. Kemudian dilihatnya hubungan karakteristik individu dengan tingkat partisipasi masyarakat.

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa tingkat partisipasi yang dimulai dari tingkat RT yang kemudian dilanjutkan pada tingkatan RW dalam forum Rembug RW , yang dikaitkan dengan Teori Arnstein dimana adanya 8 tingkat partisipasi yaitu pada tingkatan sedang dan berada dalam tingkat 5 yaitu *Placation*. Pada tingkat partisipasi ini dapat dijelaskan bahwa sudah adanya partisipasi masyarakat dimana masyarakat sudah dilibatkan dalam tahapan penyusunan perencanaan pembangunan, hanya saja semua keputusan tetap berada pada keputusan pemerintah. Karakteristik individu dihubungkan terhadap tingkat partisipasi, dilihat tidak adanya hubungan yang signifikan.

Kata Kunci: partisipasi masyarakat, rembug RW

ABSTRACT

Name : Rahma Utami (1006817536)

Program Study : Public Administration science

Judul : Citizen Participation In Policy Formulation In The
Preparation Of The Annual Planning Forum Rembug RW
In Kelurahan Pondok Ranggon

This research discusses the participation of Kelurahan Pondok Ranggon on stage Rembug RW forum for annual development planning. RW Rembug starts from level RT to make the proposed policy alternatives on the forum Rembug RW. In the formulation of the problem in this study was to determine the level of community participation in the chain RW Rembug that at the start of the RT. Then he saw the relationship of individual characteristics with the level of community participation.

This research uses quantitative methods to the design deskriptif. The study concluded that the level of participation starting from the level RT and then proceed to the level RW ,which was associated with Theory Arnstein where there are eight levels of participation in moderate levels in the Placation level 5. At the level of participation can be explained that it was the participation of society in which people have been involved in the development planning stage, it's just that all decisions remain on the government's decision. Individual characteristics linked to the level of participation, not seen a significant relationship.

Keyword : Citizen Participation, Rembug RW

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i	
LEMBAR PERNYATAAN OROGINALITAS.....	ii	
LEMBAR PENGESAHAN	iii	
KATA PENGANTAR	iv	
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi	
ABSTRAK	vii	
DAFTAR ISI	ix	
DAFTAR TABEL	xi	
DAFTAR GAMBAR	xiii	
DAFTAR LAMPIRAN	xiv	
		Halaman
BAB 1 PENDAHULUAN	1	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1	
1.2 Perumusan Masalah	9	
1.3 Tujuan Penelitian	9	
1.4 Signifikansi Penulisan.....	10	
1.5 Pembatasan Penelitian.....	10	
1.5 Sistematika Penulisan	12	
BAB 2 Kerangka Teori	13	
2.1. Tinjauan Pustaka	13	
2.2. Kerangka Teori	17	
2.2.1 Kebijakan Publik.....	17	
2.2.2 Formulasi Kebijakan	19	
2.2.3 Perencanaan Pembangunan	21	
2.2.3.1 Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan.....	22	
2.2.4 Partisipasi Masyarakat	24	
2.2.4.1 Karakteristik Individu yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat	26	
2.2.4.2 Tingkat Partisipasi Masyarakat	28	
2.3 Operasionalisasi Konsep	35	

BAB 3 METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian	37
3.2 Jenis-Jenis Penelitian.....	37
3.3 Populasi dan Sample	39
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	40
3.5 Validitas dan Reabilitas.....	41
3.6 Teknik Analisis Data	41

BAB 4 GAMBARAN UMUM DAN ANALISIS

4.1 Deskriptif Objek Penelitian.....	45
4.1.1 Kelurahan Pondok Ranggon.....	45
4.1.2 Rembug RW	50
4.2 Deskriptif Hasil Penelitian	57
4.2.1 Validitas dan Reabilitas.....	57
4.2.2 Deskriptif Responden.....	61
4.2.3 Statistik Deskriptif.....	65
4.2.3.1 Partisipasi Tingkat RT	67
4.2.3.2 Partisipasi Tingkat RW	82
4.2.4 Tabulasi Silang Tingkat Partisipasi dengan Karakteristik Individu	98
4.2.4.1 Tabulasi Silang Partisipasi Tingkat RT dengan Karakteristik Individu	98
4.2.4.2 Tabulasi Silang Partisipasi Rembug RW dengan Karakteristik Individu	103
4.2.4.3 Analisis Karakteristik Individu Yang Berhubungan Untuk Menentukan Tingkat Partisipasi.....	108

BAB 5 PENUTUP

5.1. Kesimpulan.....	111
5.2. Saran.....	113

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

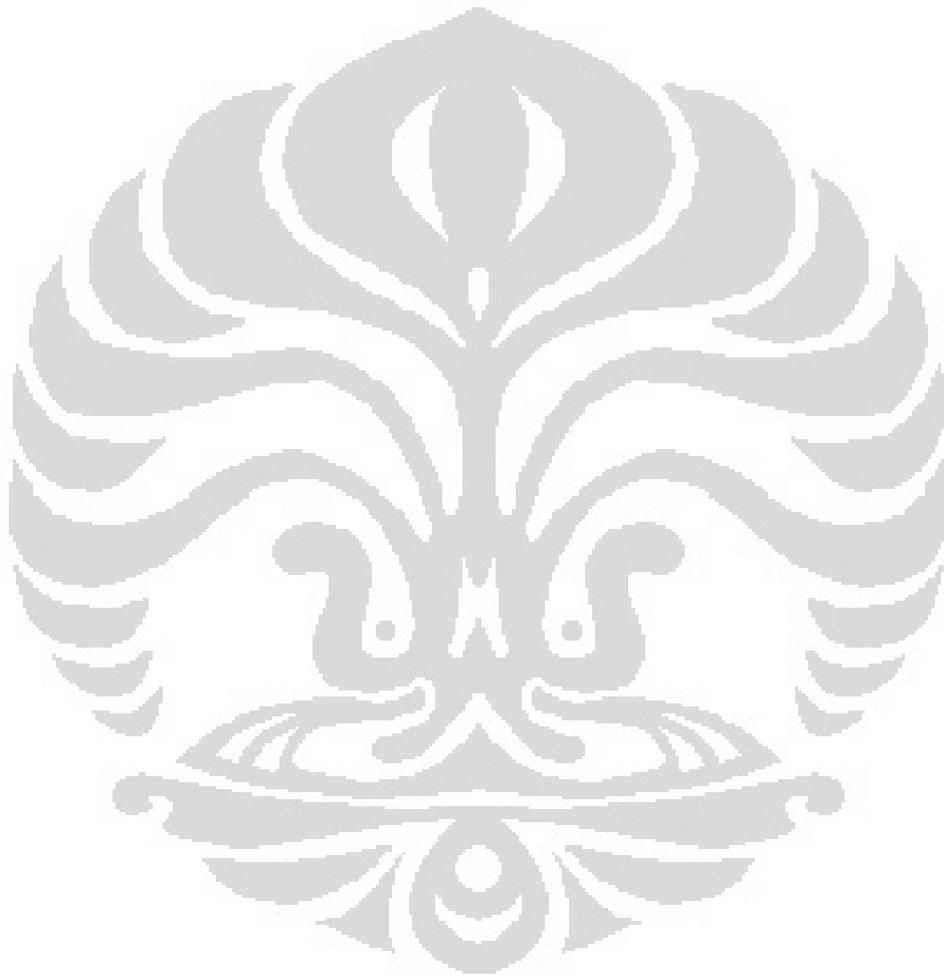
DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbandingan Antar Penelitian	14
Tabel 2.2 Tingkat Partisipasi Masyarakat	28
Tabel 2.3 Jabaran Kriteria Peran Dalam Tingkatan Partisipasi	33
Tabel 2.4 Operasional Konsep	35
Tabel 3.1 Data Tiap RW Yang Ikut Serta Dalam Forum	39
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk	47
Tabel 4.2 Penduduk Menurut Kelompok Umur	48
Tabel 4.3 Penduduk Menurut Mata Pencaharian	49
Tabel 4.4 Penduduk Menurut Tingkat.....	49
Tabel 4.5 Anti-image Correlation Pada TingkatRT	58
Tabel 4.6 Anti-image Correlation Pada Tingkat Rembug RW	59
Tabel 4.7 Sebaran Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	62
Tabel 4.8 Sebaran Responden Berdasarkan Usia.....	62
Tabel 4.9 Sebaran Responden Berdasarkan Pendidikan	63
Tabel 4.10 Sebaran Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan	63
Tabel 4.11 Sebaran Responden Berdasarkan Penghasilan Per bulan.....	64
Tabel 4.12 Sebaran Responden Berdasarkan Lama Tinggal.....	64
Tabel 4.13 Sebaran Responden Berdasarkan Asal Daerah	65
Tabel 4.14 Pernyataan 1 Tingkat RT	67
Tabel 4.15 Pernyataan 2 Tingkat RT	68
Tabel 4.16 Pernyataan 3 Tingkat RT	68
Tabel 4.17 Pernyataan 4 Tingkat RT	69
Tabel 4.18 Pernyataan 5 Tingkat RT	70
Tabel 4.19 Pernyataan 6 Tingkat RT.....	71
Tabel 4.20 Pernyataan 7 Tingkat RT	72
Tabel 4.21 Pernyataan 8 Tingkat RT	72
Tabel 4.22 Pernyataan 9 Tingkat RT	73
Tabel 4.23 Pernyataan 10 Tingkat RT	74
Tabel 4.24 Pernyataan 11 Tingkat RT.....	74
Tabel 4.25 Pernyataan 12 Tingkat RT	75

Tabel 4.26 Tingkat Partisipasi RT.....	76
Tabel 4.27 Tingkat Partisipasi RT.....	77
Tabel 4.28 Tingkat Partisipasi Teori Arnstein	78
Tabel 4.29 Pernyataan 1 Rembug RW	82
Tabel 4.30 Pernyataan 2 Rembug RW	83
Tabel 4.31 Pernyataan 3 Rembug RW	83
Tabel 4.32 Pernyataan 4 Rembug RW	84
Tabel 4.33 Pernyataan 5 Rembug RW	85
Tabel 4.34 Pernyataan 6 Rembug RW	86
Tabel 4.35 Pernyataan 7 Rembug RW	87
Tabel 4.36 Pernyataan 8 Rembug RW	87
Tabel 4.37 Pernyataan 9 Rembug RW	88
Tabel 4.38 Pernyataan 10 Rembug RW	89
Tabel 4.39 Pernyataan 11 Rembug RW	89
Tabel 4.40 Pernyataan 12 Rembug RW	90
Tabel 4.41 Tingkat Partisipasi RW	91
Tabel 4.42 Tingkat Partisipasi RW	92
Tabel 4.43 Tingkat Partisipasi Teori Arnstein	93
Tabel 4.44 Tabulasi silang partisipasi di tingkat RT dan Usia.....	98
Tabel 4.45 Tabulasi silang partisipasi di tingkat RT dan Pendidikan.....	99
Tabel 4.46 Tabulasi silang partisipasi di tingkat RT dan Pekerjaan	100
Tabel 4.47 Tabulasi silang partisipasi di tingkat RT dan Penghasilan.....	101
Tabel 4.48 Tabulasi silang partisipasi di tingkat RT dan Lama Tingga.....	101
Tabel 4.49 Tabulasi silang partisipasi di tingkat RT dan Asal Daerah	102
Tabel 4.50 Tabulasi silang partisipasi Rembug RW dan Usia.....	103
Tabel 4.51 Tabulasi silang partisipasi Rembug RW dan Pendidikan	104
Tabel 4.52 Tabulasi silang partisipasi di Rembug RW dan Pekerjaan	104
Tabel 4.53 Tabulasi silang partisipasi di Rembug RW dan Penghasilan.....	105
Tabel 4.54 Tabulasi silang partisipasi di Rembug RW dan Lama Tinggal.....	106
Tabel 4.55 Tabulasi silang partisipasi di Rembug RW dan Asal Daerah	107

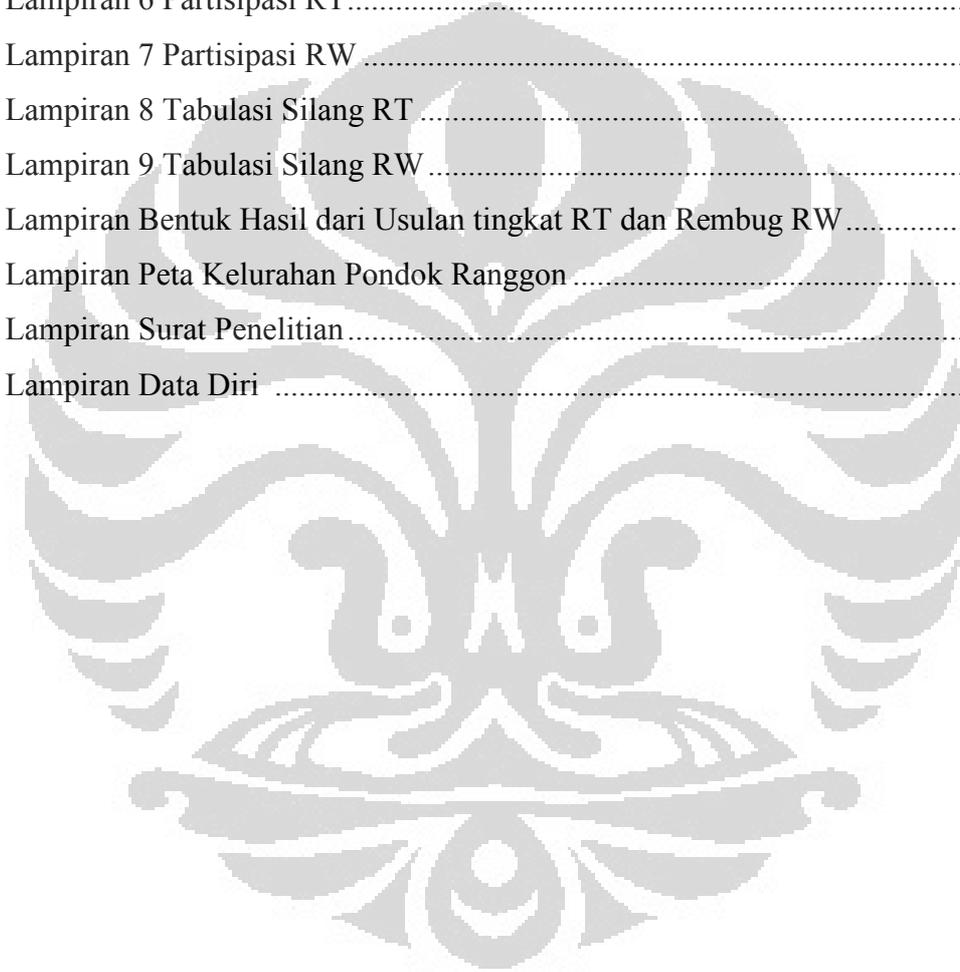
DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Model Rasional Kebijakan Publik	20
Gambar 4.1 Mekanisme Rembug RW	51
Gambar 4.2 Mekanisme Rembug RW	54
Gambar 4.3 Tingkat Partisipasi RT	77
Gambar 4.4 Tingkat Partisipasi RW	92



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner	
Lampiran 2 Coding Sheet	
Lampiran 3 Validitas dan Reabilitas RT	
Lampiran 4 Validitas dan Reabilitas RW	
Lampiran 5 Data Responden	
Lampiran 6 Partisipasi RT	
Lampiran 7 Partisipasi RW	
Lampiran 8 Tabulasi Silang RT	
Lampiran 9 Tabulasi Silang RW	
Lampiran Bentuk Hasil dari Usulan tingkat RT dan Rembug RW	
Lampiran Peta Kelurahan Pondok Ranggon	
Lampiran Surat Penelitian	
Lampiran Data Diri	



BAB 1

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara Demokrasi, oleh karena itu semestinya setiap individu memiliki hak bersuara. Salah satu indikasi terciptanya iklim demokrasi adalah adanya partisipasi rakyat. Artinya rakyat atau warga negara diikutsertakan oleh pemerintah dalam pembuatan keputusan. Disinilah peran pemerintah menjadi penting untuk menampung aspirasi masyarakat, dan kemudian memproses menjadi kebijakan-kebijakan. Hal tersebut menunjukkan adanya kekuatan dan kewenangan masyarakat untuk mempengaruhi suatu keputusan dan kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Kehidupan demokratis hanya dapat diwujudkan dinegeri ini, bila sistem politik benar-benar dapat mengakses partisipasi politik rakyat. Sejauh pemerintah dan masyarakat mampu mengoperasikan kegiatan politik kearah partisipasi mayoritas, sejauh itu pula demokrasi akan menjadi solid (Malik, 1999:65). Dalam hal ini, demokrasi di Indonesia sudah mulai berkembang dan terus mengarah pada perbaikan. Saat ini demokrasi yang berkembang di Indonesia masih sebatas kulit luar, artinya belum mencapai tahap menggunakan roh demokrasi itu sendiri. Diantara indikator yang digunakan untuk mengetahui tinggi atau rendahnya indeks demokrasi di Indonesia adalah budaya politik, partisipasi masyarakat, dan dukungan pemerintah. Ada pendapat yang mengatakan bahwa, indeks demokrasi di Indonesia masih di bawah Timor Leste; hal ini mengindikasikan masih rendahnya budaya politik para politisi, rendahnya partisipasi masyarakat, dan belum maksimalnya peran pemerintah dalam mendorong terbangunnya demokrasi yang mapan (Ketua DPD Irman Gusman dalam www.lampungpost.com, 25.03.2012).

Dewasa ini, struktur demokrasi yang terbangun cenderung bersifat elitis, yakni hanya sebagian orang atau kelompok saja yang berperan dalam Negara. Sementara aspirasi masyarakat luas tidak mendapat tempat atau menjadi perhatian

utama kelompok yang berperan tersebut. Padahal demokrasi tak lepas dari peran pemegang kedaulatan tersebut. Kenyataan ini telah melahirkan kekecewaan yang amat besar di kalangan masyarakat, karena kelompok yang berperan dalam sistem (pemerintahan) tidak memperjuangkan aspirasi kalangan bawah (Suryana, 2006:102). Bukan rahasia lagi bahwa di Negara Indonesia ini pertimbangan ekonomis, stabilitas dan keamanan sering mengalahkan pertimbangan-pertimbangan yang terkait aspirasi masyarakat dan hak asasi warga Negara. Berdasarkan permasalahan tersebut, sesungguhnya sudah saatnya dalam alam demokrasi ini pemerintah berperan untuk lebih memperhatikan kehendak rakyat yang sebenarnya; Hal ini sekaligus untuk mendidik masyarakat untuk ikut terlibat/bertpartisipasi (Kumorotomo, 2005:135).

Pada dasarnya semua Warga Negara harus memiliki kesempatan yang kurang lebih sama untuk berpartisipasi dalam ranah publik. Warga Negara harus diberi kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif baik melalui forum-forum publik, asosiasi, perhimpunan, partai politik maupun sarana-saran lainnya guna pembentukan opini yang kuat secara bersama. Setiap individu seyogyanya juga diberi kesempatan yang kurang lebih sama untuk mengetahui informasi penting tentang isu-isu politik utama Negara. Semua warga Negara yang tinggal di daerah terpencil sekalipun perlu memiliki akses kepada media massa dan forum dialog. (Meyer, 2002:37)

Pada kenyataannya masih terdapat sebuah gejala kurangnya partisipasi masyarakat terhadap agenda pembangunan. Kasus ini misalnya muncul dalam beberapa peristiwa penolakan masyarakat terhadap beberapa proyek pembangunan yang akan dilakukan pemerintah. Salah satu indikasi yang timbul karena berangkat dari adanya ketidakberdayaan masyarakat untuk menghadapi masalah internal. Tumbuhnya gejala-gejala kekecewaan yang akhirnya terakumulasi pada pemerintah, termasuk ketika pemerintah sebenarnya bermaksud memperbaiki masyarakat lewat agenda pembangunan yang dilakukan. Di sisi lain, dalam banyak kasus pemerintah memang kurang melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan; dan cenderung menyalahkan masyarakat tanpa mencari faktor-faktor penyebabnya, sehingga permasalahan yang dihadapi tidak

dapat dipecahkan. Oleh karena itu, hal yang terpenting adalah mencari solusi yang bersifat komprehensif dan sistematis, sehingga setiap masalah yang ada dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya. (*Kompas*, <http://sosbud.kompasiana.com>, 25.03.2012)

Pendekatan pelaksanaan pembangunan yang sentralistik dan didominasi oleh pemerintah merupakan faktor yang menghambat upaya pemberdayaan masyarakat. Hal ini tercermin dari ketidakpedulian masyarakat dalam mencapai tujuan-tujuan bersama. (www.wwf.or.id, 04.04.2012). Permasalahan tersebut disebabkan dari rendahnya kapasitas masyarakat untuk mengembangkan partisipasi, hal ini diakibatkan tidak terbiasanya masyarakat untuk ikut dilibatkan, sedangkan didalam proses pembangunan pemerintah seharusnya dalam kebijakannya harus senantiasa melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan, yang pada nantinya akan memberi pengaruh pada kehidupan masyarakat (Juliantara, 2004:86-87).

Melihat dampak yang ada karena kurangnya partisipasi masyarakat, seharusnya para birokrat senantiasa memperhatikan aspirasi-aspirasi masyarakat dan mendukung partisipasi seluruh kemasyarakatan secara wajar. Sesungguhnya rakyat sendirilah yang paling paham mengenai kebutuhannya, seperti yang diungkapkan oleh Kweit (Kumorotomo, 2005:141). Dalam kaitan ini, secara ideal, lembaga legislatif sanggup meletakkan dirinya sebagai lembaga yang mempresentasikan masyarakat. Pada tataran ini produk kebijakan pemerintah seharusnya sungguh-sungguh merupakan perwujudan dari aspirasi masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, produk kebijakan yang dikeluarkan pemerintah menjadi sebangun dengan kehendak rakyat. Namun pada prakteknya, lembaga legislatif tidak selalu mempresentasikan rakyat. Hal ini terbukti dari banyak kasus peraturan daerah yang diprotes oleh masyarakat daerah itu sendiri. Adanya hal ini karena keterbatasan untuk menerjemahkan kehendak atau aspirasi rakyat menjadi sebuah kebijakan. Keterbatasan ini yang kemudian memunculkan konsep partisipasi masyarakat menjadi penting untuk diajukan. Dengan melibatkan masyarakat seluas-luasnya dalam menyusun produk kebijakan, maka hasilnya diharapkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Koesnadi:2003:20).

Seharusnya Kebijakan untuk melakukan sesuatu harus dirumuskan secara jelas dan tidak sekedar mencerminkan keinginan pejabat pemerintah saja melainkan kebijakan pemerintah secara menyeluruh. (Syafiie,2006,105).

Melibatkan masyarakat dalam penyusunan produk kebijakan merupakan awal yang penting. Nugroho (2011:505) dalam hal ini menyebutkan bahwa proses formulasi kebijakan merupakan titik awal yang penting dan berpengaruh bagi sebuah kebijakan publik. “...proses kebijakan publik adalah inti dari kebijakan publik karena disini dirumuskan batas-batas kebijakan itu sendiri...” Dalam formulasi kebijakan terdapat sebuah proses dimana beragam informasi mengenai suatu kebijakan publik akan dipaparkan, serta beragam analisa akan diungkapkan guna mendapat banyak alternatif kebijakan hingga dipilih satu alternatif yang paling cocok dan tepat. Proses ini seharusnya mampu diakses oleh beragam lapisan masyarakat agar masyarakat mampu mengetahui beragam informasi secara utuh demi melakukan kontrol hingga proses implementasinya, karena tanpa informasi dan pengetahuan, masyarakat tidak memiliki “alat” untuk melakukan kontrol secara efektif. Dalam konteks ini, masyarakat tidak lagi dipandang dan dinilai sebagai objek, melainkan bergeser menjadi subjek dalam formulasi kebijakan, yang mampu ikut mempengaruhi, berkontribusi secara langsung, mengumpulkan informasi secara utuh, menganalisa berbagai alternatif yang ditawarkan, berinteraksi dengan para pakar, hingga masyarakat memiliki pemahaman dan mampu mengontrol sebuah formulasi kebijakan.

Sejalan dengan pendapat tersebut di atas, Agustino (2008:96) menegaskan bahwa hal terpenting dalam proses kebijakan publik adalah formulasi (perumusan) kebijakan; dimana studi mengenai formulasi kebijakan ini memberikan perhatian yang sangat dalam pada sifat-sifat perumusan permasalahan publik. Formulasi kebijakan merupakan fundamental atau dasar dalam kebijakan publik, supaya arah kebijakan menjadi benar, tepat dan sesuai yang diharapkan.

Melihat pentingnya tahapan formulasi, maka seharusnya masyarakat dapat dilibatkan secara langsung. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa dalam penyusunan

perencanaan pembangunan memerlukan koordinasi antar instansi pemerintah dan partisipasi seluruh pelaku pembangunan, melalui suatu Forum yang disebut Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang. Adanya forum ini diharapkan dapat merupakan langkah yang baik dalam pemberdayaan masyarakat, selanjutnya diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat sehingga menghasilkan perencanaan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Pada forum yang telah disediakan, sebaiknya masyarakat dapat berpartisipasi, misalnya melalui pemberian suara atau kegiatan lain, dengan mendorong keyakinan bahwa kegiatan bersama itu adalah kebutuhan dan kepentingan masyarakat akan tersalurkan atau sekurang-kurangnya diperhatikan dan sedikit banyaknya dapat mempengaruhi tindakan dari yang berwenang untuk membuat keputusan. (Budiardjo, 1996:185)

Kebijakan negara bukanlah merupakan sesuatu yang mudah untuk dibuat dan dirumuskan. Banyak hal yang mempengaruhi suatu kebijakan. Pada intinya semestinya setiap kebijakan yang dibuat adalah untuk kepentingan masyarakat banyak, tetapi terkadang banyak kebijakan pemerintah yang tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan kepentingan publik padahal salah satu peran pemerintah adalah menyerap dan mengartikulasikan berbagi kepentingan masyarakat yang berbeda-beda.

Keikutsertaan masyarakat dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah ini, semestinya dilakukan sudah dari tingkat kecil yaitu RT (Rukun Tetangga) kemudian RW (Rukun Warga) yang berlanjut usulan tersebut akan diolah dalam tingkat kelurahan, kecamatan, Kota atau provinsi bahkan nasional. Pentingnya dalam pengumpulan usulan dari tingkat terkecil, diharapkan kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah dapat memenuhi kepentingan publik. Tingkat paling bawah (*grass root*) untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam rangka memperkuat kapasitas dan kemandirian masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan adalah dalam forum Rembug RW (<http://desacilayung.com> , 20.04.2012).

Usulan dari tingkat terkecil ini akan adanya usulan prioritas yang kemudian dilanjutkan ke tingkat RW yang kemudian akan diseleksi kembali menjadi beberapa usulan yang menjadi alternatif penting yang selanjutnya akan ditentukan menjadi sebuah kebijakan pada tingkat kelurahan atau kecamatan atau kota. Bila prosedur dijalankan dengan baik dan sesuai maka akan adanya kepentingan publik yang dijunjung tinggi, tapi kenyataannya usulan yang dipilih berdasarkan prioritas, belum berdasarkan hal yang penting. Masih banyaknya campur tangan yang tidak bersifat netral yang masih mementingkan kepentingan politik sehingga dalam proses pembuatan kebijakan tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Pemerintah semestinya mewadahi aspirasi masyarakat dan adanya tempat untuk masyarakat mengidentifikasi masalah yang ada, kebutuhan yang dibutuhkan selanjutnya dengan itu dapat menentukan kegiatan yang menyelesaikan masalah berdasarkan skala prioritas yang disepakati bersama, inilah peran penting dari adanya Rembug RW. Hasil dari Rembug RW ini dilaporkan kepada kelurahan. Dengan ini kelurahan akan bertanggung jawab terhadap proses input data kedalam sistem informasi perencanaan yang dilakukan oleh tim pendamping kelurahan. (Panduan Rembug RW, 2012)

Dengan adanya wadah seperti rembug RW yang kemudian dilanjutkan pada Musrenbang Kelurahan, diharapkan dapat menjadi wadah aspirasi masyarakat. Kegiatan ini akan mengetahui kebutuhan masyarakat yang mendesak dan masyarakat menjadi diarahkan dalam menentukan kebijakan. Disinilah pentingnya partisipasi masyarakat karena masyarakatlah yang mengetahui akan kebutuhannya.

Partisipasi masyarakat merupakan unsur utama dalam proses musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang). Menurut tjokroamidjojo (1980:16), tujuan perencanaan pembangunan dapat dicapai melalui perumusan dan pelaksanaan berbagai kebijakan dan program-program pembangunan yang konsisten dan berdasarkan prioritas yang tajam. Berhasilnya pencapaian tujuan-

tujuan pembangunan memerlukan keterlibatan atau partisipasi masyarakat pada umumnya.

Partisipasi dengan melibatkan masyarakat secara langsung dalam proses formulasi kebijakan, dimana adanya usulan awal yang kemudian dimusyawarahkan untuk dijadikan suatu kebijakan pemerintah. Hal ini merupakan salah satu bentuk tindakan pemerintah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, misalnya dengan contoh adanya forum musyawarah ataupun musrenbang. Hanya saja disini yang harus ditekankan musrenbang ini sudah berjalan dengan efektif dan sesuai atau bahkan hanya sebagai symbol bahwa adanya partisipasi masyarakat dan tetap keputusan ada di pemerintah dan lebih mementingkan kepentingan politik bukan kepentingan publik dalam pembuatan kebijakan atau programnya.

Pada dasarnya pemerintah dapat merangkul dan bekerjasama dengan masyarakat. Salah satu contoh bentuk program pemerintah yang dapat meningkatkan partisipasi masyarakat, yaitu seperti yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta dengan mengeluarkan Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta nomor 1561/2002 tentang “Pedoman Pelaksanaan Program Pemberdayaan masyarakat Kelurahan (PPMK) dalam Rangka Mempercepat Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di kelurahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2003-2007.” Terkait hal ini, Kelurahan Pondok Rongon, di Kecamatan Cipayung - Jakarta Timur berhasil menjadi Juara I Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi seluruh Indonesia tahun 2007. Kemenangan ini didukung dengan keberhasilan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Pondok Rongon dan tingginya swadaya masyarakat. Tinggi nya swadaya ini dapat dilihat dari Kelurahan Pondok Rongon yang mampu menghimpun dan memanfaatkan dana swadaya masyarakat untuk kepentingan peningkatan perekonomian masyarakat. Jika pada tahun 2005 dana tersebut mencapai Rp1,4 miliar, pada tahun 2006 mampu mencapai Rp5,2 miliar. (*Berita Jakarta* www.beritajakarta.com, 18.04.2012)

Dengan melihat kejuaraan yang membanggakan tersebut terlihat kelurahan Pondok Ronggon adalah kelurahan terbaik, tetapi seberapa besar partisipasi masyarakat dalam pembuatan keputusan suatu kebijakan tersebut akhirnya dijalankan. Program pemerintah seharusnya dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya dan sesuai dengan aspirasi masyarakat, maka sangatlah penting keterlibatan peran aktif masyarakat dalam mengeluarkan pendapat dan usulan dalam forum musyawarah bekerjasama dengan pemerintah. Dengan ini akan terlihatnya bentuk langsung partisipasi masyarakat dalam formulasi kebijakan.

Perlu adanya wadah dari bagian terkecil masyarakat dari tingkat RT yang kemudian dilanjutkan ke tingkat RW, setiap RW yang berada di kelurahan Pondok Ronggon berpartisipasi aktif dan mengeluarkan usulan hal-hal yang dibutuhkan bagi daerahnya di dalam proses formulasi kebijakan. Yang kemudian usulan tersebut akan diproses dan dibicarakan untuk menentukan usulan yang prioritas yang dapat dijalankan oleh pihak kelurahan, atau kebijakan tersebut harus diproses di kecamatan ataupun usulan tersebut harus masuk ke tingkat kota. Adanya proses perumusan masalah untuk pengambilan keputusan dimana diawali dari usulan di tingkatan RT yang kemudian di olah atau di sharing untuk menentukan beberapa point usulan yang kemudian dilanjutkan ke tingkatan RW yang kemudian lebih menseleksi usulan tersebut yang selanjutnya di bahas dalam tingkat kelurahan.

Dengan melihat pentingnya aspirasi dan peran aktif dari masyarakat dalam menyalurkan aspirasi dan usulan dan proses formulasi kebijakan, menjadi dasar penting untuk mengkajinya lebih kritis dalam skripsi ini. Untuk itu, judul dari penelitian/skripsi ini adalah: *Partisipasi Masyarakat Dalam Formulasi Kebijakan Dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan Tahunan Pada Forum Rembug RW Di Kelurahan Pondok Ronggon*

1.2. Perumusan Masalah

Dengan melihat partisipasi masyarakat sebagai salah satu point penting dalam proses formulasi, sehingga kebijakan yang ada dapat sesuai dengan aspirasi dan kepentingan masyarakat, dan oleh karenanya masyarakat diharapkan dapat menjalin kerjasama dengan pemerintah dan terlibat aktif, maka ini skripsi ini akan membahas dua masalah pokok sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dari Kelurahan Pondok Ranggon dalam proses formulasi kebijakan dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan Tahunan pada Forum Rembug RW mulai dari tingkat RT di Kelurahan Pondok Ranggon?
2. Karakteristik individu apa yang berhubungan untuk menentukan tingkat partisipasi masyarakat Kelurahan Pondok Ranggon dalam berpartisipasi dalam proses formulasi kebijakan dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan Tahunan pada Forum Rembug RW mulai dari tingkat RT di Kelurahan Pondok Ranggon?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dari Kelurahan Pondok Ranggon dalam proses formulasi kebijakan dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan Tahunan pada Forum Rembug RW mulai dari tingkat RT di Kelurahan Pondok Ranggon.
2. Mengetahui Karakteristik individu yang berhubungan untuk menentukan tingkat partisipasi masyarakat Kelurahan Pondok Ranggon dalam berpartisipasi dalam proses formulasi kebijakan dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan Tahunan pada Forum Rembug RW mulai dari tingkat RT di Kelurahan Pondok Ranggon.

1.4. Signifikansi Penulisan

Signifikansi penulisan skripsi ini dapat dilihat dalam dua perspektif akademis dan praktis.

1. Signifikansi Akademis

Secara akademis penulisan skripsi ini dapat menambah wawasan terutama yang terkait dengan bidang administrasi Negara, khususnya guna menambah pengetahuan yang sistematis tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan publik. Dengan demikian diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu yang berkaitan dengan pembahasan partisipasi masyarakat tersebut.

2. Signifikansi Praktis

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat memberikan gambaran kepada masyarakat, khususnya pihak-pihak terkait, baik organisasi publik ataupun swasta tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan publik. Dengan demikian dapat dibangun kesadaran masyarakat dan pemerintah untuk dapat bekerjasama dengan baik dan harmonis dalam proses formulasi kebijakan publik.

1.5 Pembatasan Penelitian

Pembatasan yang diambil dalam penelitian ini, dimana penulis melihat partisipasi masyarakat dalam proses formulasi kebijakan. Dengan melihat pentingnya tahap formulasi kebijakan untuk menentukan keputusan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan kepentingan publik. Pada penelitian ini, melihat tentang tingkat partisipasi untuk mengetahui tempat atau kedudukan dari para masyarakat dalam formulasi kebijakan. Penelitian ini melihat keaktifan dan ketelibatan dari masyarakat didasarkan atas karakteristik individu yang terkait untuk mempengaruhi masyarakat terlibat di dalam formulasi kebijakan.

Penelitian ini dilakukan pada tingkat kelurahan, dimana mayoritas penduduk Indonesia berada di tingkat kelurahan dimana RT dan RW berada. Pentingnya tingkat partisipasi masyarakat perlu diteliti dari ruang paling kecil yaitu dalam tingkat RT, yaitu dengan meneliti keterlibatan masyarakat dalam ruang lingkup terkecil dalam proses formulasi kebijakan.

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kelurahan Pondok Ronggon, Dengan melihat lokasi Pondok Ronggon yang terletak di pusat kota yaitu Jakarta dimana tepatnya di daerah Jakarta Timur. Kelurahan Pondok Ronggon adalah satunya-satunya kelurahan Jakarta Timur yang sebagian besar penduduk aslinya berbahasa Sunda. Hal ini karena wilayah kelurahan Pondok Ronggon terletak diperbatasan antara wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Bogor; dengan demikian Masyarakat Pondok Ronggon sebagian besar terpengaruh kebudayaan Sunda. Hal ini jelas terlihat/terdengar dari bahasa yang dipakai untuk komunikasi yaitu Sunda-Betawi. Ciri khas lain yang juga menarik adalah bahwa penduduk kelurahan Pondok Ronggon setahun sekali mengadakan upacara selamatan "*Hajat Bumi*" yang bertujuan untuk minta keselamatan. Upacara hajat bumi biasanya diadakan pada tanggal pertengahan bulan haji (Zulhijah) dan memilih hari Jumat diawali dengan selamatan khusus penduduk Pondok Ronggon di makam kramat Ganceng pada hari Kamis malam Jumat. Upacara *Hajat Bumi* tersebut diadakan secara turun temurun dari dahulu sampai sekarang. Hal tersebut tanpa adanya suatu perintah dari kelurahan, tetapi atas dasar kemauan dari masyarakat sendiri dengan biaya swadaya warga (www.Jakarta.go.id, 25.03.2012) Dengan melihat prestasi kebanggaan Kelurahan Pondok Ronggon menjadi kelurahan terbaik nasional tahun 2007 tersebut, maka skripsi bermaksud membahas *partisipasi masyarakat dalam proses formulasi kebijakan yang ada di Kelurahan Pondok Ronggon*.

I.6 Sistematika Penulisan

Tulisan ini disusun dalam lima bab. tersusun dalam uraian berikut :

BAB 1. PENDAHULUAN

Bab ini menggambarkan tentang latar belakang adanya penelitian ini, menjelaskan perumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, dan memaparkan batasan penelitian serta menjelaskan sistematika penulisan.

BAB 2. TINJAUAN TEORI

Bab ini menjelaskan tentang teori yang terkait dalam penelitian. Dimana berhubungan dengan teori kebijakan publik, partisipasi masyarakat, perencanaan pembangunan, tingkat partisipasi dan karakteristik individu yang digunakan sebagai landasan pembahasan dalam skripsi ini.

BAB 3. METODE PENELITIAN

Bab ini memaparkan metode yang digunakan dalam pengumpulan dan pengolahan data yang terkait tujuan penelitian ini.

BAB 4. GAMBARAN UMUM & ANALISIS PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORMULASI KEBIJAKAN DALAM PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUNAN PADA FORUM REMBUG RW DI KELURAHAN PONDOK RANGGON

Bab ini menyajikan gambaran umum obyek penelitian dan analisis relasi antara teori dengan fakta yang terjadi dilapangan, terkait dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam berpartisipasi dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan untuk kemudian dijadikan suatu kebijakan di kelurahan Pondok Ranggon.

BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menyimpulkan hubungan dari teori dengan fakta yang ada, dan menjawab pertanyaan penelitian ini, serta menyajikan saran-saran yang mendukung dan terkait dengan permasalahan yang disimpulkan.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

2.1 Tinjauan Pustaka

Skripsi ini mengangkat judul *Partisipasi Masyarakat dalam Formulasi Kebijakan dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan Tahunan dalam Forum Rembug RW pada Kelurahan Pondok Ranggon*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam mengeluarkan pendapat atau pun usulan untuk dibuatnya suatu perencanaan pembangunan tahunan pada forum Rembug RW di tingkat kelurahan. Dengan hal ini maka perlu diketahuinya karakteristik individu yang mempengaruhi setiap individu untuk berpartisipasi. Karakteristik individu tersebut dihubungkan dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam forum ini.

Dalam hal ini maka diperlukan suatu tinjauan terhadap penelitian-penelitian dan kajian ilmiah terdahulu serta berbagai konsep yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini, yaitu terkait dengan penelitian tentang partisipasi masyarakat dan proses formulasi kebijakan. Penelitian pertama yang dijadikan tinjauan pustaka diambil dari skripsi yang berjudul “Peranan Interest Group dalam Mempengaruhi Penyusunan Agenda Kebijakan Pemerintah Tentang Anti Pornografi.” karya Sancoko (2003). Penelitian kedua berjudul “Pengaruh Hambatan Partisipasi Politik Terhadap Tingkat Partisipasi Politik Wanita Anggota DPR RI Periode 1999-2004.” Karya Haryati (2001). Dua penelitian tersebut mempunyai hubungan dan keterkaitan dengan topik kajian skripsi ini. Dengan demikian, kedua penelitian tersebut dapat memberikan masukan pemikiran terkait pembahasan dalam skripsi ini.

Tabel 2.1
Perbandingan Antar Penelitian

No	Keterangan	Penelitian Pertama	Penelitian Kedua	Penelitian Ketiga
1	Nama	Sancoko	Haryati	Rahma Utami
2	Judul	Peranan Interest Group Dalam Mempengaruhi Penyusunan Agenda Kebijakan Pemerintah Tentang Anti Pornografi	Pengaruh Hambatan Partisipasi Politik Terhadap Tingkat Partisipasi Politik Wanita Anggota DPR RI Periode 1999-2004	“Partisipasi Masyarakat Dalam Formulasi Kebijakan Terhadap Penyusunan Perencanaan Pembangunan Tahunan Dalam Forum Rembug RW Pada Kelurahan Pondok Ranggon”
3	Tujuan	Mengetahui peranan yang dilakukan oleh interest group untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah tentang pornografi	Mengetahui tingkat partisipasi politik yang dimiliki oleh para wanita anggota DPR RI, mengetahui hambatan yang ada. Dan melihat hubungan antara hambatan dengan tingkat	Mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dari Kelurahan Pondok Ranggon dalam proses formulasi kebijakan Terhadap Penyusunan Perencanaan Pembangunan Tahunan Dalam Forum Rembug

No	Keterangan	Penelitian Pertama	Penelitian Kedua	Penelitian Ketiga
			partisipasi politik wanita anggota DPR RI periode 1999-2004	RW Pada Kelurahan Pondok Ranggan Mengetahui Karakteristik yang menentukan tingkat partisipasi masyarakat Kelurahan Pondok Ranggan dalam berpartisipasi dalam proses formulasi kebijakan Terhadap Penyusunan Perencanaan Pembangunan Tahunan Dalam Forum Rembug RW Pada Kelurahan Pondok Ranggan
4	Pendekatan Penelitian	Kualitatif	Kuantitatif	Kuantitatif
5	Jenis Penelitian	Deskriptif	Survei Eskplanatori	Deskriptif

No	Keterangan	Penelitian Pertama	Penelitian Kedua	Penelitian Ketiga
6	Teknik Pengumpulan Data	Studi lapangan dengan wawancara tdk berstruktur dan studi kepustakaan	Data Primer dengan kuesioner dan data sekunder dari studi kepustakaan dan data dari biro	Data Primer dengan kuesioner dan data sekunder dari studi kepustakaan
7	Hasil Yang diperoleh	Dimana adanya masyarakat tolak ponografi, dimana berupaya mempengaruhi penyusunan agenda kebijakan, dijelaskan cara-cara dan langkah dalam melakukan proses penolakan seperti: melakukan demotransi, hearing, dll. Atau pun dapat pula dengan forum menteri agama.	Dimana dapat dilihat tingkat partisipasi dalam ruang lingkup katagori sedang, yang mana melihat variabel keikutsertaan dalam panitia dan badan DPR. Dan untuk hambatan masuk dalam katagori sedang yang mana didominasi pada hambatan structural. Dan bila dilihat hubungannya terbukti tidak ada pengaruh yang nyata	Hipotesis atau jawaban sementara dari penelitian : Karakteristik individu mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat

Dengan melihat tinjauan pustaka tersebut, maka dapat membantu untuk menambah wawasan dan mempelajari penelitian yang sebelumnya. Sehingga akan melengkapi pemikiran penelitian tentang partisipasi masyarakat dalam formulasi kebijakan publik.

2.2. Kerangka Teori

Kerangka teori ini akan digunakan untuk menganalisis tentang penelitian partisipasi masyarakat dalam formulasi kebijakan publik. Peneliti menggunakan teori-teori pendukung meliputi : Kebijakan Publik, Formulasi Kebijakan, Partisipasi Masyarakat, Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan dan Karakteristik Individu, Penjelasan teori tersebut, yaitu :

2.2.1 Kebijakan Publik

Secara konseptual kebijakan publik dapat dilihat dari kamus administrasi publik, dimana Chandler dan Plano mengatakan bahwa kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber-sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah publik atau pemerintah (Pasolong, 2007:38). Pandangan lain tentang kebijakan publik dikemukakan oleh Dye (2008:1), *publik policy is whatever government chooses to do or not to do*”, yaitu semua tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah, adalah kebijakan publik.

Salah satu definisi mengenai kebijakan publik diberikan oleh Robert Eyestone; yang mengatakan bahwa secara luas kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya (Nawawi, 2009:8). Begitupun menurut Carl Friedrich, kebijakan dipandang sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang dan kelompok atau pemerintahan dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan dan peluang terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan sasaran atau suatu maksud tertentu (Winarno,2012:20). Friedrich menambahkan ketentuannya bahwa kebijakan berhubungan dengan penyelesaian maksud dan tujuan. Meskipun maksud dan tujuan dari kegiatan pemerintah tidak mudah untuk dilihat, tetapi ide

bahwa kebijakan melibatkan perilaku yang mempunyai maksud, merupakan bagian penting dari definisi kebijakan. Kebijakan harus menunjukkan yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam suatu masalah (Agustino, 2008,7).

Kebijakan publik dapat diartikan berbeda-beda oleh sejumlah pakar tergantung pada perspektif yang bersangkutan. Gerston, misalnya menyatakan bahwa kebijakan publik sebagai “...attempts to resolve public issues, questions that most people believe should be decided by officials at the appropriate level of government, national, state or local” (Gerston, 2002;5). Gerston lebih menekankan kepada upaya-upaya yang diputuskan oleh pejabat pemerintahan untuk memecahkan masalah-masalah publik. Sedangkan menurut Kartakasmita dalam Widodo (2007:12), Kebijakan publik merupakan upaya untuk memahami dan mengartikan (1) apa yang dilakukan atau yang tidak dilakukan oleh pemerintah mengenai suatu masalah, (2) apa yang menyebabkan atau yang mempengaruhi, dan (3) apa pengaruh dan dampak dari kebijakan publik tersebut.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah kebijakan yang dibuat oleh suatu lembaga pemerintah, baik pejabat maupun instansi pemerintah yang merupakan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan aparatur pemerintah, sehingga tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam pencapaian tujuan kebijakan demi kepentingan umum. Dengan melihat bahwa kebijakan publik ini berorientasi untuk kepentingan umum, maka pada dasar pemerintah saat pembuatan dan pelaksanaan kebijakan harus memperhatikan kepentingan rakyat.

Definisi kebijakan publik tersebut dapat dikatakan bahwa:

1. kebijakan publik dibuat oleh pemerintah yang berupa tindakan-tindakan pemerintah
2. kebijakan publik harus berorientasi kepada kepentingan publik
3. kebijakan publik adalah tindakan pemilihan alternatif untuk dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah demi kepentingan umum

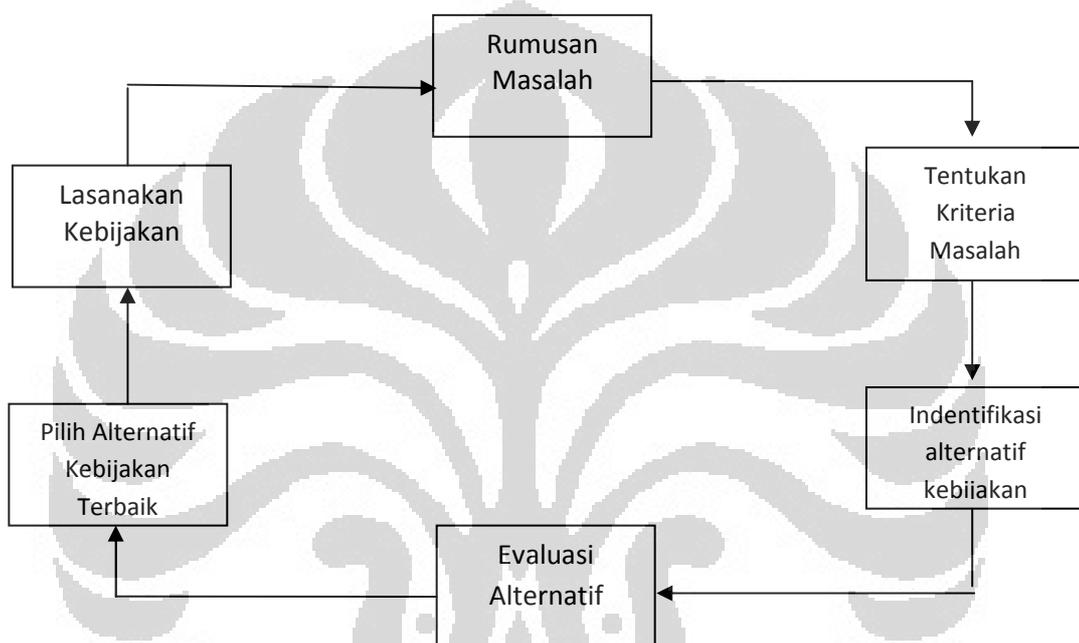
2.2.2 Proses Formulasi Kebijakan

Proses pembuatan kebijakan dan divisualisasikan sebagai serangkaian tahap yang saling tergantung, Proses formulasi kebijakan dapat dilakukan melalui tujuh tahapan sebagai berikut (Mustopadidjaja, 2002):

1. Pengkajian Persoalan. Tujuannya adalah untuk menemukan dan memahami hakekat persoalan dari suatu permasalahan dan kemudian merumuskannya dalam hubungan sebab akibat.
2. Penentuan tujuan. Adalah tahapan untuk menentukan tujuan yang hendak dicapai melalui kebijakan publik yang segera akan diformulasikan.
3. Perumusan Alternatif. Alternatif adalah sejumlah solusi pemecahan masalah yang mungkin diaplikasikan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.
4. Penyusunan Model. Model adalah penyederhanaan dan kenyataan persoalan yang dihadapi yang diwujudkan dalam hubungan kausal. Model dapat dibangun dalam berbagai bentuk, misalnya model skematik, model matematika, model fisik, model simbolik, dan lain-lain.
5. Penentuan kriteria. Analisis kebijakan memerlukan kriteria yang jelas dan konsisten untuk menilai alternatif kebijakan yang ditawarkan. Kriteria yang dapat dipergunakan antara lain kriteria ekonomi, hukum, politik, teknis, administrasi, peranserta masyarakat, dan lain-lain.
6. Penilaian Alternatif. Penilaian alternatif dilakukan dengan menggunakan kriteria dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran lebih jauh mengenai tingkat efektivitas dan kelayakan setiap alternatif dalam pencapaian tujuan.
7. Perumusan Rekomendasi. Rekomendasi disusun berdasarkan hasil penilaian alternatif kebijakan yang diperkirakan akan dapat mencapai tujuan secara optimal dan dengan kemungkinan dampak yang sekecil-kecilnya

Proses perumusan kebijakan publik begitu sulit dan rumit, Carl Patton dan David Saucki membuat model rasional untuk memformulasikan kebijakan publik. Model tersebut adalah model paling klasik yang menjadi acuan dari sebagian besar perumusan kebijakan publik. Modelnya adalah sebagai berikut: (Santoso, 2008:39), dimana di bagi atas 6 tahapan, yaitu:

Gambar 2.1



Gambar 2.1: Model Rasional Kebijakan Publik
Carl Patton dan David Saucki (1993)

Menurut James Anderson dalam Nawawi (2009:15), proses penetapan kebijakan dimulai dari adanya formulasi masalah, disini dilihat apa sebenarnya masalah yang terjadi, sehingga masalah ini menjadi rapat dalam agenda pemerintah. Kemudian formulasi kebijakan, pada tahapan ini adanya pengembangan alternatif-alternatif untuk memecahkan masalah dan menentukan siapa yang berperan dalam formulasi. Berikutnya penentuan kebijakan, dijelaskannya bagaimana alternatif ini ditetapkan, melihat persyaratan apa saja yang harus dipenuhi dana bagaimana prosesnya.

2.2.3 Perencanaan Pembangunan

Perencanaan adalah suatu cara bagaimana mencapai suatu tujuan sebaik-baiknya dengan sumber-sumber yang ada supaya lebih efisien dan efektif. Perencanaan ini untuk menentukan tujuan yang akan dicapai sehingga mengatur akan hal yang dilakukan, bagaimana, bilamana dan oleh siapa (Tjokroamidjojo, 1980:12)

Didukung dengan pendapat Soekartawi (1990: 5), dimana perencanaan melihat aspek sumber daya yang tersedia. Perencanaan disini sebenarnya merupakan suatu proses yang berkesinambungan dari waktu ke waktu dengan melibatkan kebijaksanaan dari pembuat keputusan berdasarkan sumberdaya dan disusun secara sistematis. Suatu perencanaan dibuat berdasarkan tujuan yang jelas karena perencanaan tersebut dipergunakan sebagai arah atau pedoman pelaksanaan pembangunan.

Dalam pelaksanaan pemerintahan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat diperlukan pembangunan. Pembangunan adalah suatu upaya yang dilaksanakan oleh semua pihak terkait dalam mencapai tujuan tertentu. Menurut Tjokroamidjojo, pembangunan adalah upaya pengarahan penggunaan sumber-sumber pembangunan (termasuk sumber-sumber ekonomi untuk mencapai tujuan-tujuan dalam menciptakan suatu kondisi yang lebih baik (1985:25).

Pada dasarnya pembangunan ada tujuh ide pokok. Pertama, Pembangunan merupakan suatu proses. Berarti pembangunan merupakan rangkaian kegiatan yang berlangsung secara berkelanjutan. Kedua, Pembangunan ini adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk ditetapkan sebagai sesuatu untuk dilaksanakan. Ketiga, pembangunan dilakukan secara terencana, baik dalam jangka panjang, jangka sedang dan jangka pendek. Keempat, pembangunan mengandung makna pertumbuhan dan perubahan. Pertumbuhan ini dimaksud dengan meningkatnya kemampuan suatu Negara untuk berkembang dan tidak sekedar mampu mempertahankan kemerdekaan, kedaulatan dan eksistensinya. Perubahan mengandung makna bahwa suatu Negara harus bersifat antisipatif dan proaktif dalam menghadapi tuntutan situasi yang berbeda dari satu jangka waktu ke jangka

waktu lainnya. Kelima, pembangunan mengarah kepada modernisasi. Modernisasi disini diartikan sebagai cara hidup yang baru dan lebih baik dari sebelumnya. Setiap bangsa modern harus dapat mempertahankan jati dirinya yang bersumber dari nilai-nilai yang dipandang luhur oleh Negara. Keenam, pembangunan mencakup seluruh segi kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketujuh, pembangunan sebagai pembinaan bangsa sehingga Negara yang bersangkutan semakin kukuh fondasinya dan semakin mantap keberadaannya sehingga Negara bangsa yang sejajar dengan bangsa lain di dunia (Siagian, 2005:7).

Perencanaan Pembangunan adalah suatu pengarahan penggunaan sumber-sumber pembangunan yang terbatas adanya, untuk mencapai tujuan keadaan sosial ekonomi yang lebih baik secara lebih efisien dan efektif. Perencanaan pembangunan ditujukan untuk pemerataan pembangunan, yaitu meminimalkan kesenjangan yang ada dengan mencapai perkembangan sosial ekonomi yang tetap, stabilitas ekonomi, memperluas lapangan kerja dan mewujudkan kemandirian pembangunan (Tjokroamidjojo: 1985:25).

Didukung dengan pendapat Waterston dalam Tjokroamidjojo (1980:13), bahwa perencanaan pembangunan adalah melihat kedepan dengan mengambil pilihan berbagai alternatif dari kegiatan untuk mencapai tujuan masa depan tersebut sehingga dalam pelaksanaannya tidak menyimpang dari tujuan.

2.2.3.1 Partisipasi masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan

Perumusan Partisipasi masyarakat menurut Tjokroadmidjojo adalah keterlibatan dalam proses penentuan arah dan strategi. Dengan melihat pendapat tersebut menurut Nasution (2009:43) bahwa dapat dilihat partisipasi masyarakat menyakut dalam hal pertisipasi dalam merencanakan program dan partisipasi dalam pembuatan keputusan. Partisipasi dalam tahap ini menyangkut perencanaan program pembangunan apa yang akan dilakukan oleh masyarakat,terkait dengan kebutuhan utama masyarakat. Pada tahap ini masyarakat diminta untuk menyampaikan pendapat,pemikiran dan saran terhadap rencana-rencana program pembangunan.

Didukung dengan pendapat Moebyarto dalam Nasution (2009:44), dalam keadaan yang paling ideal keikutsertaan masyarakat dalam membuat keputusan yang menyangkut nasib mereka, merupakan ukuran tingkat partisipasi rakyat. Semakin besar kemampuan menentukan nasib sendiri maka semakin besar partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Conyers (1994:154) mengutarakan tiga alasan utama mengapa partisipasi masyarakat diperlukan dalam perencanaan pembangunan :

- a. Partisipasi masyarakat merupakan alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek pembangunan akan gagal.
- b. Masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program-program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena masyarakat akan lebih mengetahui seluk beluk proyek dan program tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut. Berbagai pengalaman menunjukkan bahwa bantuan masyarakat setempat sangat sulit diharapkan bila masyarakat tidak diikuti sertakan.
- c. Partisipasi masyarakat merupakan anggapa bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan.

Partisipasi masyarakat yang sudah ada sejak dini, memberikan manfaat dalam menyusun rencana program pembangunan yang akan dilaksanakan di wilayahnya antara lain adalah membantu program agar terhindar dari kesalahan penyusunan rancangan, masyarakat dapat memberikan data dan informasi yang dibutuhkan, agar dapat mengidentifikasi dan mengukuhkan upaya-upaya lokal yang sudah ada. Partisipasi masyarakat ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk turut berinvestasi pada proyek, menjamin kesesuaian antara proyek dengan realitas-realitas sosial yang ada, mengembangkan kemandirian dan mendorong munculnya keterlibatan emosional terhadap proyek pembangunan

yang dihasilkan dan mendukung peningkatan kesadaran masyarakat terhadap situasi dan masalah yang mereka hadapi.

2.2.4 Partisipasi Masyarakat

Ada beberapa pendapat mengenai konsep dari partisipasi, dimana Partisipasi politik menurut Norman dan Sidney Verba dalam (Budiardjo, 1996:184), kegiatan pribadi warga yang legal yang sedikit banyak langsung bertujuan untuk mempengaruhi seleksi pejabat-pejabat Negara dan atau tindakan-tindakan yang diambil oleh mereka. Sedangkan Soetrisno (1995:207) menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat adalah kerjasama antara rakyat dan pemerintah dalam merencanakan, melaksanakan, melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan.

Partisipasi dapat didefinisikan sebagai keterlibatan mental/pikiran dan emosi/perasaan seseorang di dalam situasi kelompok yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan kepada kelompok dalam usaha mencapai tujuan serta turut bertanggung jawab terhadap usaha yang bersangkutan (Davis dalam Sastropetro, 1988:13). Bahwa seseorang yang berpartisipasi sebenarnya mengalami keterlibatan dirinya/egonya yang sifatnya lebih daripada keterlibatan dalam pekerjaan atau tugas saja, yang berarti keterlibatan pikiran dan perasaannya (Allport dalam Sastropetro, 1988:12).

Selain itu, partisipasi masyarakat adalah keterlibatan aktif dari masyarakat pada umumnya, tidak saja dari pengambilan kebijaksanaan tertinggi, para perencana, aparatur pelaksana operasional tetapi juga dari para petani, nelayan, buruh, pedagang kecil, para pengusaha dan anggota masyarakat lainnya (Tjokroamidjojo, 1996: 206). Pemahaman lain disampaikan Cohen dan Uphof dalam Komarudin (1997:320) yang menegaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam membuat keputusan terkandung pengertian membuat beberapa pilihan dari banyak kemungkinan dan menyusun rencana-rencana yang dapat dilaksanakan, dapat atau layak dioperasionalisasikan.

Menurut FAO dalam Mikkelsen (2001:64)

- Partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat kepada proyek tanpa ikut serta dalam pengambilan keputusan.
- Partisipasi adalah pemekaan (membuat peka) pihak masyarakat untuk meningkatkan kemauan menerima dan kemampuan untuk menanggapi proyek-proyek pembangunan.
- Partisipasi adalah suatu proses yang aktif, yang mengandung arti bahwa orang atau kelompok yang terkait, mengambil inisiatif dan menggunakan kebebasannya untuk melakukan hal itu.
- Partisipasi adalah pemantapan dialog antara masyarakat setempat dengan para staf yang melakukan persiapan, pelaksanaan, monitoring proyek, agar supaya memperoleh informasi mengenai konteks lokal, dan dampak-dampak sosial.
- Partisipasi adalah keterlibatan sukarela oleh masyarakat dalam perubahan yang ditentukannya sendiri.
- Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri, kehidupan, dan lingkungan mereka.

Menurut pendapat Kaho dalam Nasution (2009:41), partisipasi masyarakat ini di dasarkan pada pertimbangan, kedaulatan ada ditangan rakyat yang melaksanakannya melalui kegiatan bersama untuk menetapkan tujuan serta masa depan masyarakat itu dan untuk menentukan orang-orang yang akan memegang tampuk pimpinan untuk masa berikutnya.

Dengan melihat definisi dari partisipasi masyarakat, maka disimpulkan bahwa adanya keterlibatan masyarakat dan kerjasama antara rakyat dan pemerintah dalam merencanakan, melaksanakan, dalam suatu kegiatan untuk menyatakan kepentingan masyarakat, dimana menjadikan masyarakat berperan

aktif dalam mengambil inisiatif dengan menggunakan haknya. Partisipasi masyarakat ini merupakan kunci keberhasilan dari pembangunan.

2.2.4.1. Karakteristik Individu yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat

Menurut Durkheim dalam Nasution (2009: 18), dimana karakteristik individu yang mempengaruhi partisipasi masyarakat adalah usia, tingkat pendidikan, pekerjaan, tingkat pendapatan, lama tinggal dan daerah asal. Hal ini dapat dijabarkan :

1. Usia

Perbedaan usia juga mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat. Dalam masyarakat terdapat perbedaan kedudukan dan derajat atas dasar senioritas, sehingga akan memunculkan golongan tua dan golongan muda, yang berbeda-beda dalam hal-hal tertentu. Usia berpengaruh pada keaktifan seseorang untuk berpartisipasi. Dalam hal ini golongan tua yang dianggap lebih berpengalaman atau senior, akan lebih banyak memberikan pendapat dan dalam hal menetapkan keputusan. Temuan ini didukung oleh teori parsons yang dikembangkan oleh Rings dalam Nasution (2009:173) dimana karakteristik usia mempengaruhi tinggi rendahnya tindakan sosial dalam berpartisipasi dalam pembangunan. Dimana usia tua semakin ikut dalam berpartisipasi karena tindakan afektivitas dimana adanya unsur kasih sayang dan memperhatikan masalah yang dihadapi oleh masyarakat.

2. Tingkat Pendidikan

Demikian pula halnya dengan tingkat pengetahuan. salah satu karakteristik partisipan dalam pembangunan partisipatif adalah tingkat pengetahuan masyarakat tentang usaha partisipasi yang diberikan masyarakat dalam pembangunan. Salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat pengetahuan adalah tingkat pendidikan. Semakin tinggi latar

belakang pendidikannya, tentunya mempunyai pengetahuan yang luas tentang pembangunan dan bentuk serta tata cara partisipasi yang dapat diberikan. Faktor pendidikan dianggap penting karena dengan melalui pendidikan yang diperoleh, seseorang lebih mudah berkomunikasi dengan orang luar, dan cepat tanggap terhadap inovasi. Pendidikan ini berkaitan erat dengan partisipasi seseorang dalam proses pembangunan (Nasution, 2009:22)

3. Pekerjaan

Perkerjaan ini akan berkaitan dengan tingkat penghasilan seseorang. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa mata pencaharian dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Hal ini disebabkan karena pekerjaan akan berpengaruh terhadap waktu luang seseorang untuk terlibat dalam pembangunan, misalnya dalam hal menghadiri pertemuan, kerja bakti dan sebagainya. Pola pikir pada masyarakat umum, semakin sibuk seseorang semakin tidak mempunyai waktu berpartisipasi dalam pembangunan. Jenis pekerjaan ini yang dijadikan tolak ukur dari kesibukan adalah satuan waktu yang digunakan melakukan kegiatan kerja.

Menurut Prasodjo dalam Nasution (2009:23), pekerjaan terbagi atas dua bentuk, yaitu pekerjaan penuh, pekerjaan yang dilakukan dengan tujuan memperoleh pendapatan atau keuntungan yang lamanya bekerja paling sedikit satu jam sehari dalam seminggu. Bekerja tidak penuh, adalah pekerjaan yang dilakukan dari 35 jam seminggu. Dengan konsep kerja ini dapat digunakan untuk menganalisis tingkat kesibukan seseorang.

4. Tingkat Penghasilan

Tingkat penghasilan juga mempengaruhi partisipasi masyarakat. Besarnya tingkat penghasilan akan memberi peluang lebih besar bagi masyarakat untuk berpartisipasi. Tingkat penghasilan ini mempengaruhi, dimana semakin tinggi pendapatan maka akan semakin tinggi tingkat

sosial dan bertambah hubungannya sehingga mempunyai pengaruh yang tinggi dalam masyarakatnya (Nasution,2009:23)

5. Lama Tinggal

Lama tinggal ini adalah lamanya setiap individu menetap atau bertempat tinggal di rumahnya sekarang berdasarkan satuan tahun

6. Asal Daerah

Asal daerah adalah tempat tinggal asal seorang individu sebelum menetap di tempat tinggal sekarang.

2.2.4.2 Tingkat Partisipasi Masyarakat

Tingkat pelibatan masyarakat dapat diidentifikasi mulai dari manipulasi sampai dengan kontrol oleh masyarakat sendiri. Partisipasi masyarakat yang dikemukakan oleh Arnstein (1995) terdiri atas tingkatan bahwa terdapat delapan tangga tingkat partisipasi berdasarkan kadar kekuatan masyarakat dalam memberikan pengaruh perencanaan, yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.2.
Tingkat partisipasi masyarakat

No	Tingkat partisipasi	Tingkat pemberi kekuasaan
1	Manipulasi	Tidak ada partisipasi
2	Terapi	Tidak ada partisipasi
3	Pemberitahuan	Tokenisme
4	Konsultasi	Tokenisme
5	Penentraman	Tokenisme
6	Kemitraan	Tingkat kekuasaan masyarakat
7	Pendelegasian	Tingkat kekuasaan masyarakat
8	Kontrol masyarakat	Tingkat kekuasaan masyarakat

Sumber: Arnstein, dalam *African Journal of Economic and Management Studies*, Vol. 3 Iss: 1 pp. 42 – 63, 2012

Dalam konsepnya Arnstein menjelaskan partisipasi masyarakat yang didasarkan kepada kekuatan masyarakat untuk menentukan suatu produk akhir,

tiap tangga dibedakan berdasarkan dalam model ini ada tiga derajat partisipasi masyarakat : (1) Tidak Partisipatif (*Non Participation*); (2) Derajat Semu (*Degrees of Tokenism*) dan kekuatan masyarakat (*Degrees of Citizen Powers*).

Dua tangga terbawah yang dikategorikan dalam derajat Non partisipasi (*Non Participation*) menempatkan bentuk-bentuk partisipasi yang dinamakan Manipulasi (*Manipulation*) dan Terapi (*Therapy*) dalam kedua tangga tersebut partisipasi hanya bertujuan untuk mendidik “menatar” masyarakat. Dalam tangga pertama Manipulasi bisa diartikan (relative) tidak ada komunikasi apalagi dialog sedangkan dalam tangga kedua *Therapy* telah ada komunikasi namun masih bersifat terbatas, inisiatif datang dari pemerintah (pemegang kekuasaan) dan hanya satu arah.

Tangga ketiga, keempat dan kelima dikategorikan dalam derajat tanda partisipasi (*Degree of Tokenism*) yaitu partisipasi masyarakat telah didengar dan berpendapat tetapi mereka tidak memiliki kemampuan untuk mendapatkan jaminan bahwa pandangan mereka akan dipertimbangkan oleh pemegang keputusan, dalam taraf ini partisipasi masyarakat memiliki kemungkinan yang sangat kecil untuk menghasilkan perubahan dalam masyarakat. Dalam tangga ke tiga yaitu *Information* menyiratkan bahwa komunikasi sudah banyak terjadi tetapi masih bersifat satu arah; tidak ada sarana bagi masyarakat untuk melakukan timbal balik (*feed back*), seperti pengumuman, penyebaran pamflet dan laporan tahunan. Tangga ke empat yaitu *Consultation* bermakna bahwa komunikasi telah bersifat dua arah tetapi masih bersifat partisipasi yang ritual/formalitas, sudah ada kegiatan penjangkaran aspirasi, penyelidikan keberadaan masyarakat, telah ada aturan pengajuan proposal dan ada harapan aspirasi masyarakat akan didengarkan tetapi belum ada jaminan aspirasi tersebut akan dilaksanakan misalnya survei sikap, temu warga dan dengar pendapat publik. Tangga ke lima yaitu *Placation* (penentraman) berarti bahwa komunikasi telah berjalan baik dan sudah ada negosiasi antara masyarakat dengan pemerintah dan masyarakat, namun proses pengambilan keputusan masih dipegang oleh pemegang kekuasaan.

Tiga tangga teratas dikategorikan dalam derajat kuasa masyarakat (*Degree of Citizen Power*) dimana masyarakat memiliki pengaruh terhadap proses pengambilan keputusan partisipasi masyarakat (kelompok masyarakat miskin/rentan) sudah masuk dalam ruang penentuan proses, hasil dan dampak kebijakan dengan menjalankan kemitraan (*partnership*) yaitu masyarakat telah mampu bernegosiasi dengan “pemegang kekuasaan” dalam posisi sejajar, pendelegasian kekuasaan (*delegated power*) yaitu masyarakat telah mampu mengarahkan kebijakan karena ruang pengambilan keputusan telah “dikuasai”. Pada tangga kendali warga (*citizen control*) partisipasi masyarakat secara politik maupun administratif sudah mampu mengendalikan proses pembentukan dan pelaksanaan suatu kebijakan.

Konsep delapan tangga partisipasi masyarakat (*Eight Rungs on Ladder of Citizen Participation*) menurut Arnstein:

1. *Manipulation* (manipulasi)

Tingkat partisipasi ini adalah yang paling rendah, yang memposisikan masyarakat hanya dipakai sebagai pihak yang memberikan persetujuan dalam berbagai badan penasehat. Dalam hal ini tidak ada partisipasi masyarakat yang sebenarnya dan tulus, tetapi diselewengkan dan dipakai sebagai alat publikasi dari pihak penguasa.

2. *Therapy*

Dengan berkedok melibatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, para ahli memperlakukan anggota masyarakat seperti proses. Meskipun masyarakat terlibat dalam kegiatan, pada kenyataannya kegiatan tersebut lebih banyak untuk mendapatkan masukan dari masyarakat demi kepentingan pemerintah.

3. *Informing* (informasi)

Memberikan informasi kepada masyarakat tentang hak-hak mereka, tanggungjawab dan berbagai pilihan, dapat menjadi langkah pertama yang sangat penting dalam pelaksanaan partisipasi masyarakat. Meskipun yang sering terjadi adalah pemberian informasi satu arah dari pihak pemegang kekuasaan kepada masyarakat, tanpa adanya kemungkinan untuk memberikan umpan balik atau kekuatan untuk negosiasi dari masyarakat. Dalam situasi saat itu terutama informasi diberikan pada akhir perencanaan, masyarakat hanya memiliki sedikit kesempatan untuk mempengaruhi rencana.

4. *Consultation* (konsultasi)

Mengundang opini masyarakat, setelah memberikan informasi kepada mereka, dapat merupakan langkah penting dalam menuju partisipasi penuh dari masyarakat. Meskipun telah terjadi dialog dua arah, akan tetapi cara ini tingkat keberhasilannya rendah karena tidak adanya jaminan bahwa kepedulian dan ide masyarakat akan diperhatikan. Metode yang sering digunakan adalah survei, pertemuan lingkungan masyarakat, dan dengar pendapat dengan masyarakat.

5. *Placation* (penentruman/perujukan)

Pada tingkat ini masyarakat mulai mempunyai beberapa pengaruh meskipun beberapa hal masih tetap ditentukan oleh pihak yang mempunyai kekuasaan. Dalam pelaksanaannya beberapa anggota masyarakat dianggap mampu dimasukkan sebagai anggota dalam badan-badan kerjasama pengembangan kelompok masyarakat yang anggota-anggotanya wakil dari berbagai instansi pemerintah. Walaupun usulan dari masyarakat diperhatikan sesuai dengan kebutuhannya, namun suara masyarakat seringkali tidak didengar karena kedudukannya relatif rendah atau jumlah mereka terlalu sedikit dibanding anggota dari instansi pemerintah.

6. *Partnership* (kerjasama)

Pada tingkat ini, atas kesepakatan bersama, kekuasaan dalam berbagai hal dibagi antara pihak masyarakat dengan pihak pemegang kekuasaan. Dalam hal ini disepakati bersama untuk saling membagi tanggung jawab dalam perencanaan dan pembuatan keputusan serta pemecahan berbagai masalah. Telah ada kesamaan kepentingan antara pemerintah dan masyarakat.

7. *Delegated Power* (pelimpahan kekuasaan)

Pada tingkat ini masyarakat diberi limpahan kewenangan untuk memberikan keputusan dominan pada rencana atau program tertentu. Untuk memecahkan perbedaan yang muncul, pemilik kekuasaan harus mengadakan tawar-menawar dengan masyarakat dan tidak dapat memberikan tekanan-tekanan dari atas. Jadi masyarakat diberi wewenang untuk membuat keputusan rencana dan rencana tersebut kemudian ditetapkan oleh pemerintah.

8. *Citizen Control* (kontrol masyarakat)

Pada tingkat ini masyarakat memiliki kekuatan untuk mengatur program atau kelembagaan yang berkaitan dengan kepentingan mereka. Mereka mempunyai kewenangan dan dapat mengadakan negosiasi dengan pihak-pihak luar yang hendak melakukan perubahan. Dalam hal ini usaha bersama warga dapat langsung berhubungan dengan sumber-sumber dana untuk mendapat bantuan atau pinjaman tanpa melalui pihak ketiga. Jadi masyarakat memiliki kekuasaan.

Tabel 2.3.
Penjabaran Kriteria Peran dalam
Tingkatan Partisipasi

Tingkat Partisipasi	Jabaran Peran		
	Inisiasi	Pengelolaan	Keputusan
1. Manipulation	Ide awal program dari pemerintah	– Pelibatan masyarakat diselewengkan, hanya untuk kepentingan publikasi	Keputusan di tangan pemerintah
2. Therapy	Ide awal program dari pemerintah	– Masyarakat dilibatkan di banyak kegiatan, namun seolah hanya perintah-perintah atas pengelolaan program	Keputusan di tangan pemerintah
		– Pengelolaan ditangan pemerintah	
3. Informing	Ide awal program dari pemerintah	– Masyarakat diberikan informasi satu arah tentang hak dan tanggungjawab dengan berbagai tanggapan atau usulan	– Masyarakat diberi limpahan kewenangan terkait jawaban atas pertanyaan terkait keputusan yang menyangkut kepentingannya.
		– Sebagian besar pengelolaan ditangan pemerintah	– Keputusan ditangan pemerintah
4. Consultation	Ide awal program dari pemerintah	– Peran masyarakat sebatas memberikan opini	Keputusan ditangan pemerintah
		– Disini masyarakat sudah memberikan masukan atau usulan	
		– Sebagian besar pengelolaan ditangan pemerintah	
5. Placation	Ide awal program dari pemerintah	– Sebagian kecil masyarakat ikut dilibatkan	– Dalam beberapa hal masyarakat ikut terlibat namun keterwakilannya rendah
		– Pelaksana utama oleh pemerintah	– Pemerintah masih sebagai penentu keputusan

Tingkat Partisipasi	Jabaran Peran		
	Inisiasi	Pengelolaan	Keputusan
6. Partnership	– Ide awal program merupakan ide bersama antara pemerintah dan masyarakat	Tanggungjawab dalam pengelolaan meliputi : – Perencanaan – Penyusunan kebijakan – Pemecahan masalah – Pengendalian	– Keputusan bersama – Tidak ada keputusan sepihak
	– Kesepakatan pembagian tanggungjawab		
7. Delegated Power	Ide awal program merupakan ide masyarakat	– Pengelolaan ada pada masyarakat	Ada limpahan kewenangan pemerintah pada masyarakat untuk membuat keputusan
		– Peran pemerintah dalam pemecahan masalah dengan tanpa tekanan/paksaan	
8. Citizen Control	Ide awal program merupakan ide masyarakat	Kebijakan, pengelolaan dan kerjasama berada ditangan masyarakat	Keputusan sepenuhnya berada ditangan masyarakat

Sumber: Data Analysis, Arnstein, dalam *African Journal of Economic and Management Studies*, Vol. 3 Iss: 1 pp. 42 – 63, 2012

Untuk melakukan penilaian tingkat partisipasi (Budiardjo,1996:185-187), Dianggap bahwa dengan tingginya partisipasi menunjukkan warga Negara mengikuti dan memahami masalah politik dan ingin melibatkan diri dalam kegiatan tersebut. Sebaliknya tingkat partisipasi yang rendah pada umumnya di anggap sebagai tanda yang kurang baik karena dapat diartikan bahwa warga Negara tidak menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan. Penilaian bentuk Apatis ada dua bentuk, yaitu : Ada karena kecewa, karena sikap acuh tak acuh, karena tidak tertarik, kurang paham pengetahuan, tidak yakin terhadap pemerintahan. Ada pula karena adanya anggapan bahwa keadaan baik-baik saja atau tidak terlalu buruk. Masyarakat percaya bahwa siapa pun yang akan dipilih tidak akan mengubah keadaan itu, sehingga masyarakat tidak merasa perlu untuk memanfaatkan hak pilihnya. Jadi apatis dalam hal ini tidak mengarah pada suatu rasa kecewa atau frustrasi, tetapi malahan kepuasan dan kepercayaan pada sistem politik yang ada.

2.3. Operasionalisasi konsep

Definisi operasional sendiri adalah proses pemberian definisi operasional atau indikator pada sebuah variabel, sedangkan yang dimaksud operasionalisasi konsep adalah tindakan-tindakan empiris yang dilakukan oleh objek penelitian yang mencerminkan variabel atau konsep yang didefinisikan. Berikut ini Operasional konsep dalam penelitian ini.

Tabel 2.4.
OPERASIONAL KONSEP

Konsep	Variabel	Dimensi	Indikator
Partisipasi Masyarakat dalam Formulasi Kebijakan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Formulasi Kebijakan	Tingkat Partisipasi	Pengelolaan
		1. Manipulation	- Ide awal program dari pemerintah - Pelibatan masyarakat diselewengkan, hanya untuk kepentingan publikasi
		2. Theraphy	- Masyarakat dilibatkan di banyak kegiatan, namun seolah hanya perintah-perintah atas pengelolaan program pemerintah
		3. Informing	- Masyarakat diberikan informasi satu arah tentang hak dan tanggungjawab dengan berbagai tanggapan atau usulan
		4. Consultation	- Disini masyarakat sudah memberikan masukan atau usulan, peran masyarakat sebatas memberikan opini, keputusan di tangan pemerintah
		5. Placation	- Sebagian kecil masyarakat ikut dilibatkan, dalam beberapa hal masyarakat ikut terlibat namun keterwakilannya rendah - Pelaksana utama oleh pemerintah
6. Partnership	- Ide awal program merupakan ide bersama antara pemerintah dan masyarakat - Tanggungjawab dalam pengelolaan merupakan keputusan bersama meliputi : a. Perencanaan b. Penyusunan kebijakan c. Pemecahan masalah d. Pengendalian		

Konsep	Variabel	Dimensi	Indikator	
		7. Delegated Power	- Ada limpahan wewenang pemerintah pada masyarakat untuk membuat keputusan – Pengelolaan ada pada masyarakat	
		8. Citizen Control	- Kebijakan, pengelolaan dan kerjasama berada ditangan masyarakat dan keputusan sepenuhnya di tangan masyarakat	
		Karakteristik Individu		
	yang mempengaruhi Partisipasi Masyarakat dalam Formulasi Kebijakan			1. Usia
				2. Tingkat Pendidikan
				3. Pekerjaan
				4. Tingkat Pendapatan
			5. Lama Tinggal	
			6. Asal Daerah	

BAB 3

METODE PENELITIAN

Metode penelitian tentang partisipasi masyarakat dalam formulasi kebijakan dijelaskan dalam beberapa hal yaitu pendekatan penelitian, jenis-jenis penelitian, penarikan sampel dan populasi, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

3.1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif yaitu menggunakan cara berpikir deduktif yang menunjukkan bahwa pemikiran di dalam penelitian didasarkan pada pola yang umum atau universal kemudian mengarah pada pola yang lebih sempit atau spesifik (Irawan, 2006: 97).

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengamati, mengumpulkan informasi, dan menyajikan analisis hasil penelitian. Dimana dalam peneliti, mengambil topik umum adalah partisipasi masyarakat yang kemudian dispesifikasikan dengan melihat partisipasi masyarakat dalam formulasi kebijakan.

3.2. Jenis-Jenis Penelitian

Jenis penelitian dapat dikelompokkan berdasarkan tujuan, manfaat, dimensi waktu, dan teknik pengumpulan data (Nasutio dan Usman, 2005: 103).

3.2.1. Berdasarkan tujuan penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, penelitian ini merupakan penelitian deskripsi adalah menyajikan gambaran lengkap mengenai setting sosial serta hubungan - hubungan yang terdapat didalam penelitian ini.

Dengan tujuan penelitian ini, penulis memberikan gambaran secara umum tentang partisipasi dan lebih mendetail pada bagian partisipasi dalam formulasi kebijakan. Dengan ini melihat tentang hubungan sosial di masyarakat untuk keterlibatannya dalam proses formulasi kebijakan. Peneliti menggambarkan tentang faktor-faktor yang terkait dalam partisipasi masyarakat pada proses formulasi kebijakan. Selain itu juga menyajikan faktor faktor dan bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam formulasi kebijakan (Studi kasus pada kelurahan Pondok Ranggon)

3.2.2. Berdasarkan manfaatnya,

Penelitian ini merupakan penelitian murni karena memberikan pengetahuan dan pemahaman yang dapat digeneralisasikan untuk berbagai aspek, khususnya dalam partisipasi masyarakat terhadap formulasi kebijakan. Penelitian murni mencakup penelitian-penelitian yang dilakukan dalam kerangka akademis, dan biasanya dilakukan dalam kerangka pengembangan ilmu pengetahuan. Hasil dari penelitian ini akan memberikan dasar bagi ilmu pengetahuan dan pemahaman yang dapat dijadikan sumber, metode, teori dan gagasan yang dapat diaplikasikan pada penelitian selanjutnya.

3.2.3. Berdasarkan dimensi waktu,

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian *cross-section*, karena hanya mengambil satu bagian dari gejala (populasi) pada satu waktu tertentu. Penelitian *cross-section* hanya digunakan pada waktu

tertentu, dan tidak akan dilakukan penelitian lain di waktu yang berbeda untuk diperbandingkan. Oleh karena itu, penelitian yang sama tentang partisipasi masyarakat pada kelurahan Pondok Ronggon dalam proses formulasi kebijakan tidak dilakukan dalam waktu yang berbeda guna untuk diperbandingkan.

3.3 Populasi dan Sampel

Dalam menyebarkan kuesioner untuk mendapatkan informasi, peneliti perlu menentukan responden yang akan menjadi sumber informasi dengan menentukan populasi dan sampel yang akan digunakan. Populasi merupakan semua unit yang menjadi objek penelitian. Sampel adalah bagian dari populasi atau bagian dari karakteristik yang dimiliki oleh populasi yang akan diteliti. (Nasutio dan Usman,2005:103).

Metode pengambilan sample pada penelitian ini adalah probabilitas sampling, dengan tehnik penarikan sample adalah cluster sampling. Umumnya pengambilan terhadap suatu cluster adalah semua element di dalam cluster menjadi sample. (Nasutio dan Usman,2005:107). Dalam penelitian ini *cluster* yang ada di buat berdasarkan masyarakat yang hadir dalam forum yang dibagi atas tiap RW, yaitu pada Kelurahan Pondok Ronggon terdapat enam RW antara lain :

Tabel 3.1
Data tiap RW yang ikut serta dalam forum

No	RW	Jumlah
1	RW 1	22 Orang
2	RW 2	23 Orang
3	RW 3	26 Orang
4	RW 4	19 Orang
5	RW 5	25 Orang
6	RW 6	25 Orang
TOTAL		140

Untuk pengambilan sample yang dicari, dengan melihat jumlah individu yang ikut dalam forum rembug RW dari RW 001 sampai RW 006 sejumlah 140 orang. Maka target pengambilan sampel pada penelitian ini adalah :

$$n = \frac{N}{N(d)^2 + 1} = \frac{140}{140(0,05)^2 + 1} = \frac{140}{1,35} = 103,703 \text{ |104 orang|}$$

n : adalah sample yang di cari

N: adalah besaran populasi

D: adalah presesi (ditentukan besaran 95% atau 0,05)

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui dua cara yaitu (Nasutio dan Usman,2005:103) :

a. Penyebaran Angket (*Questioner*)

Angket merupakan usaha mengumpulkan informasi dengan menyampaikan sejumlah pertanyaan tertulis, untuk dijawab secara tertulis juga oleh responden. Kuesioner yang diberikan akan menggunakan pertanyaan tertutup dengan kategori jawaban yang telah tersedia, sehingga responden diminta untuk memilih satu jawaban dari daftar jawaban yang disediakan. Kuesioner yang diberikan kepada responden terkait adalah untuk mendapatkan data primer. Responden yang diberi kuesioner adalah individu yang mengikuti rangkain dalam pemilihan alternatif kebijakan tingkat RT dan RW dalam Rembug RW, yang telah ditetapkan untuk menjadikan sampel pada penelitian ini.

b. Wawancara

Wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan data primer, dimana wawancara ini sebagai data tambahan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini, sehingga dapat membandingkan hasil dari kenyataan berdasarkan wawancara dengan hasil kuesioner yang berbentuk angka,

c. Studi Kepustakaan.

Jalaludin Rakhmat menyatakan bahwa “studi kepustakaan digunakan untuk memberikan dasar teoritis bagi peneliti, Tujuan tinjauan pustakaan adalah menghubungkan penelitian dengan konteks penelitian yang lebih luas” (Nasution dan Usman, 2005:105). Dalam penelitian ini, studi kepustakaan dan penjelajahan internet dilaksanakan untuk memperoleh data sekunder. Data sekunder diperoleh dan disusun oleh peneliti agar dapat mendukung tujuan literatur yang di dapat dari buku-buku, artikel, jurnal dan juga dari beberapa situs di internet yang menyediakan data-data terbaru yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

3.5 Validitas dan Reabilitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuisisioner. Suatu kuisisioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuisisioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuisisioner tersebut. Pada penelitian ini, mengukur validitas menggunakan Analisis Faktor, yang akan dilihat dari *Anti-Image*. *Anti image* ini terdapat nilai *Measures Of Sampling Adequacy* (MSA), yang menunjukkan valid atau tidaknya data yang di gunakan. Dimana jika nilai MSA di atas 0,5 maka data dapat dinyatakan valid, sehingga dapat digunakan untuk pengujian atau analisis lanjutan. (Furchan dalam Nasution, 2009:81)

Mengukur reabilitas instrument untuk melihat pengukuran konsisten dari waktu ke waktu. Dimana reabilitas mengacu kepada kemampuan instrument untuk menghasilkan data yang sama dari waktu ke waktu (Irawan, 2006: 179). pada penelitian ini mengukur reabilitas dengan memili *scale* dan *reability analysis*. Untuk menguji reabilitas suatu konstruk, diuji dengan uji statistic. *cronbach alpha*, Suatu konstruk dikatakan *realible* jika memberikan nilai *cronbach alpha* > 0.60. (Ghozali 2002:132).

3.6 Teknik Analisis Data

Bahan-bahan yang menjadi objek pada pengolahan data adalah lembar-lembar instrument yang sudah di isi oleh pengumpul data. Selain itu peneliti menggunakan program SPSS (Statistical Package for Sosial Science) melalui tahap-tahap sebagai berikut (Irawan, 2006: 179) :

1. Penataan Data Mentah

Penataan mengacu kepada kegiatan yang dilakukan oleh peneliti untuk mengatur dan mengorganisasikan data mentah yang terkumpul di lapangan. Pada tahapan ini penataan data ini, peneliti sama sekali belum masuk ke segi substansi dari data tersebut, tetapi benar-benar terbatas pada segi fisik dari data-data atau sumber data.

2. Editing (penyuntingan)

Setiap lembar yang sudah di isi setiap penelitian. Jumlah lembaran itu sama dengan jumlah satuan analisis pada sample. Oleh karena itu dalam proses editing semua instrument yang sudah terkumpul harus di hitung dan disesuaikan dengan besarnya sample. Kemudian di teliti apakah seluruh item sudah di jawab secara banar (valid). Lembar-lembar yang tidak di isi lengkap atau ada item yang tidak di isi lengkap atau ada item yang yang

tidak di isi tetapi tidak valid dipisahkan dari yang lainnya untuk sedapat mungkin dapat dibetulkan kembali dengan menghubungi responden.

3. *Coding*

Data *Coding* atau koding data merupakan suatu proses penyusunan data mentah secara sistematis (yang ada dalam bentuk kuesioner-survei kedalam bentuk yang mudah dibaca oleh mesin pengolah data (komputer). Untuk melakukan perlu membuat buku kode (code book) yang berisi mengenai prosedur pengodingan (Nanang,2010 : 128).

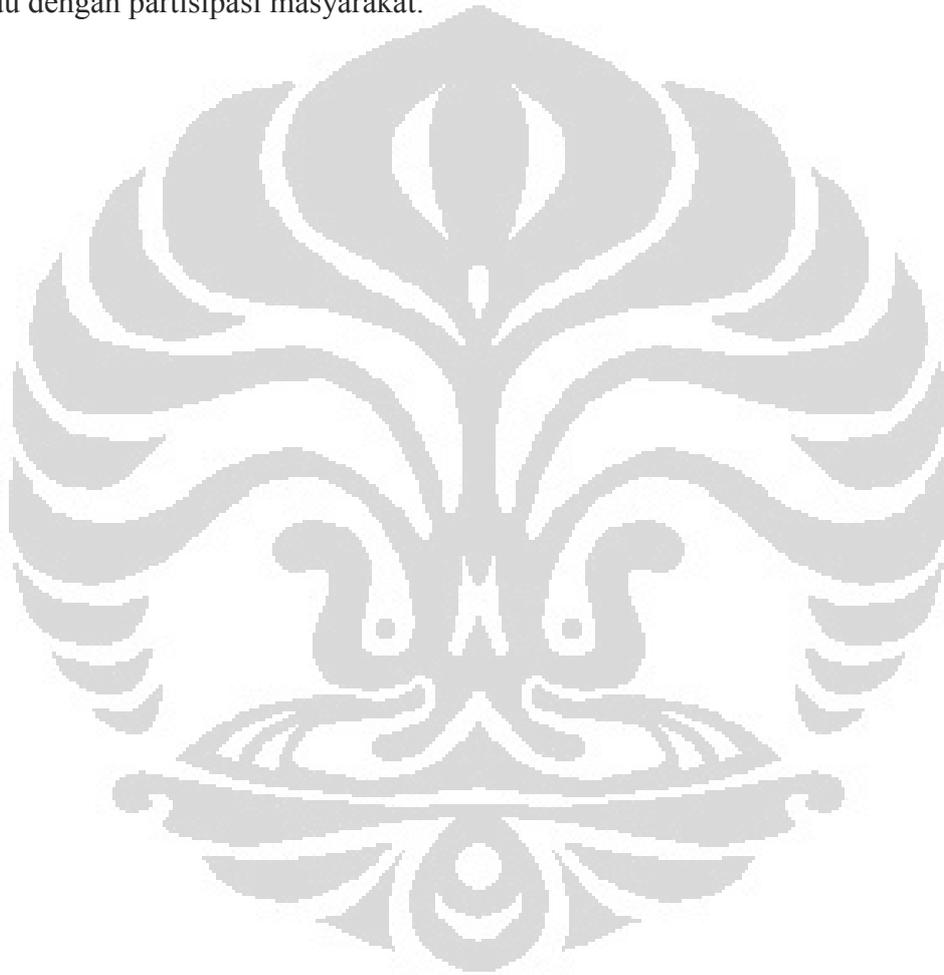
4. *Tabulating atau Classifieng*

Data yang jelas dibaca kemudian di input kedalam komputer lalu ditabulasikan dalam bentuk table tunggal, dijelaskan secara rinci sesuai dengan jenis dan sifatnya.

Skala pengukuran pada penelitian ini, untuk katarogi karakteristik responden menggunakan skala nomina dan Jawaban setiap item instrument yang menggunakan skala Likert mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negative, yang dapat berupa kata-kata untuk keperluan analisis kualitatif, jawaban setiap item diberi skor:

- | | |
|--|----------|
| 1. Sangat setuju/selalu/Sangat positif | (skor 5) |
| 2. Setuju/Sering/positif | (skor 4) |
| 3. Ragu-ragu/Kadang-kadang/negatif | (skor 3) |
| 4. Tidak setuju/Tidak pernah/Negatif | (skor 2) |
| 5. Sangat tidak setuju/Tidak pernah/sangat negatif | (skor 1) |

Kemudian dalam penelitian ini untuk mengetahui hubungan antara karakteristik individu dan tingkat partisipasi masyarakat, dilakukan uji statistic dengan menggunakan tabulasi silang (*crossstab*) dari beberapa variabel yang ada dengan memperhatikan nilai *chi square*. Tabulasi silang hubungan antara karakteristik individu (usia, tingkat pendidikan, pekerjaan, tingkat pendapatan, lama tinggal dan daerah asal) dengan masing-masing dari tingkat partisipasi pada tingkat RT dan RW. Kemudian akan di lihat keterkaitanya dengan karakteristik individu dengan partisipasi masyarakat.



BAB 4

GAMBARAN UMUM DAN ANALISIS GAMBARAN UMUM & ANALISIS PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORMULASI KEBIJAKAN DALAM PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUNAN PADA FORUM REMBUG RW DI KELURAHAN PONDOK RANGGON

4.1. Deskripsi Objek Penelitian

Berikut ini akan dibahas tentang gambaran umum Kelurahan Pondok Ranggon dan Rembug RW.

4.1.1. Kelurahan Pondok Ranggon

Sejarah masuknya wilayah tersebut ke wilayah DKI Jakarta, sekitar tahun 1958 karena adanya sekelompok masyarakat di wilayah RT 003 dan RT 004 yang mengajukan permohonan ke Kabupaten Bogor (Pemda Jawa Barat) supaya wilayah mereka masuk wilayah DKI Jakarta. Adapun sebabnya mereka minta dimasukkan wilayah DKI Jakarta karena Pemerintah DKI Jakarta member pembagian sandang pangan (beras, pakaian dan sebagainya) kepada warganya tetapi Pemda Jawa Barat tidak. Usul mereka dikabulkan dan menjadi warga DKI Jakarta tetapi hanya sampai tahun 1975 yakni dengan kaluarnya SK Gubernur KDKI Jakarta tahun 1975 yang berdasarkan pertimbangan bahwa wilayah RT 003 dan 004 secara administratif dan teknis memang termasuk Pemda Jawa Barat.

Berdasarkan surat keputusan Gubernur Kepala daerah Khusus Ibukota Jakarta No.1227 Tahun 1989 tentang pemecahan dan perubahan batas wilayah Kelurahan di Provinsi DKI Jakarta, luas wilayah kelurahan Pondok Ranggon adalah 366,015 HA, dengan batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kelurahan Cilangkap

Sebelah Timur : Kelurahan Jati Raden (Kali Sunter)

Sebelah Selatan : Kelurahan Harjamukti / Depok

Sebelah Barat : Kelurahan Cilangkap / Kelurahan munjul

Wilayah kelurahan Pondok Ranggong secara Geografis merupakan daratan yang mempunyai nilai strategis karena berbatasan langsung dengan wilayah Jawa Barat dan merupakan jalur perlintasan alternatif dari kawasan Cileungsi, Kranggan, dan Harjamukti menuju Provinsi DKI. Dalam Kelurahan Pondok Ranggong terdapat beberapa spesifikasi dan karakteristik seperti mempunyai areal TPU terbesar di Indonesia, mempunyai tradisi yang masih dipercayai yaitu seni budaya Hajat Bumi dan Kramat Ganceng. Upacara Hajat Bumi tersebut diadakan secara turun temurun dari dahulu sampai sekarang. Hal tersebut tanpa adanya suatu perintah dari kelurahan, tetapi atas dasar kemauan dari masyarakat sendiri dengan biaya swadaya warga. Karena ramainya pengunjung maka dari tahun ke tahun upacara Hajat Bumi tersebut selalu dinanti-nantikan penduduk bagaikan menantikan datangnya hari lebaran. Sampai-sampai yang berjualan di arena bazar tersebut juga berdatangan dari luar daerah Pondok Ranggong dengan harapan jualanannya akan laku habis oleh pengunjung (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Pondok Ranggong, Desember 2011).

Keunikan lainnya yang dimiliki Kelurahan Pondok Ranggong adanya tradisi berbahasa Sunda tetapi berbudaya Betawi. Kelurahan Pondok Ranggong adalah satunya-satunya kelurahan diantara 18 kelurahan yang termasuk kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur yang penduduknya berbahasa Sunda. Hal ini karena wilayah kelurahan Pondok Ranggong letaknya diperbatasan antara wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan kabupaten Bekasi disebelah timur dan kabupaten Bogor disebelah selatan. Nama kampung Pondok Ranggong yang masuk wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta juga disebut "Pondok Ranggong Iir". Sedang yang disebut Pondok Ranggong Udik adalah meliputi kabupaten Bekasi Jawa Barat. Antara Pondok Ranggong wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dibatasi oleh aliran kali Sunter. Selain nama Pondok Ranggong yang termasuk wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta juga ada Pondok Ranggong wilayah Jawa Barat. Pondok Ranggong Jawa Barat tersebut sudah termasuk kelurahan Harjamukti, kecamatan Cimanggis, kabupaten Bogor. Sejak jaman penjajahan Belanda, penjajahan Jepang, jaman kemerdekaan hingga sekarang kelurahan Pondok Ranggong termasuk wilayah DKI Jakarta. Sebelum kemerdekaan RI 17 Agustus 1945 kampung Pondok Ranggong belum disebut kelurahan, karena kepala desanya

belum memakai sebutan “Lurah” tetapi cukup disebut “Mandor” dan baru jaman kemerdekaan RI kampung Pondok Ranggon merupakan kelurahan dan telah beberapa kali berganti lurah. Ditinjau dari areal yang dimiliki penduduk baik sebagai pemukiman maupun areal pertanian, mengalami pengurangan. Hal ini karena pemakaian tanah guna proyek-proyek pemerintah atau berkurang karena wilayahnya dimasukkan wilayah Jawa Barat (www.Jakarta.go.id, 25.03.2012)

Keadaan Penduduk pada kelurahan Pondok Ranggon adalah:

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk (Desember 2011)

Jumlah Penduduk			Jumlah Kepala Keluarga		
Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
12612	11761	24373	5909	827	6739

RW	Jumlah Penduduk			Jumlah Kepala Keluarga		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	2166	2059	4225	1041	135	1176
2	2187	2036	4223	960	129	1089
3	2143	1967	4110	1019	140	1159
4	2198	2132	4330	1171	147	1318
5	1937	1716	3653	756	127	883
6	1981	1851	3832	962	149	1111
	12612	11761	24373	5909	827	6736

Sumber: *Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Pondok Ranggon, Desember 2011*

Berdasarkan Tabel 4.1 yang menggambarkan keadaan jumlah penduduk pada Kelurahan Pondok Ranggon, dimana tergambar bahwa jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin dan kepala keluarga mayoritas adalah penduduk laki-laki. Dilihat dari total jumlah yang berjumlah 24373 penduduk, terlihat bahwa adanya penyebaran yang baik pada setiap RW karena tidak terlihat jumlah penduduk yang terlalu padat atau dominan disuatu RW.

Tabel 4.2
Penduduk Menurut Kelompok Umur

No	Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	0 – 4	1036	885	1921
2	5 – 9	1228	1114	2342
3	10 – 14	1077	1109	2186
4	15 – 19	1115	1091	2206
5	20 – 24	1081	1036	2117
6	25 – 29	1274	1241	2515
7	30 – 34	1238	1214	2452
8	35 – 39	1092	1076	2168
9	40 – 44	1018	918	1936
10	45 – 49	924	776	1700
11	50 – 54	661	561	1222
12	55 – 59	383	287	670
13	60 – 64	233	172	405
14	65 – 69	129	120	249
15	70 – 74	67	94	161
16	75 ke atas	56	67	123
		12612	11761	24373

Sumber: *Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Pondok Ranggon, Desember 2011*

Tabel 4.2 menjelaskan adanya penyebaran penduduk berdasarkan usia dimana dapat dilihat berdasarkan jenis kelamin. Dilihat pada jenis kelamin laki-laki, jumlah terbanyak pada usia penduduk antara 25-29 tahun. Pada jenis kelamin perempuan jumlah terbanyak yaitu masih pada usia 25-29 tahun. Pada usia penduduk di 25-29 tahun ini tidak mayoritas karena jumlah yang penduduk yang digambarkan pada katagori umum terlihat jelas bahwa masyarakat tersebar pada setiap katagori umur yang ada.

Tabel 4.3
Penduduk Menurut Mata Pencaharian

No	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah
1	Pegawai Negri Sipil	1224
2	TNI	883
3	Swasta/ Pengusaha	3854
4	Pensiunan	398
5	Tani	62
6	Buruh	1558
7	Pedagang	2507
8	Lain-lain	12061
9	Pengangguran	1826
		24373

Sumber: *Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Pondok Ronggon, Desember 2011*

Penduduk berdasarkan mata pencaharian, digambarkan pada Tabel 4.3, dimana dijelaskan bahwa mata pencaharian penduduk Kelurahan Pondok Ronggon terdiri dari PNS, TNI, Swasta /Pengusaha, Pensiunan, Tani, Buruh, Pedagang, lain-lain dan pengangguran. Dapat dilihat bahwa jumlah mata pencaharian yang menjawab lain-lain ini adalah mayoritas dimana adanya terdiri dari mahasiswa, ibu rumah dan lain. Pada intinya terlihat jumlah terbanyak dari mata pencaharian masyarakat Kelurahan Pondok Ronggon dapat dilihat yaitu Swasta/pengusaha dan pedagang. Dijelaskan adanya jumlah Pengangguran, hal ini adalah tugas pemerintah Kelurahan Pondok Ronggon untuk dapat berperan memperaktifkan masyarakat dengan mebukanya lapangan pekerjaan.

Tabel 4.4.
Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	TK	2121
2	SD	3857
3	SLTP	7839
4	SLTA	7634
5	AK/PT	1779
6	S.1	860
7	S.2	283

Sumber: *Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Pondok Ronggon, Desember 2011*

Pada Tabel 4.4, menjelaskan tentang penduduk menurut tingkat pendidikan. Terlihat banyak jumlah penduduk pada tingkat TK, SD, SLTP, SLTA ini menggambarkan masih banyaknya katagori umur dari usia dini ke umur remaja yang sedang menempuh jalur pendidikan.

Penduduk asli Pondok Ranggon tidak diketahui secara pasti, penduduk tua yang tinggal di daerah itu umumnya datang dari Jawa Barat, terdiri dari orang Sunda, Bogor dan orang Banten. Kemudian datang orang-orang yang berasal dari Padang dan Sumatra Utara. Dari catatan pendataan penduduk tahun 1979 akhir, jumlah penduduk Pondok Ranggon menunjukkan angka 3.247 jiwa. Sedangkan pada angka statistik penduduk akhir Nopember 1980 jumlah penduduknya meningkat menjadi 3.538 jiwa. Maka kenaikan penduduk dalam prosentase pertahunnya sebesar 9%. Disamping tambahan penduduk dari kelahiran juga karena bertambahnya penduduk dari para pendatang.

4.1.2. Rembug RW

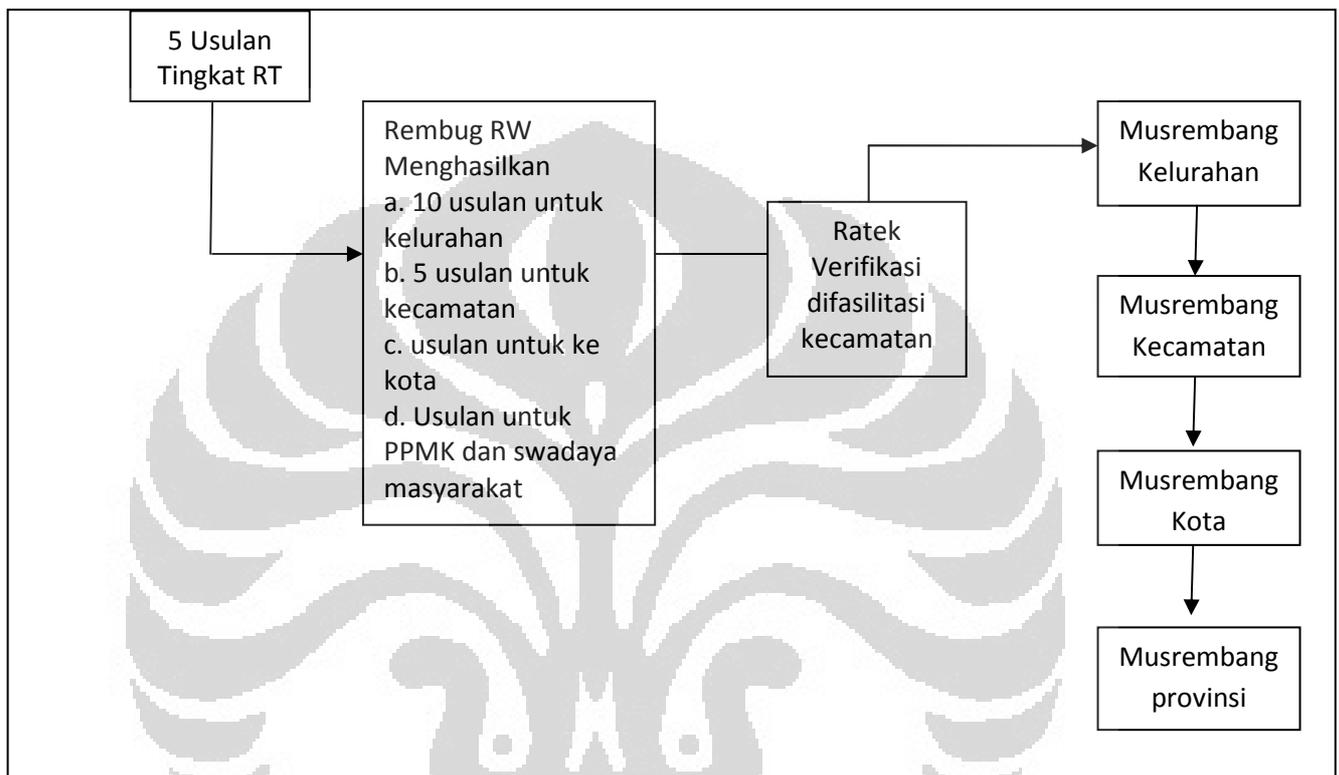
Proses musyawarah RW yang kemudian diajukan kepada musrembang kelurahan merupakan tahap awal dari penyusunan RKPD. Keputusan musrembang kelurahan terputus pada forum di tingkat kelurahan, jadi tidak diintervensi lagi oleh pemerintah di atasnya. Namun untuk kegiatan yang diluar kewenangan pemerintah kelurahan kemudian diajukan usulan pada lintas sektoral .

Rembug RW adalah wadah untuk mengidentifikasi masalah, kebutuhan, menentukan kegiatan untuk menyeleksi masalah berdasarkan skala prioritas yang disepakati bersama. Dengan adanya rembug RW ini maka dapat dikumpulkannya data permasalahan dari aspirasi masyarakat, melihat usulan tahun sebelumnya yang belum terlaksana dengan adanya wadah ini maka akan terkumpulnya data dan informasi sesuai dengan keadaan yang di sekitar masyarakat

Hal-hal yang harus dipersiapkan dalam Rembug RW adalah mengumpulkan permasalahan yang ada dilingkungan RW yang di peroleh dari aspirasi masyarakat dari tiap tingkt RT. Selain itu harus pula menyiapkan kegiatan

yang sudah dilaksanakan di lingkungan RW tahun sebelumnya, usulan kegiatan tahun sebelumnya yang belum terlaksana, menyiapkan data indentifikasi 5 permasalahan tingkat RT.

Gambar 4.1
Mekanisme Rembug RW



Sumber : Kantor Perencanaan Pembangunan
Kota Administrasi Jakarta Timur, 2012

Mekanisme Rembug RW dimulai dari tingkat RT, dimana tiap RT memberikan 5 usulan yang berasal dari masalah dan hal-hal yang dibutuhkan. Setiap RT memberikan penjelasan masalah dan mengeluarkan ide untuk solusi dari usulan dr permasalahan tersebut. Usulan yang dberikanpun digambarkan secara jelas, seperti lokasi dari tempat itu, berapa unit yang dibutuhkan, berapa pendanaan yang dibutuhkan. Indentifikasi 5 usulan dari permasalahan ini pun, di setiap RT harus membuat prioritas dari usulan kegiatan tersebut. Dalam forum ini pun sudah dilibatkannya tokoh masyarakat yaitu pengurus RT, ibu PKK, jumentik, kokoh agama, karang taruna, keamanan dan lain-lain. Pada tahapan ini masyarakat diminta untuk mengusulkan permasalahan yang ada dan kemudian

Universitas Indonesia

mencari solusi yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Malalah yang telah ditentukanpun harus dibuatnya prioritas, menentukan prioritas ini dapat berdasarkan hal yang mendesak untuk pentingan masyarakat.

Usulan dari setiap RT telah di kumpulan, maka dilakukan forum Rembug RW pada setiap RW masing-masing. Forum Rembug RW untuk menetapkan 10 usulan prioritas untuk penguatan tingkat kelurahan, 5 usulan prioritas untuk penguatan tingkat kecamatan, 3 usulan prioritas untuk penguatan tingkat kota dan provinsi. Forum Rembug RW ini adalah wadah untuk masyarakat dapat menentukan prioritas bersama.

Setelah diadakan forum Rembug RW, kemudian diadakannya rapat teknis, rapat teknis ini untuk mengidentifikasi kesesuaian antara usulan kegiatan dengan program, dilakukannya rasionalisasi anggaran kegiatan dan mengidentifikasi kegiatan prioritas pada tingkat kelurahan, kecamatan dan kota.

Setelah adanya pembagian usulan berdasarkan tingkat kelurahan, kecamatan dan kota/provinsi maka kemudian dilaksanakannya musrenbang pada tingkat kelurahan,kecamatan, kota dan provinsi.

Keseluruhan penyelenggaraan musrenbang tahunan yang berjenjang mulai dari tingkat kelurahan sampai dengan tingkat nasional, dimana jadwal Musrenbang Kelurahan dilaksanakan sepanjang bulan Januari, dan paling lambat akhir bulan Januari seluruh desa/kelurahan telah melaksanakannya. Musrenbang Kecamatan dilaksanakan sekitar bulan Februari, dan paling lambat akhir minggu ke-3 bulan Februari seluruh kecamatan sudah selesai melaksanakan musrenbang kecamatan. Musrenbang Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan sepanjang bulan Maret. Musrenbang Provinsi dilaksanakan paling lambat akhir bulan Maret dan Musrenbang Nasional (Musrenbangnas) dilaksanakan pada akhir bulan April (<http://bappeda.muaraenimkab.go.id>, 25.05.2012)

Pada dasarnya adanya kegiatan prioritas kelurahan (Pergub No. 147/2009), dimana terbagi atas 3 prioritas yaitu *pertama*, pemerintah, ketentraman dan

ketertiban, *Kedua*, kebersihan dan lingkungan hidup, dan *Ketiga*, kesehatan masyarakat. Dijelekasn berdasarkan rician ini, yaitu :

1. Pemerintahan, ketentraman dan ketertiban

- a. Penyediaan peralatan penanganan tanggap darurat bencana di tingkat kelurahan yaitu sepatu boot, senter, lampu *emergency*, terpal, tambang/tali, genset portable, masker dan karung pasir.
- b. Pengadaan sarana dan prasarana logistic tanggap darurat bencana di tingkat kelurahan yaitu kompor, tabung gas, panci dan wajan.
- c. Penyediaan bahan makanan pokok untuk penanganan awal tanggap darurat bencana yang mempunyai dampak maksimal 40 kepala keluarga selama masa 1 x 24 jam, dapat berupa beras, mie instan, air minum, telur, ikan asin, tahu, tempe, susu dan makanan bayi.
- d. Penyediaan operasional FKDM Kelurahan dan Pelaksanaan penertiban gubuk liar (Jumlah 10), penjual miras, mengatur lalu lintas, trek-trekan, becak, gelandangan, pengemis, pedagang asongan, pedagang kaki lima.

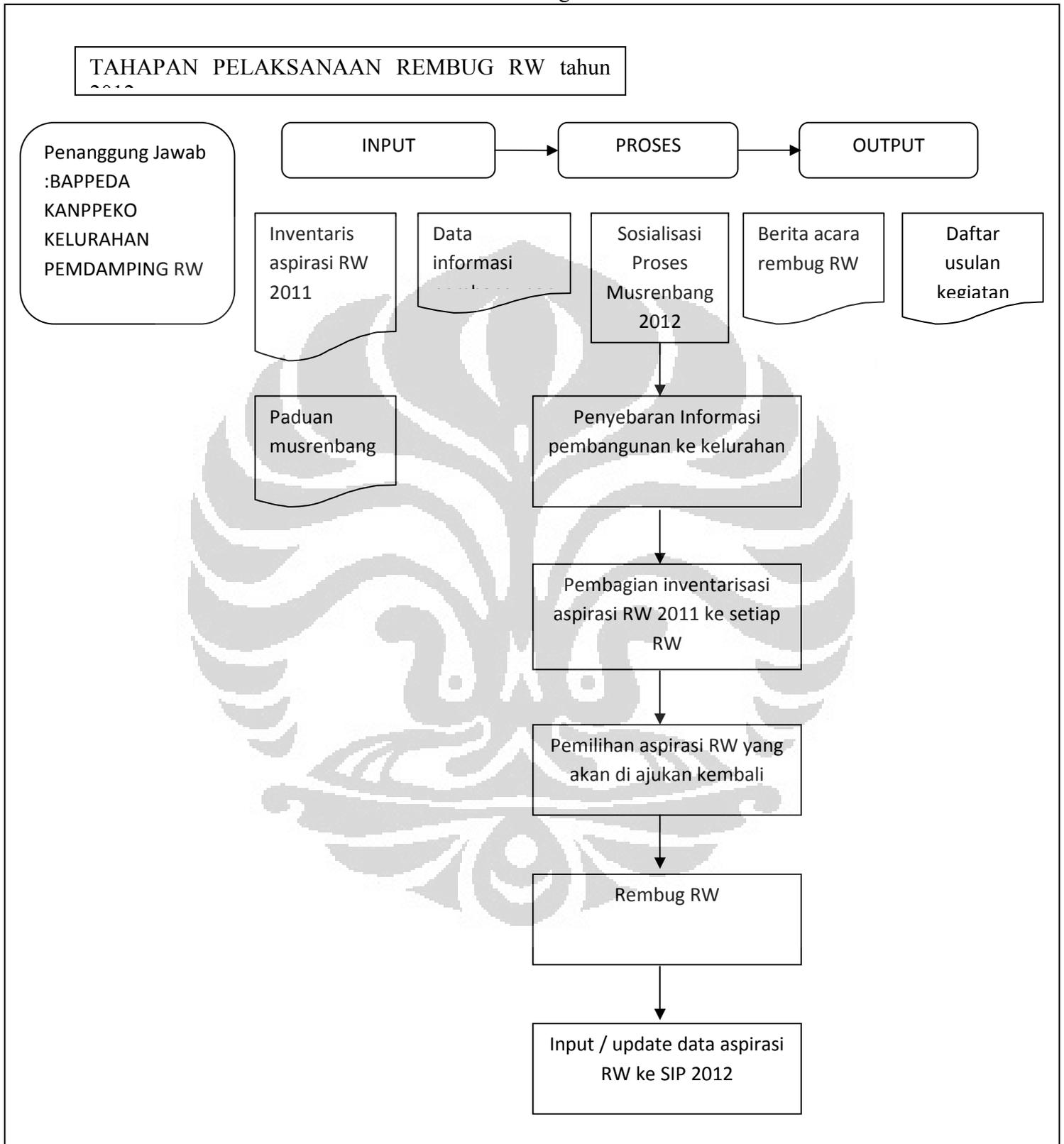
2. Kebersihan dan Lingkungan Hidup

Diadakannya sosialisasi kebersihan rumah tangga, disinilah mendorong masyarakat untuk mengelolah sampah rumah tangga pada lingkungannya masing-masing. Pemerintah pun harus menyediakan kendaraan pengangkut sampah dengan dinas kebersihan dalam pelaksanaan kerja bakti lingkungan. Selain itu pun adanya penyediaan alat penunjang kebersihan dan pengadaan alat kebersihan

3. Kesehatan Masyarakat

Adanya pelaksanaan sosilisasi posyandu, gerakan saying ibu, pola hidup bersih dan sehat, RW siaga. Disinilah pemerintah menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan, selain itu adanya pemerintah harus tetap melakukan perekrutasn dan pelatihan untuk pelaksana. Dalam pelasaan semua harus dalam pemantauan dan evaluasi.

Gambar 4.2
Mekanisme Rembug RW



Sumber : *Buku Panduan Rembug RW, 2012*

Dari gambar tahapan tersebut dapat dijelaskan bahwa penanggungjawab dalam tahapan Rembug Rw adalah kelurahan, pendamping RW, BAPPEDA dan KANPPEKO. Dimana sebelum dilaksanakannya musrenbang (input) ada beberapa hal yang harus dipersiapkan yaitu inventarisasi aspirasi RW pada tahun 2011, panduan Musrenbang, dan data informasi pembangunan 2011. Setelah semua disiapkan maka masuklah pada tahap proses dimana diawali dengan adanya sosialisasi proses Musrenbang 2012, kemudian informasi ini dilakukan pada tingkat kelurahan, diikuti pembagian inventarisasi aspirasi RW 2011 ke setiap RW. Pada tahapan proses dilakukan pemilihan aspirasi RW yang akan diajukan kembali setelah semua disiapkan maka dilakukannya forum Rembug RW yang hasilnya akan di input ke SIP 2012. Pada tahapan proses telah dilaksanakan maka dilanjutkan pada Output dimana adanya berita acara Rembug RW dan daftar usulan kegiatan.

Hal-hal yang harus dilakukan dalam forum Rembug RW adalah persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan, dimana dapat dijelaskan sebagai berikut (*Buku Panduan Rembug RW, 2012*) :

1. Persiapan

- a. Ketua RW membentuk tim penyelenggara rembug, hal ini bertugas untuk :
 - menetapkan jadwal acara penyelenggara rembug RW
 - melakukan peninjauan terhadap permasalahan yang disampaikan oleh RT dan masyarakat
 - menampung permasalahan dan menginventarisir usulan dari masyarakat baik secara lisan maupun tertulis
 - menyiapkan informasi usulan kegiatan yang telah direalisasikan pada tahun sebelumnya yang di biyai APBD
 - merekapitulasi hasil pembahasan musyawarah dalam form yang telah disediakan
 - menyiapkan tempat, alat dan perlengkapan yang dibutuhkan dalam rembug RW
 - mendokumentasikan kegiatan rembug RW

- melaporkan hasil penyelenggaraan rembuk RW kepada kelurahan selanjutnya lurah bertanggung jawab terhadap proses input data kedalam sistem informasi perencanaan yang dilakukan oleh tim pendamping kelurahan
 - mengumumkan hasil rembuk RW di papan pengumuman sekretaris RW
- b. Tim penyelenggara rembuk RW diketuai oleh ketua RW didampingi oleh LMK dengan anggota para pengurus RW dan ketua RT
 - c. Tim penyelenggara rembuk RW mengikuti pembekalan MUSRENBANG yang dilakukan oleh kelurahan
 - d. Mendistribusikan form indentifikasi masalah tingkat RT kepada ketua RT
 - e. Melakukan sosialisasi musrenbang kepada masyarakat tingkat RW dan tim penyelenggara

2. Pelaksanaan

- a. Ketua RW bertindak sebagai pemimpin musyawarah
- b. Tim pendamping rembuk RW ditetapkan oleh lurah yang bertugas untuk memfasilitasi proses musyawarah dan membantu merumuskan usulan-usulan masyarakat (menerjemahkan bahasa usulan masyarakat menjadi nomenklatur kegiatan)
- c. Ketua RW terlebih dahulu mengumumkan kegiatan hasil musrenbang tahun sebelumnya yang akan dilaksanakan pada tahun ini yang dibiayai oleh APB
- d. Membahas usulan yang tidak tertampung pada tahun sebelumnya di wilayahnya untuk menjadi prioritas
- e. Proses pembahasana rembuk RW yang mencakup :
 - Penetapan volume dan satuan dari setiap kegiatan yang diusulkan
 - Menetapkan prioritas terhadap usulan kegiatan dengan kriteria :
 - Merupakan kebutuhan yang mendesak
 - Merupakan kegiatan yang terpadu dalam satu kesatuan

- Bagi wilayah yang termasuk dalam peta rawan bencana dapat mengusulkan kegiatan penanganan darurat bencana dan penyediaan sesuai kemampuan kelurahan
- f. Pembiayaan, pelaksanaan dan pendampingan rembug RW di biayai melalui anggaran penguatan kelurahan

3. Pelaporan

- a. Daftar hadir dan berita acara dan indentifikasi 5 permasalahan tingkat RT
- b. 10 usulan kegiatan untuk kelurahan, 5 uslan untuk kecamatan dan 3 usulan untuk kota dan provinsi
- c. Usulan kegiatan untuk program PPMK, KJK, PEMK, PNPM, CSR dan swadaya masyarakat
- d. Data pendukung dan peta lokasi kegiatan fisik

4.2. Deskriptif Hasil Penelitian

Analisis pada penelitian ini terdiri dari validitas dan reabilitas ,deskripsi responden, analisis tingkat partisipasi masyarakat mulai dari tahapan RT yang kemudian pada tahapan Rembug RW dan analisis hubungan antara karakteristik individu dengan tingkat partisipasi padat tingkat RT dan pada Rembug RW.

4.2.1. Validitas dan Reabilitas

4.2.1.1 Validitas

Validitas ini digunakan untuk menalsh secara cermat dan sistematis kesesuaian instrumen yang disusun, maksudnya untuk mengetahui apakah indicator telah terwakilin atau belum dalam instrument. (Furchan dalam Nasution, 2009:81). Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuisisioner. Suatu kuisisioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuisisioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuisisioner tersebut.

. Pada penelitian ini, mengukur validitas menggunakan Analisi Faktor, yang akan dilihat dari *Anti-Image*. *Anti image* ini terdapat nilai *Measures Of Sampling Adequacy* (MSA), yang menunjukkan valid atau tidaknya data yang di

gunakan. Dimana jika nilai MSA di atas 0,5 maka data dapat dinyatakan valid. (Furchan dalam Nasution, 2009:81)

a. Validitas Pada Tingkat RT

Berdasarkan hasil uji validitas terlihat bahwa *Measures Of Sampling Adequacy* (MSA) di atas 0,5 yaitu $0,768 > 0,5$. Ini menunjukkan data yang digunakan adalah valid, sehingga dapat digunakan untuk pengujian atau analisis lanjutan. (Lampiran 3)

Tabel 4.5.
Anti-image Correlation pada tingkat RT

Keterangan	<i>Anti Image</i>
Bapak/Ibu dalam kegiatan penarikan 5 usulan tingkat RT mendapatkan sosialisasi dan publikasi	0,766
ide awal dalam penarikan 5 usulan tingkat RT tidak hanya berasal dari ide pemerintah	0,800
Bapak/Ibu dalam penentuan 5 usulan tingkat RT tidak hanya sebatas menjalankan program pemerintah	0,795
Bapak/Ibu dalam Penentuan 5 usulan tingkat RT di informasikan hak dan tanggung jawab	0,782
Bapak/Ibu dalam Penentuan 5 usulan tingkat RT dapat memberikan masukan dan usulan berupa opini	0,678
Bapak/Ibu dalam penentuan 5 usulan tingkat RT adanya keterlibatan masyarakat terhadap keputusan pemerintah	0,834
Bapak/Ibu dalam penentuan 5 usulan tingkat RT, ide awal usulan berasal dari ide bersama pemerintah dan masyarakat	0,719
Bapak/Ibu dalam penentuan 5 usulan tingkat RT, pada tahap pengelolaan (Perencanaan, Penyusunan kebijakan, Pemecahan masalah, Pengendalian) merupakan keputusan bersama pemerintah dan masyarakat	0,74
Bapak/Ibu dalam penentuan 5 usulan tingkat RT, ide awal berasal dari masyarakat sepenuhnya	0,69
Bapak/Ibu dalam penentuan 5 usulan tingkat RT, Ada limpahan kewenangan pemerintah pada masyarakat untuk membuat keputusan	0,836

Bapak/Ibu dalam penentuan 5 usulan tingkat RT, pada tahap pengelolaan (Perencanaan , Penyusunan kebijakan, Pemecahan masalah, Pengendalian) merupakan keputusan masyarakat	0,737
Bapak/Ibu dalam penentuan 5 usulan tingkat RT, Kebijakan, Pengelolaan dan Kerja sama adalah keputusan sepenuhnya di tangan masyarakat	0,759

Sumber : *Data diolah oleh penulis*

Berdasarkan hasil uji validitas pada tabel di atas yang menjelaskan table *Anti image*. Dimana *Anti image* ini terdapat nilai *Measures Of Sampling Adequacy* (MSA). Pada setiap rangkaian pertanyaan *Anti-image Correlation* pada tingkat RT, terlihat bahwa setiap poin di atas dari 0,5. Ini menunjukkan data yang digunakan adalah valid, sehingga dapat digunakan untuk pengujian atau analisis lanjutan.

b. Validitas Pada Rembug RW

Berdasarkan hasil uji validitas terlihat bahwa *Measures Of Sampling Adequacy* (MSA) di atas 0,5 yaitu $0,793 > 0,5$. Ini menunjukkan data yang digunakan adalah valid, sehingga dapat digunakan untuk pengujian atau analisis lanjutan. (lampiran 4)

Tabel 4.6.
Anti-image Correlation pada tingkat Rembug RW

Keterangan	<i>Anti Image</i>
Bapak/Ibu dalam kegiatan rembug RW, mendapatkan sosialisasi dan publikasi	0,848
ide awal dalam rembug RW, tidak hanya berasal dari ide pemerintah	0,812
Bapak/Ibu dalam rembug RW, tidak hanya sebatas menjalankan program pemerintah	0,847

Bapak/Ibu dalam rembug RW, di informasikan hak dan tanggung jawab	0,615
Bapak/Ibu dalam rembug RW, memberikan masukan dan usulan berupa opini	0,87
Bapak/Ibu dalam rembug RW, adanya keterlibatan masyarakat terhadap keputusan pemerintah	0,721
Apakah Bapak/Ibu dalam rembug RW, ide awal usulan berasal dari ide bersama pemerintah dan masyarakat	0,849
Bapak/Ibu dalam rembug RW, pada tahap pengelolaan (Perencanaan, Penyusunan kebijakan, Pemecahan masalah, Pengendalian) merupakan keputusan bersama pemerintah dan masyarakat	0,688
Bapak/Ibu dalam rembug RW, ide awal berasal dari masyarakat sepenuhnya	0,818
Bapak/Ibu rembug RW, Ada limpahan kewenangan pemerintah pada masyarakat untuk membuat keputusan	0,736
Bapak/Ibu dalam rembug RW, pada tahap pengelolaan (Perencanaan, Penyusunan kebijakan, Pemecahan masalah, Pengendalian) merupakan keputusan masyarakat	0,718
Bapak/Ibu dalam rembug RW, dalam kebijakan, pengelolaan dan Kerja sama adalah keputusan sepenuhnya di tangan masyarakat	0,798

Sumber : *Data diolah oleh penulis oleh penulis*

Berdasarkan hasil uji validitas pada tabel di atas yang menjelaskan table *Anti image*. Dimana *Anti image* ini terdapat nilai *Measures Of Sampling Adequacy* (MSA). Pada setiap rangkaian pertanyaan *Anti-image Correlation* pada tingkat RT, terlihat bahwa setiap poin di atas dari 0,5. Ini menunjukkan data yang digunakan adalah valid, sehingga dapat digunakan untuk pengujian atau analisis lanjutan.

4.2.1.2. Reabilitas

Reabilitas sebenarnya adalah alat untuk mengukur suatu kuisioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuisioner dikatakan realibel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. (Ghozali 2002:132).

Pada penelitian uji reabilitas menggunakan dengan uji statistik *cronbach alpha*, Suatu data dikatakan *realible* jika memberikan nilai *cronbach alpha* > 0.60.

a. Reabilitas Pada Tingkat RT

Berdasarkan hasil uji reabilitas terlihat bahwa nilai *cronbach alpha* > 0.60, yaitu $0,755 > 0,6$. Ini menunjukkan data yang digunakan adalah realible, sehingga dapat digunakan untuk pengujian atau analisis lanjutan. (Lampiran 3)

b. Reabilitas Pada Rembug RW

Berdasarkan hasil uji reabilitas terlihat bahwa nilai *cronbach alpha* > 0.60, yaitu $0,767 > 0,6$. Ini menunjukkan data yang digunakan adalah realible, sehingga dapat digunakan untuk pengujian atau analisis lanjutan. (Lampiran 4)

4.2.2. Deskripsi Responden

Responden dalam penelitian, mengambil sample berjumlah 104 orang. Dimana mewakili dari adanya tahapan pemilihan alternatif kebijakan pada tingkat RT dan pada tahapan Rembug RW di kelurahan Pondok Ranggon- Jakarta Timur.

Demografi responden dibagi kedalam : 1) Jenis Kelamin, 2) Usia, 3) Pendidikan 4) Pekerjaan, 5) Penghasilan per bulan, 6) Lama tinggal di Pondok Ranggon dan 7) Asal daerah. Masing-masing diuraikan sebagai berikut: (dengan bar chart pada lampiran 5) :

a. Jenis Kelamin

Hasil penghitungan terhadap jenis kelamin responden menunjukkan ada 84 orang responden pria (80.8%) dan 20 orang responden wanita (19.2%). Jumlah responden pria jauh lebih banyak dari pada responnden wanita. Rincian sebaran responden berdasarkan jenis kelamin secara lengkap disajikan pada tabel 4.13.

Tabel 4.7

Sebaran responden berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase
Laki-laki	84	80,8
Perempuan	20	19,2
Total	104	100

Sumber : *Data diolah oleh penulis oleh penulis*

b. Usia

Hasil penghitungan terhadap katagori usia dari responden menunjukkan bahwa lebih dari setengah dari responden berusia antara 37-53 tahun yaitu sebanyak 64 orang (64.4%). Adapun rincian sebaran responden berdasarkan tingkat kelamin secara lengkap disajikan pada tabel 4.14. di bawah ini.

Tabel 4.8

Usia

Usia	Frekuensi	Persentase
kurang dari 36 Tahun	24	23,1
37 - 53 Tahun	67	64,4
54 - 70 Tahun	13	12,5
Total	104	100

Sumber : *Data diolah oleh penulis oleh penulis*

c. Pendidikan

Hasil penghitungan terhadap tingkat pendidikan responden menunjukkan bahwa tingkat pendidikan responden didominasi oleh tingkat pendidikan S-1 yaitu sebanyak 40 responden (38.5%). Adapun rincian sebaran responden berdasarkan tingkat kelamin secara lengkap disajikan pada tabel 4.15. di bawah ini.

Tabel 4.9
Pendidikan

Pendidikan	Frekuensi	Persentase
Sarjana	40	38,5
Sarjana Muda/Diploma	33	31,7
SMA	29	27,9
SMP	2	1,9
Total	104	100

Sumber : *Data diolah oleh penulis oleh penulis*

d. Jenis Pekerjaan

Hasil penghitungan terhadap jenis pekerjaan responden menunjukkan bahwa pekerjaan sebagai pedagang dan wiraswasta mendominasi dengan jumlah responden 69 (66.3%). Adapun rincian sebaran responden berdasarkan masa kerja secara lengkap disajikan pada tabel 4.16 di bawah.

Tabel 4.10
Pekerjaan

Pekerjaan	Frekuensi	Persentase
PNS, TNI, POLRI dan BUMN	32	30.8
Pedagang, Wiraswasta	69	66.3
Lainnya	3	2.9
Total	104	100.0

Sumber : *Data diolah oleh penulis*

e. Penghasilan per Bulan

Hasil penghitungan terhadap penghasilan per bulan responden menunjukkan bahwa penghasilan di atas Rp TS0,000 mendominasi dengan jumlah responden 82 orang (78.8%). Adapun rincian sebaran responden berdasarkan masa kerja secara lengkap disajikan pada tabel 4.17 di bawah

Tabel 4.11

Penghasilan per bulan

Penghasilan	Frekuensi	Persentase
Rp 1,500,000 - Rp TS0,000	9	8.7
Rp 1,500,000 - Rp TS0,000	13	12.5
> Rp TS0,000	82	78.8
Total	104	100.0

Sumber : *Data diolah oleh penulis*

f. Lama Tinggal

Hasil penghitungan terhadap jenis pekerjaan responden menunjukkan bahwa responden yang tinggal antara 17 – 30 tahun hampir mencapai setengah jumlah responden dengan jumlah 49 (47.1%). Adapun rincian sebaran responden berdasarkan masa kerja secara lengkap disajikan pada tabel 4.18 di bawah.

Tabel 4.12

Lama Tinggal

Lama Tinggal	Frekuensi	Persentase
4 – 16 Tahun	23	22,1
17 - 30 Tahun	49	47,1
31 – 44 Tahun	27	26
45 tahun ke atas	5	4,8
Total	104	100

Sumber : *Data diolah oleh penulis*

g. Asal Daerah

Hasil penghitungan terhadap asal daerah responden, menunjukkan bahwa responden yang berasal dari Pondok Ranggon asli, dari Kota Jakarta Timur, Provinsi Jakarta dan luar provinsi Jakarta, proposinya hampir seimbang. Walaupun total terbanyak responden berdasarkan asal daerah adalah Pondok Ranggon Asli, yaitu dengan jumlah 41 (39,4%). Adapun rincian sebaran responden disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 4.13
Asal Daerah

Asal Daerah	Frekuensi	Persentase
Asli Kelurahan Pondok Ranggon	41	39,4
Kota Jakarta Timur	28	26,9
Provinsi Jakarta	14	13,5
Luar Provinsi Jakarta	21	20,2
Total	104	100

Sumber : *Data diolah oleh penulis*

4.2.3. Statistik Deskriptif

Partisipasi di tingkat RT dan RW diukur menggunakan 12 pertanyaan (indikator) dengan menggunakan skala likert 1 – 5. Dengan demikian, skor terendah adalah 12 yaitu ketika responden menjawab sangat tidak setuju (bernilai 1) untuk semua pertanyaan, yang berarti skornya = $12 \times 1 = 12$. Skor tertinggi adalah 60 yaitu ketika responden menjawab sangat setuju (bernilai 5) untuk semua pertanyaan, yang berarti skornya = $12 \times 5 = 60$. Dengan demikian rentang (range) = $60 - 12 = 48$.

Tingkat partisipasi responden akan dikategorikan menjadi kategori rendah, sedang dan tinggi. Untuk keperluan tersebut, maka rentang 48 dibagi menjadi tiga bagian sehingga masing-masing rentang untuk ketiga kategori tersebut = $48 : 3 = 16$. Dengan demikian, skor partisipasi kategori rendah ada di antara 12 dan $(12 + 16 = 28)$ atau $12 - 28$, sedangkan kategori sedang ada di antara skor 28 dan $(28 + 16 = 44)$ atau $28 - 44$ dan kategori tinggi di antara $44 - 60$.

konsepnya Arnstein menjelaskan partisipasi masyarakat yang didasarkan kepada kekuatan masyarakat untuk menentukan suatu produk akhir, tiap tangga dibedakan berdasarkan “*corresponding to the extent of citizen’s power in determining the plan and/or program*”. Secara umum, dalam model ini ada tiga derajat partisipasi masyarakat : (1) Tidak Partisipatif (*Non Participation*); (2) Derajat Semu (*Degrees of Tokenism*) dan kekuatan masyarakat (*Degrees of Citizen Powers*). Dua anak tangga pertama di bagian terbawah, manipulation(1) dan therapy (2) dikategorikan sebagai non partisipasi.

Dua tangga terbawah yang dikategorikan dalam derajat Non partisipasi (*Non Participation*) menempatkan bentuk-bentuk partisipasi yang dinamakan Manipulasi (*Manipulation*) dan Terapi (*Therapy*) dalam kedua tangga tersebut bertujuan yang hendak dicapai dari dua level ini bukanlah untuk melibatkan masyarakat tetapi hanya untuk mendidik atau untuk memberikan pemahaman tentang pekerjaan yang akan dilaksanakan kepada masyarakat tanpa memberi peluang bagi masyarakat untuk terlibat.

Tiga anak tangga berikutnya adalah derajat tokenism, yakni informing (3), dan consultation (4). Masyarakat diberi peluang yang sangat terbatas untuk berpartisipasi dalam proses akan tetapi hasilnya tetap berada di tangan pemegang kekuasaan. Suara atau pendapat masyarakat mungkin saja didengarkan akan tetapi mereka tidak memiliki cukup kekuatan untuk mempengaruhi penguasa dan melawan status quo. Pada level placation (5), masyarakat berada sedikit di atas level placation akan tetapi tetap saja tidak mampu mempengaruhi pengambilan keputusan.

Tiga anak tangga terakhir adalah level tertinggi dalam konsep partisipasi Arnstein. Pada level ini masyarakat memiliki derajat atau pengaruh yang lebih tinggi dalam pengambilan keputusan. Pada level partnership (6), masyarakat memiliki kesempatan melakukan negosiasi dan terlibat secara penuh melalui pemimpin tradisional. Dalam dua level teratas yaitu delegated power (7) dan citizen’s control (8), masyarakat memegang mayoritas pengambilan keputusan dan memiliki kekuatan manerial penuh.

Sesuai dengan hasil analisis statistik deskriptif, maka karakteristik data dalam penelitian dapat diuraikan sebagai berikut:

4.2.3.1 Partisipasi di Tingkat RT

Partisipasi masyarakat pada tahapan tingkat RT merupakan satu rangkaian dengan Rembug RW. Pada Rembug RW ini membahas hasil 5 usulan masyarakat diri tiap RT. Analisis tingkat partisipasi pada penelitian ini menggunakan Teori Arnstein, yang terdiri dari 8 tangga tingkat partisipasi. (Lampiran 6)

Keterangan : STS : Sangat Tidak Setuju
 TS : Tidak Setuju
 R : Ragu-ragu
 S : Setuju
 SS : Sangat Setuju

4.2.3.1.1. Analisis tiap tangga tingkat partisipasi

Analisis ini berdasarkan konsep delapan tangga partisipasi masyarakat (*Eight Rungs on Ladder of Citizen Participation*) menurut Arnstein.

a. Tingkat Manipulasi

Tabel 4.14
 Pernyataan 1 Tingkat RT

Keterangan	Frekuensi	Persentase
STS	0	0
TS	1	1,0
R	12	11,5
S	47	45,2
SS	44	42,3
Total	104	100,0

Sumber : *Data diolah oleh penulis*

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa penilaian responde tentang pernyataan adanya sosialisai dan publikasi ditingkat RT didominasi dengan pilihan setuju bahkan sangat setuju. Persentase untuk total pemilih setuju dan sangat setuju berjumlah 87,5%, ini merupakan persentase yang tinggi.

Tabel 4.15

Pernyataan 2 Tingkat RT

Keterangan	Frekuensi	Persentase
STS	0	0
TS	3	2,9
R	19	18,3
S	62	59,6
SS	20	19,2
Total	104	100,0

Sumber : *Data diolah oleh penulis*

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa penilaian responde tentang penarikan usulan pada tingkat RT tidak hanya sebatas berasal dari ide pemerintah. Hasil dari penilaian responden didominasi dengan pilihan setuju bahkan sangat setuju. Persentase untuk total pemilih setuju dan sangat setuju berjumlah 78,8 %, ini merupakan persentase yang tinggi.

Melihat dari hasil penilaian responden terhadap pertanyaan kuesioner tersebut. Dihubungkan dengan teori tingkat partisipasi Arnstein. Hasil akan mengarahkan bahwa masyarakat tidak dalam ruang tingkat partisipasi di tingkat manipulasi. Manipulation pada tahapan tangga Arnstein adalah tidak terjadi komunikasi atau dialog, sedangkan pada penelitian ini hampir sebagian besar proporsi dari hasil lebih dari 50% yang mengarah setuju dengan masyarakat tidak hanya dijadikan media publikasi dan tidak hanya ide berasal dari pemerintah.

b. Tingkat Terapi

Tabel 4.16

Pernyataan 3 Tingkat RT

Keterangan	Frekuensi	Persentase
STS	0	0
TS	3	2,9
R	15	14,4
S	65	62,5
SS	21	20,2
Total	104	100,0

Sumber : *Data diolah oleh penulis*

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa penilaian responden tentang masyarakat tidak hanya sebatas menjalankan program pemerintah dalam menentukan 5 usulan pada tingkat RT. Dilihat dari hasil dari penilaian responden yang didominasi dengan pilihan setuju bahkan sangat setuju. Persentase untuk total pemilih setuju dan sangat setuju berjumlah 82,7 %, ini merupakan persentase yang tinggi.

Melihat dari hasil penilaian responden terhadap pertanyaan kuesioner tersebut. Dihubungkan dengan teori tingkat partisipasi Arnstein. Hasil akan mengarahkan bahwa masyarakat tidak dalam ruang tingkat partisipasi di tingkat Therapy. Pada tahapan ini mulai timbul komunikasi walau bersifat terbatas, gaya komunikasi bersifat satu arah (pengarahan dari pemerintah) dan inisiatif datang dari pemerintah. Pada penelitian ini hampir sebagian besar proporsi dari hasil lebih dari 50% yang mengarah setuju dengan masyarakat tidak hanya sekedar menjalankan program pemerintah, ini lah sehingga tidak adanya anggapa bila yang terjadi antara masyarakat dan pemrintah bersifat satu arah.

c. Informasi

Tabel 4.17

Pernyataan 4 Tingkat RT

Keterangan	Frekuensi	Persentase
STS	0	0
TS	2	1,9
R	17	16,3
S	57	54,8
SS	28	26,9
Total	104	100,0

Sumber : *Data diolah oleh penulis*

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa penilaian responden tentang informasi hak dan tanggung jawab. Dilihat dari hasil dari penilaian responden yang didominasi dengan pilihan setuju bahkan sangat setuju. Persentase untuk total pemilih setuju dan sangat setuju berjumlah 81,7 %, ini merupakan persentase yang tinggi. Hal ini menggambarkan bahwa masyarakat

dalam menentukan 5 usulan pada tingkat RT diinformasikan tentang hak dan tanggungjawabnya.

Melihat dari hasil penilaian responden terhadap pertanyaan kuesioner tersebut. Dihubungkan dengan teori tingkat partisipasi Arnstein. Hasil akan mengarahkan bahwa masyarakat sudah mulai berada dalam tingkat partisipasi di tingkat Informasi. Pada tahapan informasi adalah tahapan yang telah terjadi peningkatan komunikasi namun, masih bersifat satu arah. Pada penelitian ini hampir sebagian besar proporsi dari hasil lebih dari 50% yang mengarah setuju dengan masyarakat diberikan informasi hak dan tanggungjawab.

d. Konsultasi

Tabel 4.18
Pernyataan 5 Tingkat RT

Keterangan	Frekuensi	Persentase
STS	0	0
TS	2	1,9
R	25	24,0
S	59	56,7
SS	18	17,3
Total	104	100,0

Sumber : *Data diolah oleh penulis*

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa penilaian responden didominasi dengan pilihan setuju bahkan sangat setuju. Persentase untuk total pemilih setuju dan sangat setuju berjumlah 74,0 %, ini merupakan persentase yang tinggi. Hal ini menggambarkan bahwa masyarakat dalam menentukan 5 usulan pada tingkat RT dapat memberikan masukan dan usulan berupa opini.

Melihat dari hasil penilaian responden terhadap pertanyaan kuesioner tersebut. Dihubungkan dengan teori tingkat partisipasi Arnstein. Hasil akan mengarahkan bahwa masyarakat sudah mulai berada dalam tingkat partisipasi di tingkat Konsultasi. Pada tahapan konsultasi adalah tahapan yang telah terjadi peningkatan komunikasi menjadi dua arah, misalnya pada pertemuan publik

seperti publik hearing. Pada penelitian ini hampir sebagian besar proporsi dari hasil lebih dari 50% yang mengarah setuju dengan masyarakat dapat memberikan masukan dan usulan, disini terlihat jelas bahwa sudah adanya komunikasi dua arah antara masyarakat dan pemerintah.

e. Placation

Tabel 4.19
Pernyataan 6 Tingkat RT

Keterangan	Frekuensi	Persentase
STS	0	0
TS	1	1,0
R	30	28,8
S	50	48,1
SS	23	22,1
Total	104	100,0

Sumber : *Data diolah oleh penulis*

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa penilaian responde pada penarikan usulan pada tingkat RT terlihat adanya keterlibatan masyarakat terhadap keputusan pemerintah. Hasil dari penilaian responden didominasi dengan pilihan setuju bahkan sangat setuju. Persentase untuk total pemilih setuju dan sangat setuju berjumlah 70,2 %, ini merupakan persentase yang tinggi.

Melihat dari hasil penilaian responden terhadap pertanyaan kuesioner tersebut. Dihubungkan dengan teori tingkat partisipasi Arnstein. Hasil akan mengarahkan bahwa masyarakat sudah mulai berada dalam tingkat partisipasi di tingkat Placation. Pada tahapan konsultasi adalah tahapan yang telah terjadi komunikasi dan dialog sudah meningkat sampai pada tahap negosiasi. Disini masyarakat telah dilibatkan oleh pemerintah dalam satu badan atau komite bersama, namun kekuasaan untuk memutuskan masih berada ditangan pemerintah yang sifatnya kooptatif. Pada penelitian ini hampir sebagian besar proporsi dari hasil lebih dari 50% yang mengarah setuju dengan masyarakat dapat memberikan masukan dan usulan, disini terlihat jelas bahwa sudah adanya komunikasi dua arah antara masyarakat dan pemerintah dan masyarakat mulai ikut terlibat terhadap keputusan pemerintah.

f. Kemitraan

Tabel 4.20
Pernyataan 7 Tingkat RT

Keterangan	Frekuensi	Persentase
STS	0	0
TS	7	6,7
R	33	31,7
S	47	45,2
SS	17	16,3
Total	104	100,0

Sumber : *Data diolah oleh penulis*

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa penilaian responden tentang penentuan usulan pada tingkat RT masih adanya ide bersama antara pemerintah dan masyarakat. Hal ini terlihat dari hasil penilaian responden didominasi dengan pilihan setuju dan sangat setuju. Persentase untuk total pemilih setuju dan sangat setuju berjumlah 61,5% ini merupakan persentase yang masih mayoritas.

Tabel 4.21
Pernyataan 8 Tingkat RT

Keterangan	Frekuensi	Persentase
STS	0	0
TS	9	8,7
R	38	36,5
S	39	37,5
SS	18	17,3
Total	104	100,0

Sumber : *Data diolah oleh penulis*

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa penilaian responden pada pilihan setuju dan sangat setuju berjumlah 54,8%. Hasil penilaian ini menggambarkan bahwa hanya hampir setengahnya saja yang mengaggap bahwa dalam penentuan usulan pada tingkat RT pada tahapan pengelolaan yang terdiri dari adanya perencanaan, penyusunan kebijakan, pemecahan masalah, dan pengendalian ini merupakan keputusan bersama pemerintah dan masyarakat. Penilaian ini menjelaskan pula tentang keraguan dari masyarakat tentang tahapan

pengelolaan ini merupakan keputusan bersama, hal ini dilihat dari penilaian keraguan masyarakat berjumlah 36,5 %.

Melihat dari hasil penilaian responden pada tabel 4.27 dan 4.26, terhadap pertanyaan kuesioner tersebut. Dihubungkan dengan teori tingkat partisipasi Arnstein. Hasil akan mengarahkan bahwa masyarakat sudah mulai berada dalam tingkat partisipasi di tingkat kemitraan. Pada tahapan kemitraan pada tahap ini masyarakat dan pemerintah menjadi mitra sejajar. Pada penelitian persentase yang memilih setuju dengan ide awal usulan berasal dari ide bersama pemerintah dan masyarakat adalah 61,5% dan pada tahap pengelolaan merupakan keputusan bersama pemerintah dan masyarakat berjumlah 54,8%. Dilihat dari hasil penilaian responden sudah ada sebagian responde yang menganggap adanya hubungan yang terjalin antara masyarakat dan pemerintah tapi sangat disayangkan masih ada sebagian responden yang merasakan keraguan dan ini keraguan ini dianggap mengarah ke hal negative yang lebih condong ke tidak setuju.

g. Pendelegasian

Tabel 4.22
Pernyataan 9 Tingkat RT

Keterangan	Frekuensi	Persentase
STS	1	1,0
TS	18	17,3
R	29	27,9
S	44	42,3
SS	12	11,5
Total	104	100,0

Sumber : *Data diolah oleh penulis*

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa penilaian responden pada pilihan setuju dan sangat setuju berjumlah 53,8%. Hasil penilaian ini menggambarkan bahwa hanya hampir setengahnya saja yang menganggap bahwa dalam penentuan usulan pada tingkat RT berasal dari ide masyarakat sepenuhnya. Penilaian ini menjelaskan pula tentang keraguan dari responden tentang ide sepenuhnya dari masyarakat hal ini dilihat dari penilaian keraguan responden berjumlah 27,9 % dan bahkan sudah mulai adanya penilaian responden yang

Universitas Indonesia

tidak setuju bahwa ide ini sepenuhnya berasal dari masyarakat sepenuhnya yaitu dari penilaian tidak setuju dan sangat tidak setuju berjumlah 18,3%.

Tabel 4.23
Pernyataan 10 Tingkat RT

Keterangan	Frekuensi	Persentase
STS	6	5,8
TS	31	29,8
R	35	33,7
S	31	29,8
SS	1	1,0
Total	104	100,0

Sumber : *Data diolah oleh penulis*

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa penilaian responden pada pilihan setuju dan sangat setuju berjumlah 30,8%. Hasil ini menggambarkan bahwa hanya sedikit penilaian dari responden tentang adanya pelimpahan kewenangan pemerintah kepada masyarakat untuk membuat suatu keputusan. Penilaian responden menjelaskan cukup banyak responden yang memilih sangat tidak setuju dan tidak setuju yaitu berjumlah 35,6 %. Bahkan penilaian tidak setuju dan sangat tidak setuju lebih tinggi penilaiannya dari pada setuju dan sangat setuju.

Tabel 4.24
Pernyataan 11 Tingkat RT

Keterangan	Frekuensi	Persentase
STS	4	3,8
TS	51	49,0
R	37	35,6
S	11	10,6
SS	1	1,0
Total	104	100,0

Sumber : *Data diolah oleh penulis*

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa penilaian responden pada pilihan tidak setuju dan sangat tidak setuju berjumlah 52,8 %. Hasil ini menggambarkan bahwa responden yang tidak setuju bahkan sangat tidak setuju mendominasi hasil penilaian yaitu sebagian responden tidak menganggap bahwa

pada tahapan pengelolaan merupakan keputusan masyarakat. Didukung dengan penilai responden yang setuju dan sangat setuju berjumlah hanya sedikit yaitu 11,6%, jadi penilaian responden tidak mengarah pada tahapan pengelolaan ini merupakan keputusan masyarakat.

Melihat dari hasil penilaian responden pada tabel 4.28, 4.29 dan 4.30, terhadap pertanyaan kuesioner tersebut. Dihubungkan dengan teori tingkat partisipasi Arnstein. Hasil dari penilaian sudah mulai adanya masyarakat untuk mengarahkan pada tingkat pendelegasian tapi tingkat mengarahnya untuk mencapai tahap ini masih lemah. Hal ini dapat dijelaskan dari ide awal berasal dari masyarakat sepenuhnya responden yang setuju hanya sebagian saja yaitu 53,8%. Tentang ada limpahan kewenangan pemerintah pada masyarakat untuk membuat keputusan, banyak penilaian responden yang masih tidak setuju bahkan yang tidak setuju lebih banyak dari yang setuju. Pada tahap pengelolaan merupakan keputusan masyarakat, banyak responden yang tidak setuju tentang hal ini. Dengan gambaran penilaian responden ini, maka dapat diutarakan bahwa masyarakat belum pada tahap pendelegasian ini.

h. Kontrol Masyarakat

Tabel 4.25
Pernyataan 12 Tingkat RT

Keterangan	Frekuensi	Persentase
STS	17	16,3
TS	41	39,4
R	29	27,9
S	16	15,4
SS	1	1,0
Total	104	100,0

Sumber : *Data diolah oleh penulis*

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa penilaian responden pada pilihan tidak setuju dan sangat tidak setuju berjumlah 55,7 %. Hasil ini menggambarkan bahwa responden yang tidak setuju bahkan sangat tidak setuju mendominasi hasil penilaian yaitu sebagian responden tidak menganggap bahwa pada tahapan kebijakan, pengelolaan dan kerja sama merupakan keputusan

Universitas Indonesia

masyarakat. Didukung dengan penilai responden yang setuju dan sangat setuju berjumlah hanya sedikit yaitu 16,4%, jadi penilaian responden tidak mengarah pada tahapan kebijakan, pengelolaan dan kerja sama ini merupakan keputusan masyarakat sepenuhnya.

Melihat dari hasil penilaian responden pada tabel 4.31, terhadap pertanyaan kuesioner tersebut. Dihubungkan dengan teori tingkat partisipasi Arnstein. Hasil dari penilaian masyarakat tidak dalam tahapan tingkat skontrol masyarakat. Hal ini didukung dengan penilai responden yang setuju dan sangat setuju berjumlah hanya sedikit yaitu 16,4%, dan responden yang tidak setuju 55,7%. Dapat disimpulkan bahwa masyarakat pada tahap ini masyarakat belum memiliki kekuasaan atas kebijakan publik, baik dalam perumusan, implementasi hingga evaluasi

4.2.3.1.2. Analisis Tingkat partisipasi dalam pemilihan alternatif tingkat RT

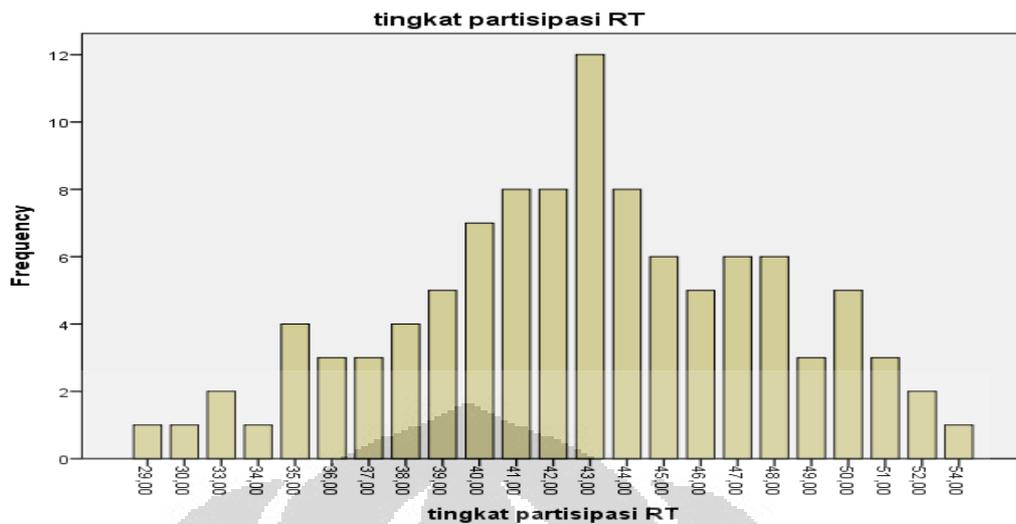
Tabel 4.26
Tingkat Partisipasi RT

Keterangan	tingkat partisipasi RT
Mean	42,8365
Median	4R00
Mode	4R
Minimum	29,00
Maximum	5S

Sumber : *Data Olahan*

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa untuk data partisipasi responden di tingkat RT diperoleh skor terendah 29 dan skor tertinggi 54. Dengan demikian, rentangan skor yang muncul adalah sebesar 25, yaitu dari skor 32 sampai dengan skor 49. Untuk lebih jelasnya hasil deskriptif statistik adalah sebagai berikut: (a) skor rata-rata (*Mean*) adalah 42.8365; (b) median (*Me*) atau nilai tengah skor adalah 4R.

Gambar 4.3



Gambar histogram di atas menginformasikan bahwa distribusi skor data yang diperoleh cenderung menyebar. Gambaran ini terlihat dari histogramnya yang cenderung memiliki angka tengah yang lebih tinggi.

Tabel 4.27

Tingkat Partisipasi RT

Keterangan	Frekuensi	Persentase
Sedang	67	64,4
Tinggi	37	35,6
Total	104	100,0

Sumber : *Data diolah oleh penulis*

Tingkat partisipasi berdasarkan penelitian pada pemilihan penentuan 5 usulan tingkat RT , dapat dilihat mayoritas individu berada dalam tingkat “Sedang” 67 orang berada pada tingkatan ini dan 37 orang berada dalam tingkatan tinggi. Dilihat dari teori arstein dimana dibagi atas 3 katagori yaitu (1) tidak adanya partisipasi, (2) adanya pembagian partisipasi masyarakat dan pemerintah, (3) keputusan berada di tangan masyarakat sepenuhnya. Dilihat dari pembagiannya seperti :

Tabel 4.28
Tingkat Partisipasi Teori Arnstein

No	Tingkat partisipasi	Tingkat pemberi kekuasaan
1	Manipulasi	Tidak ada partisipasi
2	Terapi	Tidak ada partisipasi
3	Pemberitahuan	Tokenisme
4	Konsultasi	Tokenisme
5	Penentruman	Tokenisme
6	Kemitraan	Tingkat kekuasaan masyarakat
7	Pendelegasian	Tingkat kekuasaan masyarakat
8	Kontrol masyarakat	Tingkat kekuasaan masyarakat

Sumber : Arnstein, dalam African Journal of Economic and Management Studies, 2012

Hasil penelitian, mayoritas berada dalam tahapan sedang, dan tahapan sedang itu range di mulai dari hitungan 28-44. Tingkat partisipasi untuk tingkat sedang dibagi 3 bagian, maka $44 - 28 = 22 / 3 = 5,33$. Jadi range menjadi:

- pemberitahuan : 28 – 33,33
- konsultasi : 33,34 – 38,37
- Palcation : 38,38 – 44

melihat dari hasil dimana (mean) rata-rata pada tingkat yang rendah berada dalam tahapan 42.8365 maka pada tingkat pemilihan alternatif ini berada dalam dalam tahapan palcation

Kategori pada tangga ketiga hingga lima ini disebut tingkat tokenisme. Tokenisme yaitu suatu tingkatan peran serta di mana masyarakat didengar dan diperkenankan berpendapat, tetapi mereka tidak memiliki kemampuan untuk mendapatkan jaminan bahwa pandangan mereka akan dipertimbangkan oleh pemegang keputusan. partisipasi masyarakat untuk tangga ini adanya usulan ini sudah didengar. Masyarakat juga telah berpendapat. Tapi, tidak ada jaminan bahwa pendapat dan pengetahuan masyarakat ini dapat diterima pengambil

keputusan.

Dilihat dari penelitian ini maka,tingkat partisipasi pada pemilihan alternatif RT, masyarakat masuk dalam katagori sedang dimana pada tahapan ini sudah adanya pembagian antara masyarakat dan pemerintah. Jadi pada tahapan ini masyarakat sudah dapat memberi pengaruh, meskipun keputusan masih berada dalam tangan pemerintah.

forum musyawarah warga di tingkat RT merupakan wadah untuk melakukan jajak kebutuhan (*need assessment*) bagi penyiapan usulan kegiatan pembangunan tahunan di tingkat desa/kelurahan. Kegiatan ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan kegiatan Rembug RW. Forum ini bertujuan untuk mendorong partisipasi masyarakat pada tingkat paling bawah (*grass root*) dalam rangka memperkuat kapasitas dan kemandirian masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.Masyarakat pada tahapan ini menghimpun dan melakukan identifikasi permasalahan serta menetapkan 5 daftar usulan prioritas pembangunan yang akan menjadi bahan masukan lebih lanjut pada Rembug RW (<http://bappeda.muaraenimkab.go.id>, 25.05.2012)

Hasil dari wawancara salah satu RT pada kelurahan Pondok Ranggon, menjelaskan bahwa mekanisme perencanaan pembangunan tahunan dimulai dari tingkat RT.

“Tiap RT memberikan 5 usulan. Pelaksanaan penarikan 5 usulan tingkat RT sudah dimulai pada awal januari. Pelaksanaan pada tingkat RT ini, diawali dengan adanya informasi sosialisasi dari tingkat kelurahan. Tingkat RT diberikan form usulan yang harus diisi berdasarkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Setelah adanya informasi dari kelurahan maka ketua RT meneruskan sosialisasi dan menyebarkan informasi dengan mengundang bagian dari masyarakat diantaranya Pengurus RT, bagian keamanan, ibu-ibu PKK, ibu-ibu Jumantik, tokoh agama, karang tarunan dan lain-lain”. (Hasil wawancara salah satu ketua RT pada RW 03, 12 05 2012)

. hasil wawancara m, menjelaskan bahwa adanya sosialis, dimana penyebaran informasi akan diadakannya Musrenbang Kelurahan,maka dengan harus sudah menyiapkan usulan mulai dari tingkat RT. Saat adanya sosialisasi

pada tiap RT, maka kelurahan memberikan form indentifikasi masalah kepada ketua RT.

Penarikan 5 usulan pada tingkat RT ini, merupakan rangkaian dari Musrenbang yang akan dilanjutkan ke tingkat RW, kelurahan, kecamatan, Kota dan provinsi. Musrenbang ini telah diatur dalam UU no.25 tahun 2004, tentang Perencanaan Pembangunan Nasional memerlukan koordinasi antara instansi pemerintah dan pelaku pembangunan, melalui forum yang disebut Musyawarah Perencanaan Pembangunan. Hal ini menjelaskan bahwa masyarakat mengikuti aturan dan program pemerintah dengan ikut serta dalam menjalankan musyawarah perencanaan pembangunan, tetapi dalam menentukan 5 usulan tingkat Rt tidak hanya sebatas menjalankan program pemerintah. Pada forum penarikan 5 usulan tingkat RT ini masyarakat mengutarakan masukan yang dibutuhkan oleh wilayahnya dan masyarakat. Usulan ini berdasarkan atas kepentingan bersama dan prioritas, masyarakat tingkat RT membicarakan mana hal yang lebih prioritas dengan melihat hal yang sudah mendesak.

Pelaksanaan musyawarah ini, melihatkan kegiatan masyarakat yang dapat mengeluarkan aspirasi mulai dari tingkat terkecil. Seperti yang di utarakan oleh salah satu pemuda karang tarunan pada Kelurahan Pondok Raggon, dimana kegiatan yang merangkul berbagai aspirasi masyarakat ini dapat dilihat dari adanya peretemuan yang dibuat oleh ketua RT untuk mengundang tokoh masyarakat untuk membicarakan usulan yang akan diajukan pada tingkat RW. Usulan ini akan dibicarakan pada Rembug RW, sehingga dalam menetapkan usulan masyarakat pun menentukan secara berhati-hati agar tidak adanya kebutuhan yang terlupakan dan dapat merangkul aspirasi dari masyarakat. (Kesimpulan berdasarkan wawancara pemuda karang taruna RW03, 21 mei 2012)

Melihat formulasi kebijakan pada tingkt RT dalam menarik 5 usulan untuk diajukan ke tingkat RW, dihubungkan dengan teori formulasi kebijakan Model Rasional kebijakan publik, yaitu :

- a. Rumusan Masalah, pada tahapan ini masyarakat sebelum mengusulan usulan yang diajukan pada tingkat RW. Masyarakat melihat masalah yang

ada pada RT setempat, dengan ini masyarakat mengidentifikasi penyebab dari masalah tersebut. Dengan adanya rumusan masalah ini, maka masyarakat setempat akan dapat menentukan solusi dari permasalahan yang ada.

- b. Tentukan Kriteria Masalah, pada tahapan ini setelah masyarakat menginformasikan permasalahan yang ada, kemudian permasalahan tersebut dikelompokkan berdasarkan tingkat prioritas masalah. Jadi adanya pembagian yang mana masalah ini memang untuk kepentingan orang banyak atau hanya kepentingan sebagian masyarakat
- c. Tahapan indentifikasi alternatif, evaluasi alternatif, dan pilih alternatif kebijakan. Masyarakat pada tahapan ini telah menentukan masalah mana yang penting dan prioritas berdasarkan kebutuhan masyarakat. Kemudian dengan melihat masalah tersebut, masyarakat pun menyiapkan solusi dari dari permasalahan tersebut. Dimana dalam solusi ini pun dijelaskan secara rinci seperti apa solusi tersebut, ada berapa jumlahnya dan bagaimana sumber pendanaannya.
- d. Laksanakan kebijakan, dimana pada tahapan ini masyarakat mengajukan 5 usulan kepada tingkat RW yang akan dibicarakan dan dibahas dalam forum Rembug RW untuk menentukan usulan yang akan disetujui.

Dalam pelaksanaan pengumpulan usulan pada tingkat RT. Adanya permasalahan yang dihadapi seperti yang diutarakan oleh ketua RT 012 selaku pemimpin rapat pada forum tingkat RT, yaitu :

“Permasalahan pada penarikan dalam penentuan 5 usulan tingkat RT adalah banyak nya berbagai perwakilan masyarakat ada tokoh agama, tokoh pemuda, ibu-ibu PKK, ibu-ibu Jumantik dan kesehatan, keamanan dan lain-lain. Disinilah timbul kesulitan dalam menentukan 5 usulan, karena pada dasarnya setiap masyarakat memiliki usulan dari permasalahan yang ada. Selain itu, dalam menentukan anggaran harus benar-benar hitung secara detail”.

Permasalahan diatas maka seharusnya Ketua RT harus benar-benar dapat berperan secara netral dan melihat permasalahan yang memang suatu permasalahan bersama yang ada diwilayah tersebut. Selain itu, dalam menentukan anggaran dan

pendanaan harus dihitung secara detail sehingga dalam pengajuan dananya dapat sesuai.

4.2.3.2 Partisipasi di Tingkat RW

Partisipasi masyarakat pada tahapan tingkat RW merupakan dinamakan dengan sebutan dengan Rembug RW. Pada Rembug RW ini membahas hasil 5 usulan masyarakat diri tiap RT. Analisis tingkat partisipasi pada penelitian ini menggunakan Teori Arnstein, yang terdiri dari 8 tangga tingkat partisipasi.

4.2.3.2.1. Analisis tiap tangga tingkat partisipasi

a. Tingkat Manipulasi

Tabel 4.29
Pernyataan 1 Rembug RW

Keterangan	Frekuensi	Persentase
STS	0	0,0
SS	0	0,0
R	11	10,6
S	56	53,8
SS	37	35,6
Total	104	100,0

Sumber : *Data diolah oleh penulis*

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa penilaian responde tentang adanya sosialisasai dan publikasi pada kegiatan Rembug RW di didominasi dengan pilihan setuju bahkan sangat setuju. Persentase untuk total pemilih setuju dan sangat setuju berjumlah 89,4%, ini merupakan persentase yang tinggi.

Melihat dari hasil penilaian responden terhadap pertanyaan kuesioner tersebut. Dihubungkan dengan teori tingkat partisipasi Arnstein. Hasil akan mengarahkan bahwa masyarakat tidak dalam ruang tingkat partisipasi di tingkat manipulasi. Manipulasi pada tahapan tangga Arnstein adalah tidak terjadi komunikasi atau dialog, sedangkan pada penelitian ini hampir sebagian besar proporsi dari hasil lebih dari 50% yang mengarah setuju dengan masyarakat tidak hanya dijadikan media publikasi dan tidak hanya ide berasal dari pemerintah.

Tabel 4.30

Pernyataan 2 Rembug RW

Keterangan	Frekuensi	Persentase
STS	0	0,0
TS	2	1,9
R	12	11,5
S	68	65,4
SS	22	21,2
Total	104	100,0

Sumber : *Data diolah oleh penulis*

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa penilaian responde tentang penarikan usulan pada Rembug RW tidak hanya sebatas berasal dari ide pemerintah. Hasil dari penilaian responden didominasi dengan pilihan setuju bahkan sangat setuju. Persentase untuk total pemilih setuju dan sangat setuju berjumlah 86,6 %, ini merupakan persentase yang tinggi.

Melihat dari hasil penilaian responden terhadap pertanyaan kuesioner tersebut. Dihubungkan dengan teori tingkat partisipasi Arnstein. Hasil akan mengarahkan bahwa masyarakat tidak dalam ruang tingkat partisipasi di tingkat manipulasi.

b. Tingkat Terapi

Tabel 4.31

Pernyataan 3 Rembug RW

Keterangan	Frekuensi	Persentase
STS	0	0,0
TS	3	2,9
R	19	18,3
S	66	63,5
SS	16	15,4
Total	104	100,0

Sumber : *Data diolah oleh penulis*

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa penilaian responden tentang masyarakat tidak hanya sebatas menjalankan program pemerintah dalam menentukan 5 usulan pada Rembug RW. Dilihat dari hasil dari penilaian responden yang didominasi dengan pilihan setuju bahkan sangat setuju. Persentase untuk total pemilih setuju dan sangat setuju berjumlah 78,9 %, ini merupakan persentase yang tinggi.

Melihat dari hasil penilaian responden terhadap pertanyaan kuesioner tersebut. Dihubungkan dengan teori tingkat partisipasi Arnstein. Hasil akan mengarahkan bahwa masyarakat tidak dalam ruang tingkat partisipasi di tingkat Therapy. Pada tahapan ini mulai timbul komunikasi walau bersifat terbatas, gaya komunikasi bersifat satu arah (pengarahan dari pemerintah) dan inisiatif datang dari pemerintah. Pada penelitian ini hampir sebagian besar proporsi dari hasil lebih dari 50% yang mengarah setuju dengan masyarakat tidak hanya sekedar menjalankan program pemerintah, ini lah sehingga tidak adanya anggapa bila yang terjadi antara masyarakat dan pemrintah bersifat satu arah.

c. Informasi

Tabel 4.32

Pernyataan 4 Rembug RW

Keterangan	Frekuensi	Persentase
STS	0	0,0
TS	2	1,9
R	22	21,2
S	64	61,5
SS	16	15,4
Total	104	100,0

Sumber : *Data diolah oleh penulis*

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa penilaian responden tentang informasi hak dan tanggung jawab. Dilihat dari hasil dari penilaian responden yang didominasi dengan pilihan setuju bahkan sangat setuju. Persentase untuk total pemilih setuju dan sangat setuju berjumlah 76,9 %, ini merupakan persentase yang tinggi. Hal ini menggambarkan bahwa masyarakat dalam menentukan 5 usulan Rembug RW diinformasikan tentang hak dan tanggungjawabnya.

Melihat dari hasil penilaian responden terhadap pertanyaan kuesioner tersebut. Dihubungkan dengan teori tingkat partisipasi Arnstein. Hasil akan mengarahkan bahwa masyarakat sudah mulai berada dalam tingkat partisipasi di tingkat Informasi. Pada tahapan informasi adalah tahapan yang telah terjadi

peningkatan komunikasi namun, masih bersifat satu arah. Pada penelitian ini hampir sebagian besar proporsi dari hasil lebih dari 50% yang mengarah setuju dengan masyarakat diberikan informasi hak dan tanggungjawab.

d. Konsultasi

Tabel 4.33
Pernyataan 5 Rembug RW

Keterangan	Frekuensi	Persentase
STS	0	0,0
TS	8	7,7
R	29	27,9
S	60	57,7
SS	7	6,7
Total	104	100,0

Sumber : *Data diolah oleh penulis*

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa penilaian responden didominasi dengan pilihan setuju bahkan sangat setuju. Persentase untuk total pemilih setuju dan sangat setuju berjumlah 63,4 %, ini merupakan persentase yang tinggi. tentang. Hal ini menggambarkan bahwa masyarakat dalam menentukan 5 usulan pada Rembug RW dapat memberikan masukan dan usulan berupa opini.

Melihat dari hasil penilaian responden terhadap pertanyaan kuesioner tersebut. Dihubungkan dengan teori tingkat partisipasi Arnstein. Hasil akan mengarahkan bahwa masyarakat sudah mulai berada dalam tingkat partisipasi di tingkat Konsultasi. Pada tahapan konsultasi adalah tahapan yang telah terjadi peningkatan komunikasi menjadi dua arah, misalnya pada pertemuan publik seperti publik hearing. Pada penelitian ini hampir sebagian besar proporsi dari hasil lebih dari 50% yang mengarah setuju dengan masyarakat dapat memberikan masukan dan usulan, disini terlihat jelas bahwa sudah adanya komunikasi dua arah antara masyarakat dan pemerintah.

e. Placation

Tabel 4.34
Pernyataan 6 Rembug RW

Keterangan	Frekuensi	Persentase
STS	1	1,0
TS	6	5,8
R	25	24,0
S	61	58,7
SS	11	10,6
Total	104	100,0

Sumber : *Data diolah oleh penulis*

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa penilaian responde pada penarikan usulan pada Rembug RW terlihat adanya keterlibatan masyarakat terhadap keputusan pemerintah. Hasil dari penilaian responden didominasi dengan pilihan setuju bahkan sangat setuju. Persentase untuk total pemilih setuju dan sangat setuju berjumlah 69,3 %, ini merupakan persentase yang tinggi.

Melihat dari hasil penilaian responden terhadap pertanyaan kuesioner tersebut. Dihubungkan dengan teori tingkat partisipasi Arnstein. Hasil akan mengarahkan bahwa masyarakat sudah mulai berada dalam tingkat partisipasi di tingkat Placation. Pada tahapan Placation adalah tahapan yang telah terjadi komunikasi dan dialog sudah meningkat sampai pada tahap negosiasi. Disini masyarakat telah dilibatkan oleh pemerintah dalam satu badan atau komite bersama, namun kekuasaan untuk memutuskan masih berada ditangan pemerintah yang sifatnya kooptatif. Pada penelitian ini hampir sebagian besar proporsi dari hasil lebih dari 50% yang mengarah setuju dengan masyarakat dapat memberikan masukan dan usulan, disini terlihat jelas bahwa sudah adanya komunikasi dua arah antara masyarakat dan pemerintah dan masyarakat mulai ikut terlibat terhadap keputusan pemerintah.

f. Kemitraan

Tabel 4.35
Pernyataan 7 Rembug RW

Keterangan	Frekuensi	Persentase
STS	0	0,0
TS	23	22,1
R	38	36,5
S	37	35,6
SS	6	5,8
Total	104	100,0

Sumber : *Data diolah oleh penulis*

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa penilaian responden pada pilihan setuju dan sangat setuju berjumlah 41,4%. Hasil penilaian ini menggambarkan bahwa kurang dari setengahnya saja yang menganggap bahwa dalam penentuan usulan pada Rembug RW berasal dari ide pemerintah dan masyarakat. Penilaian ini menjelaskan pula tentang keraguan dari responden tentang ide bersama dari pemerintah dan masyarakat hal ini dilihat dari penilaian keraguan responden berjumlah 36,5 % dan bahkan sudah mulai adanya penilaian responden yang tidak setuju bahwa ide ini sepenuhnya berasal dari ide bersama antara pemerintah dan masyarakat yaitu dari penilaian tidak setuju dan sangat tidak setuju berjumlah 22,1%.

Tabel 4.36
Pernyataan 8 Rembug RW

Keterangan	Frekuensi	Persentase
STS	0	0,0
TS	11	10,6
R	49	47,1
S	36	34,6
SS	8	7,7
Total	104	100,0

Sumber : *Data diolah oleh penulis*

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa penilaian responden pada pilihan setuju dan sangat setuju berjumlah 41,3%. Hasil penilaian ini menggambarkan bahwa kurang setengahnya saja yang menganggap bahwa dalam penentuan usulan pada Rembug RW pada tahapan pengelolaan yang terdiri dari adanya perencanaan, penyusunan kebijakan, pemecahan masalah, dan

Universitas Indonesia

pengendalian ini merupakan keputusan bersama pemerintah dan masyarakat. Penilaian ini menjelaskan pula tentang keraguan dari masyarakat tentang tahapan pengelolaan ini merupakan keputusan bersama, hal ini dilihat dari penilaian keraguan masyarakat yang cukup tinggi yaitu berjumlah 47,1 %.

Melihat dari hasil penilaian responden pada tabel 4.41 dan 4.42, terhadap pertanyaan kuesioner tersebut. Dihubungkan dengan teori tingkat partisipasi Arnstein. Hasil akan mengarahkan bahwa masyarakat tidak berada dalam tingkat partisipasi di tingkat kemitraan. Pada tahapan kemitraan pada tahap ini masyarakat dan pemerintah menjadi mitra sejajar. Pada penelitian persentase yang memilih setuju dengan ide awal usulan berasal dari ide bersama pemerintah dan masyarakat adalah 41,4% dan pada tahap pengelolaan merupakan keputusan bersama pemerintah dan masyarakat berjumlah 41,3%. Dilihat dari hasil penilaian responden sudah sudah kecilnya persentase responden yang setuju bahwa tingkat partisipasi masyarakat berada pada tahapan ini, sehingga tidak adanya anggapan bahwa adanya kesejajaran antara pemerintah dan masyarakat.

g. Pendelegasian

Tabel 4.37
Pernyataan 9 Rembug RW

Keterangan	Frekuensi	Persentase
STS	2	1,9
TS	17	16,3
R	43	41,3
S	32	30,8
SS	10	9,6
Total	104	100,0

Sumber : *Data diolah oleh penulis*

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa penilaian responden pada pilihan setuju dan sangat setuju berjumlah 40,4%. Hasil penilaian ini menggambarkan bahwa kurang dari setengahnya saja yang menganggap bahwa dalam penentuan usulan pada Rembug RW berasal dari ide masyarakat sepenuhnya. Penilaian ini menjelaskan pula tentang keraguan dari responden

tentang ide sepenuhnya dari masyarakat hal ini dilihat dari penilaian keraguan responden berjumlah 41,3 % dan bahkan sudah mulai adanya penilaian responden yang tidak setuju bahwa ide ini sepenuhnya berasal dari masyarakat sepenuhnya yaitu dari penilaian tidak setuju dan sangat tidak setuju berjumlah 17,2%.

Tabel 4.38
Pernyataan 10 Rembug RW

Keterangan	Frekuensi	Persentase
STS	6	5,8
TS	31	29,8
R	45	43,3
S	22	21,2
SS	0	0,0
Total	104	100,0

Sumber : *Data diolah oleh penulis*

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa penilaian responden pada pilihan setuju berjumlah 21,2%. Hasil ini menggambarkan bahwa hanya sedikit penilaian dari responden tentang adanya pelimpahan kewenangan pemerintah kepada masyarakat untuk membuat suatu keputusan. Penilaian responden menjelaskan cukup banyak responden yang memilih sangat tidak setuju dan tidak setuju yaitu berjumlah 35,6 %. Bahkan penilaian tidak setuju dan sangat tidak setuju lebih tinggi penilaiannya dari pada setuju dan sangat setuju.

Tabel 4.39
Pernyataan 11 Rembug RW

Keterangan	Frekuensi	Persentase
STS	17	16,3
TS	61	58,7
R	18	17,3
S	8	7,7
SS	0	0,0
Total	104	100,0

Sumber : *Data diolah oleh penulis*

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa penilaian responden pada pilihan tidak setuju dan sangat tidak setuju berjumlah 74,0 %. Hasil ini menggambarkan bahwa responden yang tidak setuju bahkan sangat tidak setuju

mendominasi hasil penilaian yaitu sebagian responden tidak menganggap bahwa pada tahapan pengelolaan merupakan keputusan masyarakat. Didukung dengan nilai responden yang setuju berjumlah hanya sedikit yaitu 7,7%, jadi penilaian responden tidak mengarah pada tahapan pengelolaan ini merupakan keputusan masyarakat

Melihat dari hasil penilaian responden pada tabel 4.43, 4.44 dan 4.45, terhadap pertanyaan kuesioner tersebut. Dihubungkan dengan teori tingkat partisipasi Arnstein. Hasil dari penilaian sudah mulai adanya masyarakat untuk mengarahkan pada tingkat pendelegasian tapi tingkat mengarahnya untuk mencapai tahap ini masih lemah. Hal ini dapat dijelaskan dari ide awal berasal dari masyarakat sepenuhnya responden yang setuju hanya sebagian saja yaitu 40,4%. Tentang ada limpahan kewenangan pemerintah pada masyarakat untuk membuat keputusan, banyak penilaian responden yang masih tidak setuju bahkan yang tidak setuju lebih banyak dari yang setuju. Pada tahap pengelolaan merupakan keputusan masyarakat, banyak responden yang tidak setuju tentang hal ini. Dengan gambaran penilaian responden ini, maka dapat diutaran bahwa masyarakat belum pada tahap pendelegasian ini.

h. Kontrol Masyarakat

Tabel 4.40
Pernyataan 12 Rembug RW

Keterangan	Frekuensi	Persentase
STS	21	20,2
TS	59	56,7
R	20	19,2
S	4	3,8
SS	0	0,0
Total	104	100,0

Sumber : *Data diolah oleh penulis*

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa penilaian responden pada pilihan tidak setuju dan sangat tidak setuju berjumlah 76,9 %. Hasil ini menggambarkan bahwa responden yang tidak setuju bahkan sangat tidak setuju

mendominasi hasil penilaian yaitu sebagian responden tidak menganggap bahwa pada tahapan kebijakan, pengelolaan dan kerja sama merupakan keputusan masyarakat. Didukung dengan penilai responden yang setuju dan sangat setuju berjumlah hanya sedikit yaitu 3,8%, jadi penilaian responden tidak mengarah pada tahapan kebijakan, pengelolaan dan kerja sama ini merupakan keputusan masyarakat sepenuhnya.

Melihat dari hasil penilaian responden pada tabel 4.31, terhadap pertanyaan kuesioner tersebut. Dihubungkan dengan teori tingkat partisipasi Arnstein. Hasil dari penilaian masyarakat tidak dalam tahapan tingkat skontrol masyarakat. Hal ini didukung dengan penilai responden yang setuju dan sangat setuju berjumlah hanya sedikit yaitu 3,8%, dan responden yang tidak setuju 76,9%. Dapat disimpulkan bahwa masyarakat pada tahap ini masyarakat belum memiliki kekuasaan atas kebijakan publik, baik dalam perumusan, implementasi hingga evaluasi

4.2.3.2.2. Analisis Tingkat partisipasi tingkat RW dalam Rembug RW

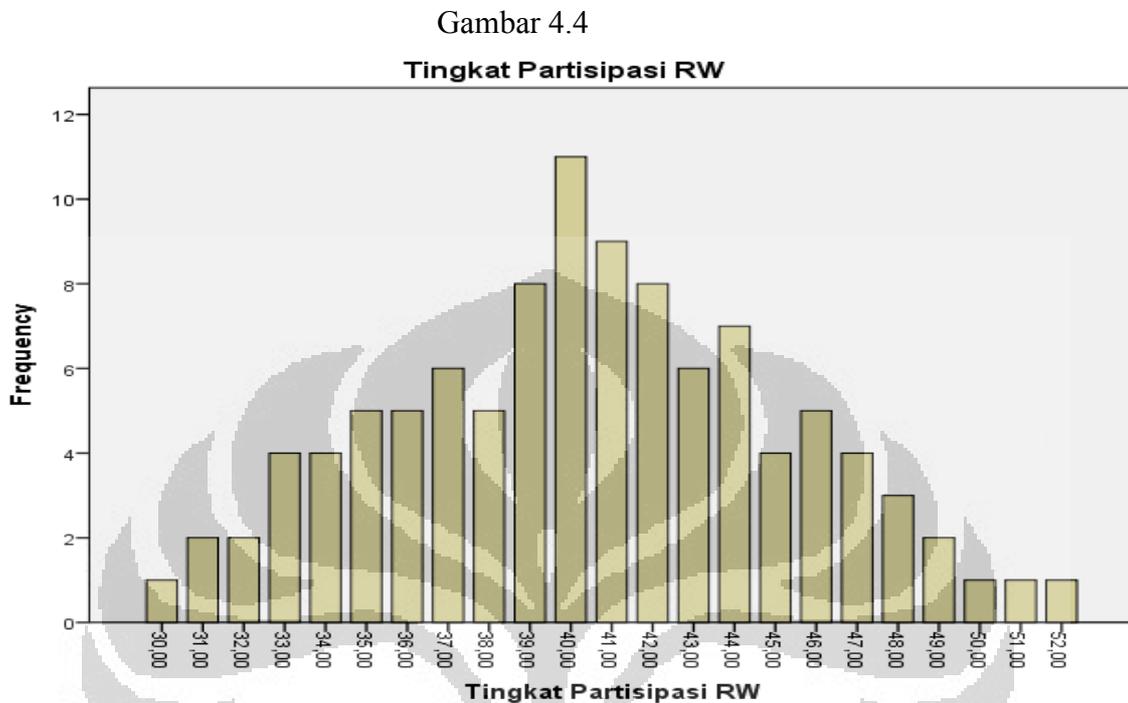
Tabel 4.41
Tingkat Partisipasi RW

Keterangan	Tingkat Partisipasi RW
Mean	40,4519
Median	40,0000
Mode	40,00
Minimum	30,00
Maximum	5TS
Sum	4207,00

Sumber : *Data diolah oleh penulis*

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa untuk data partisipasi responden di tingkat RT diperoleh skor terendah 30 dan skor tertinggi 52. Dengan demikian, rentangan skor yang muncul adalah sebesar 22, yaitu dari skor 30 sampai dengan skor 52. Untuk lebih jelasnya hasil deskriptif statistik adalah sebagai berikut: (a)

skor rata-rata (*Mean*) adalah 40,4519 ; (b) median (*Me*) atau nilai tengah skor adalah 40,00.



Gambar histogram di atas menginformasikan bahwa distribusi skor data yang diperoleh cenderung menyebar. Gambaran ini terlihat dari histogramnya yang cenderung memiliki angka tengah yang lebih tinggi.

Tabel 4.42

tingkat partisipasi RW

	Frekuensi	Persentase	Valid Persentase	Cumulative Persentase
Sedang	83	79,8	79,8	79,8
Valid Tinggi	21	20,2	20,2	100,0
Total	104	100,0	100,0	

Sumber : *Data diolah oleh penulis*

Tingkat partisipasi berdasarkan penelitian pada Rembug RW, dapat dilihat mayoritas individu berada dalam tingkat “Sedang” 83 orang berada pada tingkatan ini dan 21 orang berada dalam tingkatan tinggi. Dilihat dari teori arstein dimana dibagi atas 3 katagori yaitu (1) tidak adanya partisipasi, (2) adanya pembagian

partisipasi masyarakat dan pemerintah, (3) keputusan berada di tangan masyarakat sepenuhnya. Dilihat dari pembagiannya seperti :

Tabel 4.43
Tingkat Partisipasi Teori Arnstein

No	Tingkat partisipasi	Tingkat pemberi kekuasaan
1	Manipulasi	Tidak ada partisipasi
2	Terapi	Tidak ada partisipasi
3	Pemberitahuan	Tokenisme
4	Konsultasi	Tokenisme
5	Palcation	Tokenisme
6	Kemitraan	Tingkat kekuasaan masyarakat
7	Pendelegasian	Tingkat kekuasaan masyarakat
8	Kontrol masyarakat	Tingkat kekuasaan masyarakat

Sumber : Arnstein, dalam African Journal of Economic and Management Studies, 2012

Hasil penelitian, mayoritas berada dalam tahapan sedang, dan tahapan sedang itu range di mulai dari hitungan 28-44. Tingkat partisipasi untuk tingkat sedang dibagi 3 bagian, maka $44 - 28 = 22 / 3 = 5,33$. Jadi range menjadi:

- pemberitahuan : 28 – 33,33
- konsultasi : 33,34 – 38,37
- Palcation : 38,38 – 44

melihat dari hasil dimana (mean) rata-rata pada tingkat yang rendah berada dalam tahapan 40,4519 maka pada tingkat pemilihan alternatif ini berada dalam dalam tahapan palcation

Dilihat dari penelitian ini maka, tingkat partisipasi pada Rembug RW, masyarakat masuk dalam katagori sedang dimana pada tahapan ini sudah adanya pembagian antara masyarakat dan pemerintah. Jadi pada tahapan ini masyarakat sudah dapat memberi pengaruh, meskipun keputusan masih berada dalam tangan pemerintah. Pada tahapan ini komunikasi dan dialog sudah meningkat sampai

Universitas Indonesia

pada tahap negosiasi. Disini masyarakat telah dilibatkan oleh pemerintah dalam satu badan atau komite bersama, namun kekuasaan untuk memutuskan masih berada ditangan pemerintah.

Menurut nara sumber dari pihak Kelurahan Pondok Ranggon tentang Forum Rembug RW yang diadakan dikelurahan Pondok Ranggon yang berlangsung pada tanggal 12, 13 dan 14 Januari. Forum Rembug RW ini dilakukan pada tiap RW yang mana pada Kelurahan Pondok Ranggon terdiri dari 6 RW. Yaitu pada tanggal 12 yang melaksanakan adalah RW 5, pada tanggal 13 yang melaksanakan adalah RW 2, RW 3 dan RW 6, dan yang melaksanakan Rembug RW pada tanggal 14 adalah RW 1 dan RW 4. Dimana forum Rembug RW ini di pimpin oleh ketua RW dan dihadiri oleh tokoh masyarakat antara lain, para ketua dan pengurus RT, ibu-ibu PKK, Jumantik, Tokoh Agama, Keamanan, Pemuda dan lain-lain. Pada forum ini sebagai wadah pengumpulan aspirasi masyarakat pada tingkat RT dimana 5 usulan dari tiap RT tersebut harus menghasilkan 10 usulan yang akan diajukan pada tingkat kelurahan, 5 usulan yang akan diajukan pada tingkat kecamatan dan 3 usulan yang akan diajukan pada tingkat kota dan provinsi. Saat menentukan usulan tersebut masyarakat pun harus menentukan kebutuhan dan permasalahan tersebut berdasarkan skala prioritas. (Hasil wawancara Ibu Isna selaku pihak Kelurahan Pondok Ranggon, 8 mei 2012)

Sebelum dilakukannya forum Rembug RW, masyarakat mengikuti pembekalan musrenbang yang dilakukan oleh kelurahan dimana dijelaskan bagaimana teknis pelaksanaan Rembug RW dan menginformasikan hak dan tanggungjawab masyarakat. Dengan adanya forum ini diharapkan masyarakat mengetahui sistematis forum perencanaan ini, sehingga masyarakat dapat memanfaatkannya sebaik mungkin untuk menutarakan usulan dan pendapat untuk diajukan dan dihasilkan pada forum Rembug RW yang akan dilanjutkan pada tingkat kelurahan, kecamatan dan kota/provinsi.

Informasi dari salah satu pengurus ibu PKK, bahwa dalam forum Rembug RW, masyarakat dapat mengeluarkan aspirasi. Dimana indentifikasi masalah, melihat masalah sampai membuat usulan solusi untuk menyelesaikan masalah

tersebut masyarakat sangatlah dilibatkan. Masyarakat menentukan mana yang prioritas dan mana yang mendesak untuk dijadikan prioritas pertama. Hanya saja semua keputusan yang mana yang dapat dijalankan adalah tetap pada keputusannya masyarakat, tapi hampir sebagian besar hasil yang diajukan oleh masyarakat dari forum Rembug RW yang terdiri dari 10 usulan ke kelurahan, 5 usulan ke kecamatan dan 3 usulan ke kota/provinsi yaitu terealisasi. (Hasil wawancara Ibu Ida selaku perwakilan ibi PKK, 22 Mei 2012)

Hasil analisis dari adanya rapat teknis untuk verifikasi hasil Rembug RW. (Lampiran 8). Rapat Teknis yang dihadiri lurah, pihak kecamatan dan pendamping yaitu sebagian besar disetujui untuk diinput dalam sistem informasi perencanaan. Pada hasilnya setelah indentifikasi dan rasionalisasi anggaran yang sesuai, sebagian besarpun hasil setelah penginputan adalah disetujui. Dapat dilihat hasil rembug RW yang yang 10 usulan diajukan pada tingkat kelurahan semua disetujui dan dapat terealisasi pada tahun depan. Diutarakan oleh notulensi pada forum rapat teknis bahwa hanya saja untuk 5 usulan ke kecamatan dan 3 ke kota/provinsi masih dalam tahapan diserap karena ini, akan masih dibahas dalam forum musrembang kecamatan dan kota. Dalam tahapan persetujuan ada pula usulan yang ditolak atau tidak disetujui, hal ini dikarenakan usulan masyarakat tidak masuknya dalam kode ID identitas ketersediaan.

Pada dasarnya arah kebijakan pembangunan kelurahan menurut RPJMD 2007-2012 yaitu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan hal ini dilakukannya juga pendekatan pelayanan kepada masyarakat. Program peningkatan pelayanan yang dilakukan dapat berupa: *pertama*, meningkatkan pelayanan kebersihan dan kesehatan masyarakat. Hal ini adalah bagian penting dalam pelayanan karena masyarakat harus merasakannya suatu wilayah yang membuatnya nyaman dan jauh dari wabah penyakit. *Kedua*, program pemerintah adalah meningkatkan pelayanan keamanan lingkungan dan pelayanan bencana. Dengan pemerintah memerhatikan hal ini maka akan terasa pelayanan yang baik terhadap masyarakat karena disini lah peran pemerintah yang dapat melindungi masyarakat. *Ketiga*, meningkatkan pelayanan administrasi kepada warga. Ini juga merupakan kegiatan penting yang dimana tindakannya nyata dirasakan. Saat

adanya hal administrasi warga yang dapat diselesaikan secara baik oleh pemerintah maka akan menimbulkan kerjasama yang baik antara masyarakat dan pemerintah sehingga terciptanya hubungan yang positif (Kantor Perencanaan Pembangunan, 2012).

Melihat tahapan formulasi, bila dihubungkan dengan teori rasional kebijakan publik adalah

- a. Rumusan masalah, dimana rumusan masalah ini berasal dari usulan dari tiap RT yang terdiri dari 5 usulan. Dalam rumusan masalah ini pun dilihat kembali masalah yang ada, seperti apa bentuk masalah itu dilapangan. Melihat berdasarkan kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Disinilah tiap RW melakukan penijauan permasalahan yang disampaikan oleh RT dan masyarakat. Selain itu pada forum Rembug RW ini juga menyiapkan informasi usulan kegiatan yang telah direalisasikan pada tahun 2011 yang dibiayai oleh APBD sehingga dalam menetapkan usulan untuk tahun ini tidak terjadinya tumpang tindih.
- b. Tentukan Kriteria Masalah, pada tahapan ini dimana 5 usulan pada tingkat RT dikumpulkan dan dipilah berdasarkan kelompok masalah. Dimana kelompok masalah ini akan dibagi 3, yaitu kelompok masalah untuk tingkat kelurahan, kecamatan dan kota/provinsi. Pada tahapan ini adanya pendamping RW dan pihak Bapennas dimana membantu masyarakat untuk dapat mengarahkan permasalahan tersebut masuk dalam kelompok yang mana.
- c. Identifikasi Alternatif kebijakan dan evaluasi alternatif, pada tahapan ini forum Rembug RW diberikannya usulan yang telah disetujui pada tahun 2011 dan melihat usulan yang tidak tertampung pada tahun 2011. Dengan ini melihat alternatif kebijakan yang mungkin diusulkan dan tidak.
- d. Pilih alternatif kebijakan terbaik, pada tahapan ini pada forum Rembug RW pun didampingi oleh tim pendamping yang bertugas untuk memfasilitasi proses musyawarah dan membantu merumuskan usulan

masyarakat, disini masyarakat harus menentukan prioritas usulan jadi adanya skala yang lebih diprioritaskan dimana menentukan prioritas terhadap usulan kegiatan dengan criteria yang mana permasalahan tersebut merupakan kebutuhan masyarakat yang sangat mendesak, adanya satuan yang terpadu, terkait dan dominan misalnya saja usulan kegiatan fisik yaitu perbaikan saluran air di RT 1, RT 3, RT, 5, RT7 dan RT 10 maka ini merupakan satu kesatuan.

- e. Laksanakan kebijakan, setelah menentukan usulan tersebut maka usulan ini akan langsung dilanjutkan pada rapat teknis. Pada rapat teknis ini melihat kesesuaiannya antara usulan dengan program, tolak ukur dan target kinerja. Dimana hasil dari rapat teknis ini akan langsung dimasukkan kedalam penginputan dalam sistem informasi perencanaan.

Dilihat dari prosesnya Rembug RW, maka dapat digambarkan bahwa pemerintah sudah membuka dan menyediakan wadah atau forum untuk masyarakat berpartisipasi dimana dapat dilihat dari adanya forum Rembug RW yang sudah melibatkan masyarakat dalam mengutarakan usulan. Disini juga sudah tercipta keadaan dua arah, dimana masyarakat sudah dapat mengeluarkan pendapat dan usulan tersebutpun mempengaruhi pemerintah dalam membuat keputusan. Dimana pemerintah mempertimbangkan usulan masyarakat ini, tapi tetap semua keputusan berada dalam keputusan tangan pemerintah. Pada tahapan ini tingkat masyarakat dalam berpartisipasi sudah termasuk hal yang baik karena suara masyarakat sudah member pengaruh terhadap kebijakan pemerintah.

4.2.4. Tabulasi Silang Tingkat Partisipasi dengan Karakteristik Individu

Pada tabulasi silang ini menggambarkan dan menjelaskan karakteristik yang berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat dimana dijelaskan yang mendominasi pada tingkat partisipasi dan melihat hubungan antara karakteristik individu dengan tingkat partisipasi.

Penilaian dengan *Chi Square Test* ini dapat di ambil keputusan dengan menentukan :

Hipotesis:

H0: proporsi partisipasi di tingkat RT untuk katagori sedang dan tinggi tidak berbeda nyata secara statistik

H1: proporsi partisipasi di tingkat RT untuk katagori sedang dan tinggi berbeda nyata secara statistik

Dasar Pengambilan Keputusan

Jika probabilitasnya (nilai sig) > 0.05 maka H0 tidak ditolak

Jika probabilitasnya (nilai sig) < 0.05 maka H0 ditolak

4.2.4.1. Tabulasi silang partisipasi tingkat RT dengan karakteristik individu

a. Tabulasi silang partisipasi di tingkat RT dan Usia

Tabel 4.44

Tabulasi silang partisipasi di tingkat RT dan Usia

Keterangan		Usia			Total
		kurang dari 36 Tahun	37 - 53 Tahun	54 - 70 Tahun	
Sedang	Jumlah	17	40	10	67
	Persentase	16,3%	38,5%	9,6%	64,4%
Tinggi	Jumlah	7	27	3	37
	Persentase	6,7%	26,0%	2,9%	35,6%
Total	Jumlah	24	67	13	104
	Persentase	23,1%	64,4%	12,5%	100,0%

Sumber : *Data diolah oleh penulis*

Berdasarkan tabel di atas, proporsi partisipasi di tingkat RT katagori sedang untuk katagori usia < 36 tahun, 37 – 53 tahun dan 54-70 tahun adalah 16.3%, 38.5% dan 9.6%, sedangkan proporsi partisipasi di tingkat RT untuk katagori tinggi adalah 6,7%, 26.0% dan 2.9%. Dilihat dari hasil, mayoritas responden yang berada dalam katagori tinggi dan sedang adalah responden yang berusia 37-53 Tahun.

Untuk menentukan apakah proporsi partisipasi di tingkat RT untuk katagori sedang dan tinggi berbeda nyata secara statistik atau tidak, ditentukan berdasarkan uji Chi-square. Hasil dari nilai sig = 0.374 > 0.05, sehingga H0 tidak ditolak, yang berarti proporsi partisipasi di tingkat RT untuk katagori sedang dan tinggi tidak berbeda nyata secara statistik pada berbagai katagori usia yang ada.

b. Tabulasi silang partisipasi di tingkat RT dan Pendidikan

Tabel 4.45

Tabulasi silang partisipasi di tingkat RT dan Pendidikan

Keterangan		Sarjana	Sarjana Muda/Diploma	SMA	SMP	
Sedang	Jumlah	22	18	25	2	67
	Persentase	21,2%	17,3%	24,0%	1,9%	64,4%
Tinggi	Jumlah	18	15	4	0	37
	Persentase	17,3%	14,4%	3,8%	0,0%	35,6%
Total	Jumlah	40	33	29	2	104
	Persentase	38,5%	31,7%	27,9%	1,9%	100,0%

Sumber : *Data diolah oleh penulis*

Dapat dilihat pada tingkat partisipasi sedang yang mendominasi adalah tingkat pendidikan SMA yaitu 24,0%. Pada tingkat partisipasi tinggi SMA tidak kembali mendominasi bahkan turun mencapai 3,8% dan pada tingkat partisipasi tinggi di dominasi dengan pendidikan sarjana mencapai 14,4%.

Untuk menentukan apakah proporsi partisipasi di tingkat RT untuk katagori sedang dan tinggi berbeda nyata secara statistik atau tidak, ditentukan berdasarkan uji Chi-square. Hasil dari nilai sig = 0.018 < 0.05 sehingga H0

ditolak, yang berarti proporsi partisipasi di tingkat RT untuk kategori sedang dan tinggi berbeda nyata secara statistik pada berbagai kategori pendidikan yang ada

c. Tabulasi silang partisipasi di tingkat RT dan Pekerjaan

Tabel 4.46
Tabulasi silang partisipasi di tingkat RT dan Pekerjaan

Keterangan	Pekerjaan			Total	
	PNS, TNI, Polri dan BUMN	Pedagang, Wiraswasta	Lain-lain		
Sedang	Jumlah	20	45	2	67
	Persentase	19,2%	43,3%	1,9%	64,4%
Tinggi	Jumlah	12	24	1	37
	Persentase	11,5%	23,1%	1,0%	35,6%
Total	Jumlah	32	69	3	104
	Persentase	30,8%	66,3%	2,9%	100,0%

Sumber : *Data diolah oleh penulis*

Berdasarkan tabel di atas, proporsi partisipasi di tingkat RT kategori sedang untuk kategori pekerjaan PNS, TNI, Polri dan BUMN (19,2%), Pedagang, Wiraswasta (43,3%) dan Lain-lain (1,9%). Sedangkan proporsi partisipasi di tingkat RT untuk kategori tinggi adalah 11,5% pada PNS, TNI, Polri dan BUMN, 23,1% pada Pedagang, Wiraswasta dan 1,0% pada lain-lain. Dilihat dari hasil, mayoritas responden yang berada dalam kategori tinggi dan sedang adalah responden yang pekerjaannya Pedagang, Wiraswasta.

Untuk menentukan apakah proporsi partisipasi di tingkat RT untuk kategori sedang dan tinggi berbeda nyata secara statistik atau tidak, ditentukan berdasarkan uji Chi-square. Hasil dari nilai $\text{sig} = 0.962 > 0.05$ sehingga H_0 tidak ditolak, yang berarti proporsi partisipasi di tingkat RT untuk kategori sedang dan tinggi tidak berbeda nyata secara statistik pada berbagai kategori pekerjaan yang ada.

d. Tabulasi silang partisipasi di tingkat RT dan Penghasilan per Bulan

Tabel 4.47
Tabulasi silang partisipasi di tingkat RT dan Penghasilan per Bulan

Keterangan	Penghasilan			Total	
	Rp. 1.000.000,- s/d Rp. 1.500.000,-	Rp. 1.500.000,- s/d Rp. 2.000.000,-	Lebih dari Rp. 2.000.000,-		
Sedang	Jumlah	4	9	54	67
	Persentase	3,8%	8,7%	51,9%	64,4%
Tinggi	Jumlah	5	4	28	37
	Persentase	4,8%	3,8%	26,9%	35,6%
Total	Jumlah	9	13	82	104
	Persentase	8,7%	12,5%	78,8%	100,0%

Sumber : *Data diolah oleh penulis*

Berdasarkan tabel di atas, proporsi partisipasi di tingkat RT katagori sedang untuk katagori dan katagori tinggi dilihat dari hasil, mayoritas responden yang berada dalam adalah responden yang penghasilan di atas Rp.2.000.000,-

Untuk menentukan apakah proporsi partisipasi di tingkat RT untuk katagori sedang dan tinggi berbeda nyata secara statistik atau tidak, ditentukan berdasarkan uji Chi-square. Hasil dari nilai sig = 0.412 > 0.05 sehingga H0 tidak ditolak, yang berarti proporsi partisipasi di tingkat RT untuk katagori sedang dan tinggi tidak berbeda nyata secara statistik pada berbagai katagori penghasilan yang ada.

e. Tabulasi silang partisipasi di tingkat RT dan Lama Tinggal

Tabel 4.48
Tabulasi silang partisipasi di tingkat RT dan Lama Tinggal

Keterangan	Lama Tinggal				Total	
	4 – 16 Tahun	17 - 30 Tahun	31 – 44 Tahun	45 tahun ke atas		
Sedang	Jumlah	13	35	17	2	67
	Persentase	12,5%	33,7%	16,3%	1,9%	64,4%
Tinggi	Jumlah	10	14	10	3	37
	Persentase	9,6%	13,5%	9,6%	2,9%	35,6%
Total	Jumlah	23	49	27	5	104
	Persentase	22,1%	47,1%	26,0%	4,8%	100,0%

Sumber : *Data diolah oleh penulis*

Berdasarkan tabel di atas, proporsi partisipasi di tingkat RT katagori sedang untuk katagori dan katagori tinggi dilihat dari hasil, mayoritas responden yang berada dalam adalah responden yang lama tinggal pada 17-30 tahun.

Untuk menentukan apakah proporsi partisipasi di tingkat RT untuk katagori sedang dan tinggi berbeda nyata secara statistik atau tidak, ditentukan berdasarkan uji Chi-square. Hasil dari nilai sig = 0.391 > 0.05 sehingga H0 tidak ditolak, yang berarti proporsi partisipasi di tingkat RT untuk katagori sedang dan tinggi tidak berbeda nyata secara statistik pada berbagai katagori lama tinggal yang ada.

f. Tabulasi silang partisipasi di tingkat RT dan Asal Daerah

Tabel 4.49
Tabulasi silang partisipasi di tingkat RT dan Asal Daerah

Keterangan	Asal Daerah				Total	
	Asli Kelurahan Pondok Ranggon	Kota Jakarta Timur	Provinsi Jakarta	Luar Provinsi Jakarta		
Sedang	Jumlah	26	19	9	13	67
	Persentase	25,0%	18,3%	8,7%	12,5%	64,4%
Tinggi	Jumlah	15	9	5	8	37
	Persentase	14,4%	8,7%	4,8%	7,7%	35,6%
Total	Jumlah	41	28	14	21	104
	Persentase	39,4%	26,9%	13,5%	20,2%	100,0%

Sumber : *Data diolah oleh penulis*

Berdasarkan tabel di atas, proporsi pada tingkat partisipasi sedang didominasi yang berasal dari daerah asal Kelurahan Pondok Ranggon sebesar 25,0%. Partisipasi tinggi pun berasal dari Kelurahan Pondok Ranggon sebesar 14,4%. Partisipasi di tingkat RT katagori sedang untuk katagori dan katagori tinggi dilihat dari hasil, mayoritas responden yang berada dalam adalah responden yang asal daerah pada Kelurahan Pondok Rango.

Untuk menentukan apakah proporsi partisipasi di tingkat RT untuk katagori sedang dan tinggi berbeda nyata secara statistik atau tidak, ditentukan

berdasarkan uji Chi-square. Hasil dari nilai sig = 0.974 > 0.05 sehingga H0 tidak ditolak, yang berarti proporsi partisipasi di tingkat RT untuk kategori sedang dan tinggi tidak berbeda nyata secara statistik pada berbagai kategori asal daerah yang ada.

4.2.4.2. Tabulasi silang partisipasi Rembug RW dengan karakteristik individu

a. Tabulasi silang partisipasi Rembug RW dan Usia

Tabel 4.50
Tabulasi silang partisipasi Rembug RW dan Usia

Keterangan		Usia			Total
		kurang dari 36 Tahun	37 - 53 Tahun	54 - 70 Tahun	
Sedang	Jumlah	20	53	10	83
	Persentase	19,2%	51,0%	9,6%	79,8%
Tinggi	Jumlah	4	14	3	21
	Persentase	3,8%	13,5%	2,9%	20,2%
Total	Jumlah	24	67	13	104
	Persentase	23,1%	64,4%	12,5%	100,0%

Sumber : *Data diolah oleh penulis*

Berdasarkan tabel di atas, proporsi partisipasi di Rembug RW kategori sedang untuk kategori usia < 36 tahun, 37 – 53 tahun dan 54-70 tahun adalah 19,2%, 51,0% dan 9,6% sedangkan proporsi partisipasi di Rembug RW untuk kategori tinggi adalah 3,8 %, 13,5 %, 2,9%. Dilihat dari hasil, mayoritas responden yang berada dalam kategori tinggi dan sedang adalah responden yang berusia 37-53 Tahun.

Untuk menentukan apakah proporsi partisipasi di Rembug RW untuk kategori sedang dan tinggi berbeda nyata secara statistik atau tidak, ditentukan berdasarkan uji Chi-square. Hasil dari nilai sig = 0.872 > 0.05 sehingga H0 tidak ditolak, yang berarti proporsi partisipasi di Rembug RW untuk kategori sedang dan tinggi tidak berbeda nyata secara statistik pada berbagai kategori usia yang ada.

b. Tabulasi silang partisipasi Rembug RW dan Pendidikan

Tabel 4.51
Tabulasi silang partisipasi Rembug RW dan Pendidikan

Keterangan	Pendidikan				Total	
	Sarjana	Sarjana Muda/ Diploma	SMA	SMP		
Sedang	Jumlah	30	24	27	2	83
	Persentase	28,8%	23,1%	26,0%	1,9%	79,8%
Tinggi	Jumlah	10	9	2	0	21
	Persentase	9,6%	8,7%	1,9%	0,0%	20,2%
Total	Jumlah	40	33	29	2	104
	Persentase	38,5%	31,7%	27,9%	1,9%	100,0%

Sumber : *Data diolah oleh penulis*

Berdasarkan tabel di atas, proporsi pada tingkat partisipasi sedang didominasi yang Pendidikan sarjana sebesar 28,8%. Partisipasi tinggi pun didominasi pendidikan sebesar 9,6%. Partisipasi di Rembug RW kategori sedang untuk kategori dan kategori tinggi dilihat dari hasil, mayoritas responden yang berada pada pendidikan sarjana.

Untuk menentukan apakah proporsi partisipasi di Rembug RW untuk kategori sedang dan tinggi berbeda nyata secara statistik atau tidak, ditentukan berdasarkan uji Chi-square. Hasil dari nilai $\text{sig} = 0.152 < 0.05$ sehingga H_0 tidak ditolak, yang berarti proporsi partisipasi di Rembug RW untuk kategori sedang dan tinggi tidak berbeda nyata secara statistik pada berbagai kategori pendidikan yang ada.

c. Tabulasi silang partisipasi di Rembug RW dan Pekerjaan

Tabel 4.52
Tabulasi silang partisipasi di Rembug RW dan Pekerjaan

Keterangan		PNS, TNI, Polri dan BUMN	Pedagang, Wiraswasta	Lain-lain	Total
Sedang	Jumlah	24	56	3	83
	Persentase	23,1%	53,8%	2,9%	79,8%
Tinggi	Jumlah	8	13	0	21
	Persentase	7,7%	12,5%	0,0%	20,2%
Total	Jumlah	32	69	3	104
	Persentase	30,8%	66,3%	2,9%	100,0%

Sumber : *Data diolah oleh penulis*

Berdasarkan tabel di atas, proporsi partisipasi di Rembug RW katagori sedang untuk katagori pekerjaan PNS, TNI, Polri dan BUMN (23,1%) , Pedagang, Wiraswasta (53,8%) dan Lain-lain (2,9%). sedangkan proporsi partisipasi di Rembug RW untuk katagori tinggi adalah 7,7% pada PNS, TNI, Polri dan BUMN dan 12,5% pada Pedagang, Wiraswasta. Dilihat dari hasil, mayoritas responden yang berada dalam katagori tinggi dan sedang adalah responden yang pekerjaannya Pedagang, Wiraswasta.

Untuk menentukan apakah proporsi partisipasi di Rembug RW untuk katagori sedang dan tinggi berbeda nyata secara statistik atau tidak, ditentukan berdasarkan uji Chi-square. Hasil dari nilai sig = 0.523 > 0.05 sehingga H0 tidak ditolak, yang berarti proporsi partisipasi di Rembug RW untuk katagori sedang dan tinggi tidak berbeda nyata secara statistik pada berbagai katagori pekerjaan yang ada.

d. Tabulasi silang partisipasi di Rembug RW dan Penghasilan per Bulan

Tabel 4.53
Tabulasi silang partisipasi di Rembug RW dan Penghasilan per Bulan

Keterangan	Penghasilan			Total	
	Rp. 1.000.000,- s/d Rp. 1.500.000,-	Rp. 1.500.000,- s/d Rp. 2.000.000,-	Lebih dari Rp. 2.000.000,-		
Sedang	Jumlah	7	11	65	83
	Persentase	6,7%	10,6%	62,5%	79,8%
Tinggi	Jumlah	2	2	17	21
	Persentase	1,9%	1,9%	16,3%	20,2%
Total	Jumlah	9	13	82	104
	Persentase	8,7%	12,5%	78,8%	100,0%

Sumber : Data diolah oleh penulis

Berdasarkan tabel di atas, proporsi partisipasi di Rembug RW katagori sedang untuk katagori dan katagori tinggi dilihat dari hasil, mayoritas responden yang berada dalam adalah responden yang penghasilan di atas Rp.2.000.000,-

Untuk menentukan apakah proporsi partisipasi di Rembug RW untuk katagori sedang dan tinggi berbeda nyata secara statistik atau tidak, ditentukan berdasarkan uji Chi-square. Hasil dari nilai sig = 0.894 > 0.05 sehingga H0 tidak ditolak, yang berarti proporsi partisipasi di Rembug RW untuk katagori sedang dan tinggi tidak berbeda nyata secara statistik pada berbagai katagori penghasilan yang ada.

e. Tabulasi silang partisipasi di Rembug RW dan Lama Tinggal

Tabel 4.54
Tabulasi silang partisipasi di Rembug RW dan Lama Tinggal

Keterangan	Lama Tinggal				Total	
	4 – 16 Tahun	17 - 30 Tahun	31 – 44 Tahun	45 tahun ke atas		
Sedang	Jumlah	20	39	20	4	83
	Persentase	19,2%	37,5%	19,2%	3,8%	79,8%
Tinggi	Jumlah	3	10	7	1	21
	Persentase	2,9%	9,6%	6,7%	1,0%	20,2%
Total	Jumlah	23	49	27	5	104
	Persentase	22,1%	47,1%	26,0%	4,8%	100,0%

Sumber : *Data diolah oleh penulis*

Berdasarkan tabel di atas, proporsi partisipasi di Rembug RW katagori sedang untuk katagori dan katagori tinggi dilihat dari hasil, mayoritas responden yang berada dalam adalah responden yang lama tinggal pada 17-30 tahun.

Untuk menentukan apakah proporsi partisipasi di Rembug RW untuk katagori sedang dan tinggi berbeda nyata secara statistik atau tidak, ditentukan berdasarkan uji Chi-square. Hasil dari nilai sig = 0.733 > 0.05 sehingga H0 tidak ditolak, yang berarti proporsi partisipasi di Rembug RW untuk katagori sedang dan tinggi tidak berbeda nyata secara statistik pada berbagai katagori lama tinggal yang ada.

f. Tabulasi silang partisipasi di Rembug RW dan Asal Daerah

Tabel 4.55

Tabulasi silang partisipasi di Rembug RW dan Asal Daerah

Keterangan	Asal Daerah				Total	
	Asli Kelurahan Pondok Ranggon	Kota Jakarta Timur	Provinsi Jakarta	Luar Provinsi Jakarta		
Sedang	Jumlah	33	20	11	19	83
	Persentase	31,7%	19,2%	10,6%	18,3%	79,8%
Tinggi	Jumlah	8	8	3	2	21
	Persentase	7,7%	7,7%	2,9%	1,9%	20,2%
Total	Jumlah	41	28	14	21	104
	Persentase	39,4%	26,9%	13,5%	20,2%	100,0%

Sumber : *Data diolah oleh penulis*

Berdasarkan tabel di atas, proporsi pada tingkat partisipasi sedang didominasi yang berasal dari daerah asal Kelurahan Pondok Ranggon sebesar 31,7%. Partisipasi tinggi memperlihatkan adanya penyebaran dari setiap kategori dimana yang berasal dari Kelurahan Pondok Ranggon dan Kota Jakarta Timur memiliki proporsi yang sama sebesar 7,7% yang selanjutnya provinsi Jakarta sebesar 2,9% dan Luar Provinsi Jakarta sebesar 1,9 %.

Untuk menentukan apakah proporsi partisipasi di Rembug RW untuk kategori sedang dan tinggi berbeda nyata secara statistik atau tidak, ditentukan berdasarkan uji Chi-square. Hasil dari nilai $\text{sig} = 0.435 > 0.05$ sehingga H_0 tidak ditolak, yang berarti proporsi partisipasi di Rembug RW untuk kategori sedang dan tinggi tidak berbeda nyata secara statistik pada berbagai kategori asal daerah yang ada.

4.2.4.3. Analisis Karakteristik Individu Yang Berhubungan Untuk Menentukan Tingkat Partisipasi

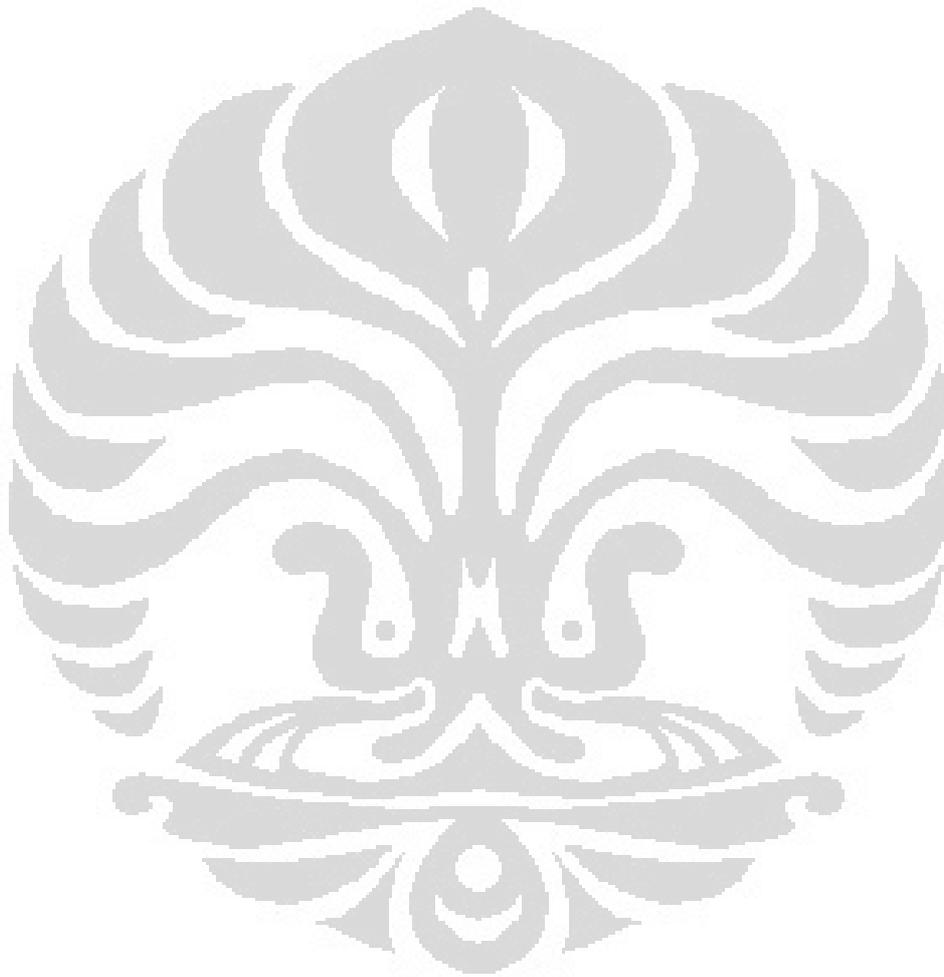
Dari hasil analisis pada karakteristik individu berhubungan dengan tingkat partisipasi, dimana dapat dijelaskan bahwa tidak adanya perbedaan yang signifikan pada tingkat katagori sedang dan tinggi pada Karakteristik individu untuk menentukan tingkat partisipasi masyarakat Kelurahan Pondok Ranggan dalam berpartisipasi dalam proses formulasi kebijakan dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan Tahunan pada tingkat RT dan Rembug RW. Hal ini dapat dijelaskan berdasarkan karakteristik individu yaitu :

- Pada Karakteristik Usia, terlihat jelas baik pada tingkat forum RT dan Rembug RW bahwa tidak adanya perbedaan yang mendominasi pada tingkat sedang dan tinggi. Dimana pada tingkat partisipasi sedang dan tinggi terlihat bahwa yang mendominasi adalah usia 37-53 tahun. Hal ini menjelaskan bahwa yang lebih aktif ikut serta dalam partisipasi masyarakat dalam forum tingkat RT dan Rembug RW ini adalah katagori masyarakat yang berusia 37-53 tahun.
- Pada Karakteristik Pendidikan, terlihat adanya perbedaan yang mendominasi. Dimana terlihat jelas pada forum tingkat RT pada katagori sedang yang mendominasi adalah katagori SMA dan pada tingkat tinggi yang mendominasi adalah tingkat sarjana. Pada tingkat Rembug RW baik pada tingkat sedang dan tinggi yang mendominasi adalah katagori masyarakat pada pendidikan sarjana. Bila dilihat dari jumlah keseluruhan yang ikut serta dalam partisipasi masyarakat dalam forum rembug RW yang dimulai pada tingkat RT adalah didominasi oleh masyarakat pada katagori pendidikan sarjana. Dapat dikatakan semakin tinggi jenjang pendidikan seseorang maka semakin aktif untuk ikut terlibat dalam partisipasi masyarakat tingkat RT dan Rembug RW pada Kelurahan Pondok Ranggan
- Pada Karakteristik Pekerjaan, dapat dijelaskan bahwa baik pada forum RT dan Rembug RW pada tingkat sedang dan rendah tidak adanya perbedaan

yang signifikan. Dilihat dari yang mendominasi pada tingkat RT dan Rembug RW yaitu masyarakat yang mata pekerjaannya adalah Swasta/ pedagang yang terlihat jelas dari jumlahnya lebih dari sebagian masyarakat yaitu 69 orang. Terlihat dari hasil ini bahwa pada Kelurahan Pondok Ranggon tidak didominasi oleh pihak PNS/TNI bahkan yang mendominasi adalah pengusaha/swasta, hal ini adalah perwakilan dari masyarakat diharapkan dengan ini adanya keterwakilan masyarakat untuk mengeluarkan aspirasi masyarakat.

- Pada Karakteristik Penghasilan, pada Forum RT dan RW terlihat tidak adanya perbedaan yang signifikan pada tingkat sedang dan tinggi. Dilihat dari jumlah penduduk berdasarkan penghasilan dimana terlihat jelas yang 82 orang mendominasi pada penghasilan lebih dari Rp.2.000.000,- ke atas, kemudian penghasilan pada kategori Rp.1.500.000 – Rp. 2.000.000 yaitu berjumlah 13 orang dan pada kategori penghasilan Rp. 1.000.000- Rp. 1.500.000 berjumlah 9 orang. Hal ini menjelaskan penghasilan mempengaruhi keikutsertaan masyarakat dalam forum RT dan Rembug RW, bahwa semakin tinggi penghasilan maka semakin aktif untuk ikut terlibat dalam forum partisipasi masyarakat.
- Pada Karakteristik Lama Tinggal, terlihat jelas baik pada tingkat forum RT dan Rembug RW bahwa tidak adanya perbedaan yang mendominasi pada tingkat sedang dan tinggi. Dimana pada tingkat partisipasi sedang dan tinggi terlihat bahwa yang mendominasi adalah lama tinggal pada 17-30 tahun. Hal ini menjelaskan bahwa yang lebih aktif ikut serta dalam partisipasi masyarakat dalam forum tingkat RT dan Rembug RW ini adalah kategori masyarakat yang lama tinggal 17-30 tahun.
- Pada Karakteristik Asal daerah, di forum tingkat RT pada tingkatan partisipasi kategori sedang maupun tinggi tidak ada perbedaan yang signifikan pada tiap kategori yaitu yang mendominasi adalah asal Kelurahan Pondok Ranggon. Pada forum Rembug RW ada perbedaan yang mana pada tingkat sedang yang mendominasi adalah asal Kelurahan

Pondok Ranggong, sedangkan pada tingkat tinggi yang mendominasi adanya Asal kelurahan Pondok Ranggong dan Asal Jakarta Timur. Pada dasarnya bila dilihat dari asal daerah masyarakat yang ikut dalam forum partisipasi masyarakat ini jumlah terbanyak adalah asal Kelurahan Pondok Ranggong, ini menjelaskan bahwa pada penduduk asli Kelurahan Pondok Ranggong adalah masyarakat yang aktif untuk ikut terlibat dalam forum Tingkat RT maupun Rembug RW.



BAB 5

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Proses formulasi dalam penyusunan perencanaan pembangunan tahunan, dimulai dari tingkatan terkecil yaitu pada tingkat RT kemudian dilanjutkan pada tingkat RW yang disebut sebagai Rembug RW. Hasil penelitian yang telah diuraikan serta mengacu kepada pada tujuan penelitian dapat diberikan kesimpulan sebagai berikut :

- a. Secara umum, tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan formulasi dalam penyusunan perencanaan pembangunan tahunan, baik pada pemilihan alternatif pada tingkat RT maupun pada forum Rembug RW yaitu tingkat partisipasi masyarakat di kelurahan Pondok Ranggon berada pada tingkat sedang. Bila dihubungkan pada teori Arnstein maka berda tahapan tingkat 5 yaitu *Participation*, yang dapat diartikan bahwa dalam penyusunan perencanaan pembangunan masyarakat dari tingkat RT sudah ikut dilibatkan dan memberikan pengaruh terhadap perencanaan, hanya saja semua keputusan masih dalam tahap keputusan pemerintah. Hasil penelitian menjelaskan bahwa pada dasarnya pemerintah sudah merangkul dan menyediakan forum warga untuk menyalurkan aspirasi dan kebutuhan, dalam pembuatan keputusan adalah peran pemerintah.
- b. Hubungan Karakteristik Individu dengan tingkat Partisipasi Masyarakat
 - Hubungan antara karakteristik individu (Usia, Pekerjaan, Pendidikan, Penghasilan, Lama Tinggal, dan Asal Daerah) dengan tingkat partisipasi, baik dalam tahapan pemilihan alternatif pada tingkat RT dan pada tahapan rembug RW yaitu dapat disimpulkan bahwa partisipasi di tingkat RT mayoritas proporsi untuk katagori sedang dan tinggi tidak berbeda nyata secara statistik pada berbagai katagori yang ada yang dapat dilihat dari probabilitasnya lebih besar dari 0,05. Hanya saja untuk katagori pendidikan probabilitasnya lebih kecil dari

0,05 , hal ini menjelaskan bahwa adanya perbedaan katagori antara tingkat partisipasi sedang dan tinggi. Partisipasi di Rembug RW keseluruhan proporsi untuk katagori sedang dan tinggi tidak berbeda nyata secara statistik pada berbagai katagori yang ada yang dapat dilihat dari probabilitasnya lebih besar dari 0,05.

- Pada Partisipasi tingkat RT dan Partisipasi pada forum Rembug RW, adanya beberapa persamaan yang mendominasi disetiap kategori. Katagori tersebut antara lain, katagori usia yang mendominasi adalah responden yang berusia 37-53 Tahun, katagori pekerjaan yang mendominasi adalah pedagang dan wiraswasta, katagori penghasilan yang mendominasi adalah penghasilan diatas Rp.2.000.000,- , katagori lama tinggal yang mendominasi adalah pada lama tinggal 17-30 tahun. Pada katagori Pendidikan dan daerah asal memiliki perbedaan yang mendominasi. Pada pendidikan tingkat RT yang mendominasi tingkat sedang adalah SMA dan pada tingkat tinggi adalah sarjana, Sedangkan untuk partisipasi pada forum Rembug RW yang mendominasi adalah sarjana. Pada asal daerahn untuk tingka RT yang mendominasi adalah responden asal daerah Kelurahan Pondok Ranggan, sedangkan untuk partisipasi pada forum Rembug RW yang mendominasi pada tingkat sedang adalah asal Kelurahan pondok Ranggan hanya saja pada tingkat tinggi asal Kelurahan Pondok Ranggan memili proporsi yang sama dengan asal dari Kota Jakarta Timur.

5.2. Saran

Dari hasil analisis yang telah diuraikan serta melihat kesimpulan di atas dapat diberikan saran sebagai berikut :

- a. Sebaiknya pemerintah Kelurahan Pondok Ronggon dapat pula melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan dalam forum Rapat Teknis. Jadi adanya undangan kepada masyarakat dalam forum keputusan yang diambil pemerintah, sehingga terlihat transparansi yang jelas dan keterbukaan terhadap masyarakat.
- b. Sebaiknya dilakukan sosialisasi dan pemberian informasi untuk waktu dan undangan lebih luas, misalnya dengan adanya pemberian undangan atau informasi dari dari sebelum jauh waktu pelaksanaan, sehingga para RT memiliki cukup waktu untuk menyebarluaskan informasi ini. Sebaiknya pihak kelurahan memiliki data base no telephone masyarakat yang selama ini aktif dalam forum tingkat RT dan Rembug RW sehingga terjadinya hubungan yang cepat dalam pemberian informasi. Dapat pula menggunakan Teknologi Informasi modern saat ini seperti Internet. Dengan ini diharapkan lebih banyak masyarakat yang dapat lebih terlibat aktif dalam forum ini.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Agustino,Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Jakarta: Alfabeta
- Budiardjo,Miriam. 1996. *Demokrasi Di Indonesia, Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Pancasila*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Conyers, Diana, 1994. *Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga: Suatu Pengantar*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
- Dye,Thomas.R. 2008. *Understanding Public Policy*. Upper saddle river,new jersey
- Gerston,larry N. 2002. *Public Policymaking in a democraton society, a guide to civic engagement*. London-England
- Ghozali.Imam. 2002, *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS*, Semarang : Badan penerbit Universitas Diponegoro.
- Hardjasoemantri,Koesnadi ,DKK. 2003. *Penyusunan Peraturan Daerah yang Partisipatif*, Jakarta: masyarakat transparansi Indonesia
- Irawan, Prasetya, 2006, *Penelitian Kualitatif & Kuantitatif Untuk Ilmu – Ilmu Sosial*, Jakarta : Departemen Ilmu Admnistrasi FISIP UI
- Juliantara, 2004, *Merentas Jalan Demokrasi*, Yogyakarta : Kanisius
- Komarudin, Drs, MA, 1997. *Menelusuri Pembangunan Perumahan dan Pemukiman*, Jakarta, Yayasan Realestat Indonesia- PT. Rakasindo.
- Kumorotomo,Wahyudi. 2005. *Etika Administrasi Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Meyer,Thomas. 2002. *Demokrasi,Sebuah Pengantar Untuk Penerapan*. Jakarta: Kantor Perwakilan Indonesia

Mikkelsen, Britha. 2001. *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-Upaya Pemberdayaan*. Terjemahan Matheos Nalle. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Mustopadidjaja AR. 2003. *Manajemen Proses Kebijakan Publi: formulasi, implementasi dan evaluasi kinerja*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara RI

Nasution, Zulkarnain. 2009, *Solidaritas Sosial dan Partisipasi Masyarakat Desa Transisi*, Malang: UMM Press

Nasution, Mustafa dan Usman. 2005, *Proses Penelitian Kuantitatif*, Jakarta : Falkutas Ekonomi Universitas Indonesia

Nawawi, Ismail. 2009, *Public Policy Analisis, strategi advokasi teori dan praktek*, Surabaya: Putra Media Nusantara

Nugroho, Riant. 2011. *Publik Policy*. Jakarta: Gramedia,

Pasolong, Harbani. 2007. *teori administrasi public*. Bandung: Alfabeta

Santoso, Pandji. 2008. *Administrasi Publik, Teori dan Aplikasi Good Governance*. Jakarta : PT Refika Aditama

Sastropoetro. 1988, *Partisipasi Masyarakat, Persuasi dan Disiplin Pembangunan*, Jakarta

Siagian, Sondang M.P.A. 2005. *Administrasi Pembangunan, Konsep, Dimensi dan Strateginya*, Jakarta: PT bumi Aksara

Soekartawi, 1990, *Prinsip Dasar Perencanaan Pembangunan*, Jakarta : Rajawali Pers

Soetrisno, Loekman. 1995. *Menuju masyarakat Partisipatif*, Yogyakarta: Kanisius

Syafie. Inu kencana. 2006. *ilmu administrasi public*. Jakarta: Rineka Ciptas

Universitas Indonesia

Tjokroamidjojo, Bintoro. 1985. *Pengantar Administrasi Pembangunan*, Jakarta : LP3ES

Tjokroamidjojo, Bintoro. 1996. *manajemen Pembangunan*. Jakarta: Gunung Agung

Tjokroamidjojo, Bintoro. 1980, *Perencanaan Pembangunan*, Jakarta: Gunung Agung

Widodo,Joko. 2007. *Analisis Kebijakan Publik,Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang : Bayumedia Publishing

Winarno,Budi. 2012. *Kebijakan Publik,Teori,Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS

JURNAL

Suryana,Asep. 2006. *Mengapa Mereka Tidak Golput? Studi Pilihan Politik Lapis Bawah Menjelang Pemilu 2004 di Depok*. Jurnal Masyarakat Edisi Vol. XIII. No 1. Juni-2006, Lab Sosio

Ihugba, Bethel Uzoma. 2012. *CSR stakeholder engagement and Nigerian tobacco manufacturing sub-sector*. *African Journal of Economic and Management Studies*. Vol. 3 Iss: 1 pp. 42 – 63

INTERNET

[www.Lampungpost.com :http://lampungpost.com/politika/22847-pemerintahan--budaya-politisi-rendahkan-demokrasi.html](http://lampungpost.com/politika/22847-pemerintahan--budaya-politisi-rendahkan-demokrasi.html), 25.03.2012

[www.Kompasiana.com : http://sosbud.kompasiana.com/2011/05/24/peran-masyarakat-dalam-pembangunan/](http://sosbud.kompasiana.com/2011/05/24/peran-masyarakat-dalam-pembangunan/), 25.03.2012

[www.jakarta.go.id: http://www.jakarta.go.id/2011/kelurahan-pondok-ranggon.html](http://www.jakarta.go.id/2011/kelurahan-pondok-ranggon.html), 25.03.2012

[www.wwf.or.id : http://www.wwf.or.id/berita_fakta/berita_fakta/?24224/Strategi-pengelolaan-pesisir-dan-laut-Solor-Alor-terpadu](http://www.wwf.or.id/berita_fakta/berita_fakta/?24224/Strategi-pengelolaan-pesisir-dan-laut-Solor-Alor-terpadu), 04.04.2012

[www.beritajakarta.com:http://www.beritajakarta.com/2008/id/berita_detail.asp?NewsId=25415&idwil=0](http://www.beritajakarta.com/2008/id/berita_detail.asp?NewsId=25415&idwil=0), 18.04.2012

[www.desacilayung.com : http://desacilayung.com/2012/05/musrenbang_09.html](http://desacilayung.com/2012/05/musrenbang_09.html), 20.04.2012

[www.bappeda.com : http://bappeda.muaraenimkab.go.id/pembangunan-daerah/publikasi-pembangunan/155-musrenbang-desakeluarahan-dan-musrenbang-kecamatan](http://bappeda.muaraenimkab.go.id/pembangunan-daerah/publikasi-pembangunan/155-musrenbang-desakeluarahan-dan-musrenbang-kecamatan) , 25.05.2012

SUMBER LAIN

DKI Jakarta, Buku Panduan Rembug RW tahun 2012

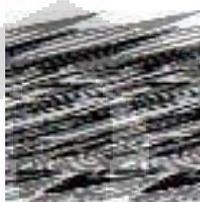
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

DKI Jakarta, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Pondok Ranggon, Desember 2011

Kantor Perencanaan Pembangunan, Kota Administrasi Jakarta Timur, Persiapan Musrenbang Kelurahan Dan Kecamatan, 2012

Lampiran 1

KUESIONER PENELITIAN
“Partisipasi Masyarakat Dalam Formulasi Kebijakan Terhadap Penyusunan
Program Tahunan Dalam Forum Rembug RW
Pada Kelurahan Pondok Ranggong”



Kepada Yth,
Bapak/ Ibu
Di

Tempat
Dengan hormat,

Saya mahasiswa Administrasi Negara, fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik – Universitas Indonesia. sedang dalam tahap menyelesaikan Skripsi untuk memenuhi salah satu syarat dalam meraih gelar sarjana Strata 1 (S1).

Sehubungan dengan hal tersebut, saya mohon agar Bapak/ Ibu/ saudara/i untuk berkenan meluangkan waktunya mengisi kuesioner ini. Seluruh informasi yang diberikan hanya digunakan untuk keperluan penelitian Akademis semata dan tidak ada tujuan lain serta tidak akan dipublikasikan secara luas. Oleh karena itu semua jawaban yang diberikan akan dijamin kerahasiaannya.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Pemerintah Kelurahan Pondok Ranggong, khususnya instansi yang berwenang dalam penyusunan Formulasi kebijakan, dengan mempertimbangkan partisipasi masyarakat.

Demikian atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara untuk berkenan mengisi kuesioner ini, kami mengucapkan banyak terima kasih.

Hormat saya,

Rahma Utami

KUESIONER

A. DATA RESPONDEN

Petunjuk Pengisian

1. Daftar isian yang berbentuk pilihan, jawaban dipilih salah satu dengan memberikan tanda silang (X) pada salah satu huruf di depan jawaban.
2. Untuk pernyataan yang tidak tersedia pilihan jawaban, jawaban dapat diisikan dengan menuliskan pada tempat yang telah tersedia.

1. Jenis Kelamin :
 - a. Pria
 - b. Wanita
2. Usia Bapak/Ibu :
 - a. kurang dari 36 tahun
 - b. berkisar dari 37 - 53 tahun
 - c. lebih dari 54 - 70 tahun
3. Pendidikan terakhir Bapak/Ibu :
 - a. Sarjana
 - b. Sarjana Muda/Diploma
 - c. Lulus SMA atau yang sederajat
 - d. Lulus SMP atau yang sederajat
 - e. Lulus SD atau yang sederajat
4. Pekerjaan Bapak/Ibu saat ini :
 - a. PNS, TNI, Polri dan BUMN
 - b. Pedagang, Wiraswasta
 - c. Buruh Tani, Buruh Bangunan, Buruh Pabrik
 - d. Lain-lain.....
5. Rata-rata penghasilan yang diterima Bapak/Ibu tiap bulan
 - a. Kurang dari Rp. 500.000,-
 - b. Rp. 500.000,- s/d Rp. 1.000.000,-
 - c. Rp. 1.000.000,- s/d Rp. 1.500.000,-
 - d. Rp. 1.500.000,- s/d Rp. 2.000.000,-
 - e. Lebih dari Rp. 2.000.000,-
6. Lama tinggal Bapak / Ibu di kelurahan Pondok Ranggon
 - a. 1 – 3 Tahun
 - b. 4 – 16 Tahun
 - c. 17 - 30 Tahun
 - d. 31 – 44 Tahun
 - e. 45 tahun ke atas

7. Asal Daerah / Tempat tinggal Bapak/ Ibu sebelum menetap tinggal di Kelurahan Pondok Ranggon

- a. Asli Kelurahan Pondok Ranggon
- b. Kota Jakarta Timur
- c. Provinsi Jakarta
- d. Luar Provinsi Jakarta

B. BENTUK PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORMULASI KEBIJAKAN

Bacalah pernyataan-pernyataan berikut ini. Jawaban pertanyaan mohon dipilih salah satu dengan memberikan tanda tanda (✓) pada tempat yang tersedia,

- Keterangan :
- S : Setuju
 - SS : Sangat Setuju
 - R : Ragu - Ragu
 - TS : Tidak Setuju
 - STS : Sangat Tidak Setuju

B.1 Pembagian Inventaris Aspirasi RW ke setiap RW (Setiap RW menarik 5 Usulan dari setiap RT)

No	Pertanyaan	STS	TS	R	S	SS
1.1	Bapak/Ibu dalam kegiatan penarikan 5 usulan tingkat RT mendapatkan sosialisasi dan publikasi					
1.2	ide awal dalam penarikan 5 usulan tingkat RT tidak hanya berasal dari ide pemerintah					
2	Bapak/Ibu dalam penentuan 5					

	usulan tingkat RT tidak hanya sebatas menjalankan program pemerintah					
3	Bapak/Ibu dalam Penentuan 5 usulan tingkat RT di informasikan hak dan tanggung jawab					
4	Bapak/Ibu dalam Penentuan 5 usulan tingkat RT dapat memberikan masukan dan usulan berupa opini					
5	Bapak/Ibu dalam penentuan 5 usulan tingkat RT adanya keterlibatan masyarakat terhadap keputusan pemerintah					
6.1	Bapak/Ibu dalam penentuan 5 usulan tingkat RT, ide awal usulan berasal dari ide bersama pemerintah dan masyarakat					
6.2	Bapak/Ibu dalam penentuan 5 usulan tingkat RT , pada tahap pengelolaan (Perencanaan , Penyusunan kebijakan, Pemecahan masalah, Pengendalian) merupakan keputusan bersama pemerintah dan masyarakat					
7.1	Bapak/Ibu dalam penentuan 5 usulan tingkat RT, ide awal sepenuhnya berasal dari masyarakat sepenuhnya					
7.2	Bapak/Ibu dalam penentuan 5 usulan tingkat RT , Ada limpahan kewenangan pemerintah pada					

	masyarakat untuk membuat keputusan					
7.3	Bapak/Ibu dalam penentuan 5 usulan tingkat RT, pada tahap pengelolaan (Perencanaan , Penyusunan kebijakan, Pemecahan masalah, Pengendalian) merupakan keputusan masyarakat					
8.	Bapak/Ibu dalam penentuan 5 usulan tingkat RT, Kebijakan, Pengelolaan dan Kerja sama adalah keputusan sepenuhnya di tangan masyarakat					

B.2. Pemilihan Aspirasi dari tingkat RT ke tingkat RW (Rembug RW)

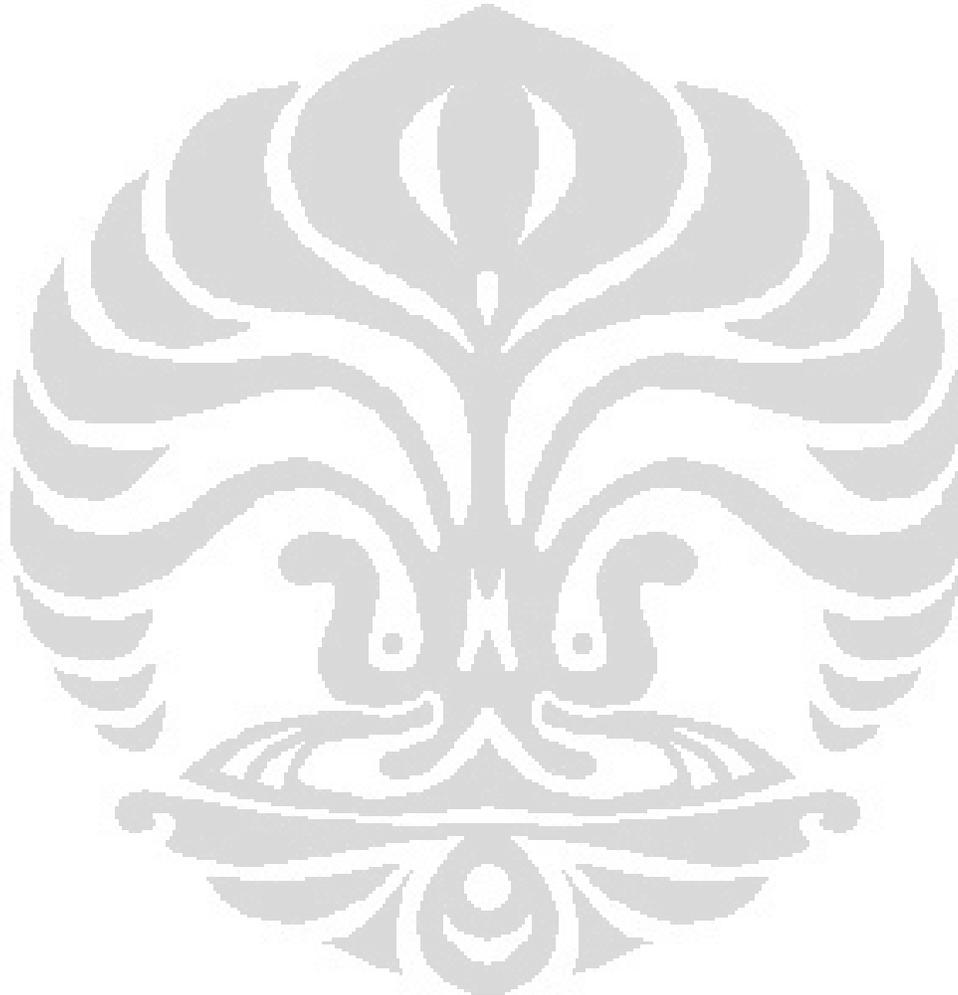
No	Pertanyaan	STS	TS	R	S	SS
1.1	Bapak/Ibu dalam kegiatan rembug RW, mendapatkan sosialisasi dan publikasi					
1.2	Ide awal dalam rembug RW, tidak hanya berasal dari ide pemerintah					
2	Bapak/Ibu dalam rembug RW, tidak hanya sebatas menjalankan program pemerintah					
3	Bapak/Ibu dalam rembug RW, di informasikan hak dan tanggung jawab					
4	Bapak/Ibu dalam rembug RW, memberikan masukan dan usulan berupa opini					

5	Bapak/Ibu dalam rembug RW, adanya keterlibatan masyarakat terhadap keputusan pemerintah					
6.1	Bapak/Ibu dalam rembug RW, ide awal usulan berasal dari ide bersama pemerintah dan masyarakat					
6.2	Bapak/Ibu dalam rembug RW, pada tahap pengelolaan (Perencanaan , Penyusunan kebijakan, Pemecahan masalah, Pengendalian) merupakan keputusan bersama pemerintah dan masyarakat					
7.1	Bapak/Ibu dalam rembug RW, ide awal berasal dari masyarakat sepenuhnya					
7.2	Bapak/Ibu rembug RW, Ada limpahan kewenangan pemerintah pada masyarakat untuk membuat keputusan					
7.3	Bapak/Ibu dalam rembug RW, pada tahap pengelolaan (Perencanaan , Penyusunan kebijakan, Pemecahan masalah, Pengendalian) merupakan keputusan masyarakat					
8.	Bapak/Ibu dalam rembug RW, dalam kebijakan, pengelolaan dan Kerja sama adalah keputusan sepenuhnya di tangan masyarakat					

CODDING SHEET

KARAKTERISTIK INDIVIDU							TINGKAT PARTISIPASI																									
k.1	k.2	k.3	k.4	k.5	k.6	k.7	DALAM PENETUAN 5 ALTERNATIF PADA TINGKAT RT								PEMILIHAN ASPIRASI DARI TINGKAT RT KE TINGKAT RW																	
							1.1	1.2	2	3	4	5	6.1	6.2	7.1	7.2	7.3	8	1.1	1.2	2	3	4	5	6.1	6.2	7.1	7.2	7.3	8		
1	1	2	1	1	5	4	1	5	4	5	4	4	4	4	4	4	5	4	4	3	5	5	4	4	4	3	3	4	4	3	2	1
2	1	3	3	4	3	5	1	4	5	5	4	4	4	5	4	4	3	3	4	4	4	4	3	3	3	3	4	3	2	1	1	
3	1	2	1	2	5	4	1	5	4	4	4	4	4	4	5	5	3	4	1	4	5	4	5	4	4	3	4	3	3	2	2	
4	1	1	2	2	3	2	2	5	3	4	4	4	4	4	3	4	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	
5	1	2	3	2	5	2	2	3	2	3	3	3	3	2	2	3	1	2	2	3	2	3	4	2	4	3	3	2	4	2	1	
6	1	2	3	2	5	3	4	5	3	4	3	3	3	4	3	4	3	3	2	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	
7	1	2	1	1	5	3	3	5	3	5	5	5	5	5	3	4	5	4	3	4	4	4	3	3	3	3	4	3	3	3	2	
8	2	2	1	5	3	2	4	3	5	5	3	5	3	4	4	4	4	3	4	4	3	4	3	4	3	4	2	2	1	2	1	
9	1	3	3	2	4	4	1	4	4	4	5	3	4	4	4	3	3	2	2	3	3	3	4	2	3	4	3	3	3	3	2	
10	1	1	1	1	5	2	1	5	5	3	3	4	4	5	4	4	3	3	4	4	4	4	3	4	3	3	3	3	3	3	2	
11	2	2	1	1	5	3	4	5	4	4	3	3	5	3	5	3	3	2	2	4	4	5	5	5	5	4	3	5	4	4	3	
12	1	2	1	1	5	4	4	4	4	3	4	5	3	3	3	5	3	4	3	4	4	4	5	3	4	5	3	2	2	2	3	
13	1	2	1	2	5	2	2	4	3	4	4	5	4	3	3	4	2	3	2	5	4	3	4	4	4	3	4	3	2	2	2	
14	2	2	2	2	5	3	2	5	5	5	5	4	4	4	5	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	2	2	2	
15	1	2	2	2	5	3	1	5	5	5	4	4	3	3	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	2	2	
16	1	1	3	2	3	3	1	4	4	3	4	2	3	3	3	3	1	2	3	4	4	4	4	4	4	4	3	1	1	1	1	
17	1	2	3	2	4	4	3	5	4	3	2	4	5	4	3	4	1	2	2	4	4	4	3	4	5	4	3	2	2	2	3	
18	1	2	3	2	4	3	1	4	4	4	3	3	4	4	4	4	3	3	4	4	5	4	4	4	4	4	3	3	3	2	2	
19	1	3	2	1	5	4	1	4	4	4	4	4	3	4	3	4	2	2	1	4	4	4	4	3	4	4	4	2	3	2	2	
20	1	2	1	1	5	3	1	5	5	4	5	4	4	3	5	5	3	3	4	4	4	4	3	4	4	2	4	3	3	3	2	
21	1	2	1	2	4	4	4	4	4	5	3	4	4	4	5	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	3	3	3	2	2	
22	1	2	1	2	5	2	4	4	4	4	4	4	3	4	3	2	3	2	2	4	4	4	3	4	4	2	2	3	2	1	2	
23	1	2	1	2	4	2	1	4	4	4	3	5	3	5	2	4	3	3	3	4	4	4	4	3	2	3	3	3	2	3	3	
24	1	2	3	2	5	3	1	5	4	4	4	4	3	4	4	4	3	2	2	5	5	4	4	4	4	3	3	2	1	2	3	
25	1	2	3	2	5	4	4	5	3	4	4	5	4	4	2	4	4	2	2	5	4	4	4	2	4	3	2	2	1	2	1	
26	1	1	2	2	5	2	1	5	5	5	4	3	4	4	4	3	3	2	3	5	5	4	4	4	4	3	4	3	3	3	3	
27	1	2	1	2	5	3	1	5	4	5	4	3	4	4	5	4	3	2	3	5	4	5	4	4	4	3	4	3	2	2	1	
28	1	2	2	2	5	3	1	4	4	4	4	4	4	3	3	2	2	1	1	3	4	4	4	4	3	3	4	1	3	2	1	
29	1	1	2	2	4	4	1	3	2	2	3	3	3	2	4	2	2	2	2	4	3	2	4	3	3	2	3	1	2	2	2	
30	1	2	1	1	5	4	1	4	5	4	4	4	3	5	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	3	3	2	4	3	2	
31	2	2	1	2	4	3	3	5	5	5	5	4	3	3	3	4	4	2	4	5	4	5	4	4	4	4	4	4	2	2	2	
32	2	2	3	2	5	4	1	5	4	4	5	4	5	3	3	2	3	2	2	5	4	4	4	4	4	4	3	3	2	2	2	
33	2	2	2	2	5	3	2	4	4	4	4	3	4	3	3	4	3	3	3	5	5	4	3	4	4	4	2	3	2	3	2	
34	1	2	3	2	5	5	1	5	4	4	5	5	4	5	5	4	3	3	4	5	4	4	3	4	5	2	2	4	3	2	1	
35	1	2	2	1	5	3	2	4	4	4	4	4	4	5	5	4	3	4	4	4	4	5	3	2	2	4	2	3	2	2	1	
36	1	1	2	2	5	2	3	3	3	3	4	3	4	3	4	3	2	3	2	3	4	3	2	2	2	2	3	3	2	1	1	
37	1	3	1	2	5	2	1	3	3	4	4	4	4	3	2	4	4	2	3	1	4	4	4	4	4	4	2	3	3	3	1	2
38	2	1	1	1	5	2	4	4	4	5	4	3	5	3	4	4	2	2	3	4	4	4	3	3	4	4	4	4	3	2	2	
39	1	2	2	1	5	3	2	4	4	4	5	4	5	5	5	2	2	2	1	4	4	5	2	5	3	2	5	3	4	2	3	
40	1	2	2	2	5	4	1	4	4	4	5	4	4	4	4	3	4	2	1	4	4	4	3	4	3	2	3	2	1	2	2	
41	1	2	3	1	5	5	1	4	4	3	5	4	4	5	3	3	4	2	3	4	4	3	4	4	4	2	4	3	2	2	2	
42	1	2	3	2	5	4	1	4	3	4	3	4	3	2	3	3	4	3	4	4	4	3	3	4	2	2	3	4	1	1	1	
43	1	1	1	2	3	3	4	4	4	4	3	4	4	4	2	4	2	2	2	4	4	4	4	4	3	4	3	3	2	4	1	
44	1	2	1	2	5	3	4	4	4	4	4	4	5	4	3	3	3	2	2	4	5	3	5	3	5	3	4	5	2	2	1	
45	2	1	1	2	5	4	1	3	3	3	4	4	3	4	4	4	2	2	2	3	3	3	4	2	3	2	2	3	2	2	1	
46	1	2	2	2	5	4	1	4	5	5	4	4	5	5	5	3	4	3	3	5	5	5	4	5	5	4	3	4	4	4	4	
47	1	2	2	1	5	3	2	4	4	4	4	3	4	4	5	3	3	2	2	4	4	4	4	5	3	4	4	4	4	4	2	
48	2	2	3	1	5	3	3	5	4	4	4	4	3	5	4	4	2	2	2	4	4	4	4	2	4	3	2	2	1	2	2	
49	1	3	3	2	4	5	4	5	3	4	5	5	3	3	3	4	2	2	2	4	4	4	4	3	4	4	3	4	3	2	2	
50	1	2	2	2	5	2	4	3	3	2	2	3	4	3	3	3	4	2	1	4	4	4	4	4	2	3	3	2	1	2	1	
51	1	2	2	1	5	2	4	5	5	4	5	4	5	4	3	5	4	3	3	5	5	2	4	3	4	5	4	4	2	2	2	
52	1	3	2	2	4	3	2	3	3	3	4	3	3	4	4	2	4	3	2	3	3	4	4	3	4	3	3	2	2	1	2	
53	2	2	1	1	5	3	2	4	3	5	4	3	4	4	5	4	3	2	2	4	5	5	4	5	3	4	4	3	2	2	3	
54	1	2	1	2	5	4	4	5	5	5	4	4	5	3	4	4	4	3	3	5	4	4	4	4	3	4	3	5	2	4	2	
55	1	1	1	2	5	3	1	5	4	4	4	4	4	3	4	3	2	2	2	5	4	4	4	4	3	3	4	3	4	4	2	
56	1	2	2	1	5	2	4	5	4	4	5	4	5	3	3	5	3	2	2	5	4	4	3	4	4	3	3	3	1	2	2	
57	1	2	1	1	5	3	2	5	4	4	4	5	4	3	5	2	2	2	1	5	4	4	3	4	4	3	5	4	4	1	3	
58	2	3	1	5	4	1	4	4	4	4	4	3	3	5	2	4	2	1	4	4	4	4	3	4	4	5	3	3	1	2	2	
59	1	2	3	2	5	4	2	4	3	3	4	4	4	4	3	1	4	3	1	4	3	3	4	3	4	2	3	2	1	2	3	
60	1	1	2	2	3	3	1	4	4	4	4	4	3	4	4	3	4	3	1	4	4	4	2	4	3	3	5					

87	1	2	1	1	5	3	3	5	5	4	5	5	5	3	4	2	4	2	4	5	5	4	5	4	4	4	4	3	4	2	1
88	1	2	3	1	5	3	4	4	5	4	4	4	4	3	4	2	2	2	4	3	2	2	5	3	3	2	4	4	2	1	
89	1	2	1	2	5	3	2	5	5	5	4	5	5	4	4	3	4	3	1	5	5	5	5	3	3	2	4	3	2	3	
90	1	2	1	2	5	4	1	4	4	4	5	4	5	4	3	3	4	3	3	4	4	4	5	4	4	3	4	3	4	3	
91	2	2	2	2	5	3	3	3	4	4	5	4	4	4	3	4	4	2	3	4	3	4	3	4	5	5	4	4	3	2	
92	2	1	3	2	5	3	2	5	4	4	4	4	4	4	2	4	2	2	1	5	4	4	4	4	2	3	3	4	3	4	
93	2	1	3	2	5	3	4	5	4	4	3	4	4	3	4	4	2	3	1	4	4	3	4	4	4	3	3	4	2	2	
94	2	2	2	2	5	4	2	5	5	5	4	4	3	5	5	3	2	2	2	5	5	5	4	4	5	4	4	3	4	3	
95	2	2	3	2	5	4	2	5	4	4	4	5	3	5	3	3	3	2	2	5	4	4	4	4	4	4	3	5	3	2	
96	1	1	3	2	5	3	3	3	4	3	4	4	4	2	4	2	4	1	2	3	4	3	4	4	4	3	2	4	2	1	
97	1	1	1	2	5	3	2	5	5	4	5	5	3	4	5	4	5	4	5	5	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	
98	1	3	2	2	3	2	4	5	4	4	5	4	4	4	4	4	3	2	3	5	4	4	4	3	4	4	3	4	3	2	
99	1	3	3	1	5	3	1	4	4	4	3	2	4	4	3	2	3	2	1	4	4	4	3	2	4	4	2	4	3	1	
100	1	2	2	1	5	4	2	4	4	3	4	5	5	3	3	5	4	2	2	4	3	3	4	3	1	2	4	4	2	1	
101	1	1	2	2	3	2	3	5	5	4	5	4	5	3	2	5	2	2	3	5	5	4	5	4	4	3	5	4	4	3	
102	1	2	3	2	5	3	1	3	4	4	3	4	4	3	4	4	3	1	2	1	3	4	4	3	4	4	4	2	2	2	
103	1	1	1	2	5	3	1	4	4	4	4	4	4	4	3	2	3	3	2	5	4	4	4	4	5	3	3	4	2	2	
104	2	2	1	2	5	3	4	4	4	3	5	4	4	3	3	2	3	3	2	4	4	5	4	4	4	3	4	4	2	2	



Lampiran 3

Validitas dan Reabilitas
Partisipasi Tingkat RT

a. Validitas

Anti-image Matrices

	rt1	rt2	rt3	rt4	rt5	rt6	rt7	rt8	rt9	rt10	rt11	rt12	
Anti-image Covariance	rt1	,541	-,094	-,185	,036	-,189	-,107	-,109	-,016	-,133	,027	,044	-,030
	rt2	-,094	,607	-,183	-,076	,006	-,049	-,088	-,022	,107	-,019	,036	-,135
	rt3	-,185	-,183	,557	-,003	,051	-,086	-,017	-,129	-,039	-,013	-,023	,005
	rt4	,036	-,076	-,003	,793	-,195	-,113	-,015	-,047	-,070	-,082	,061	-,077
	rt5	-,189	,006	,051	-,195	,779	-,056	,006	,074	-,013	-,030	-,089	,061
	rt6	-,107	-,049	-,086	-,113	-,056	,774	,107	,050	,052	-,076	-,046	-,019
	rt7	-,109	-,088	-,017	-,015	,006	,107	,872	-,118	,017	,002	-,071	,053
	rt8	-,016	-,022	-,129	-,047	,074	,050	-,118	,815	,107	-,116	-,073	-,027
	rt9	-,133	,107	-,039	-,070	-,013	,052	,017	,107	,736	,033	-,144	-,160
	rt10	,027	-,019	-,013	-,082	-,030	-,076	,002	-,116	,033	,802	-,078	-,135
	rt11	,044	,036	-,023	,061	-,089	-,046	-,071	-,073	-,144	-,078	,679	-,225
	rt12	-,030	-,135	,005	-,077	,061	-,019	,053	-,027	-,160	-,135	-,225	,573
Anti-image Correlation	rt1	,766 ^a	-,164	-,336	,055	-,291	-,165	-,159	-,025	-,210	,041	,072	-,053
	rt2	-,164	,800 ^a	-,314	-,109	,009	-,072	-,120	-,032	,160	-,027	,055	-,229
	rt3	-,336	-,314	,795 ^a	-,005	,077	-,131	-,024	-,191	-,062	-,020	-,038	,008
	rt4	,055	-,109	-,005	,782 ^a	-,248	-,144	-,018	-,058	-,091	-,103	,084	-,114
	rt5	-,291	,009	,077	-,248	,678 ^a	-,072	,007	,093	-,018	-,039	-,122	,091
	rt6	-,165	-,072	-,131	-,144	-,072	,834 ^a	,131	,063	,069	-,097	-,064	-,028
	rt7	-,159	-,120	-,024	-,018	,007	,131	,719 ^a	-,140	,021	,002	-,092	,076
	rt8	-,025	-,032	-,191	-,058	,093	,063	-,140	,748 ^a	,139	-,144	-,099	-,039
	rt9	-,210	-,160	-,062	-,091	-,018	,069	,021	,139	,690 ^a	,043	-,203	-,247
	rt10	,041	-,027	-,020	-,103	-,039	-,097	-,002	-,144	,043	,836 ^a	-,105	-,199
	rt11	,072	,055	-,038	,084	-,122	-,064	-,092	-,099	-,203	-,105	,737 ^a	-,361
	rt12	-,053	-,229	,008	-,114	,091	-,028	,076	-,039	-,247	-,199	-,361	,759 ^a

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA)

KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.		,768
Bartlett's Test of Sphericity	Approx. Chi-Square	250,934
	df	66
	Sig.	,000

b. Reabilitas

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	104	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	104	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,755	,763	12

Summary Item Statistics

	Mean	Minimum	Maximum	Range	Maximum / Minimum	Variance	N of Items
Item Means	3,570	2,452	4,288	1,837	1,749	,370	12

Lampiran 4

Validitas dan Reabilitas Partisipasi Rembug RW

a. Validitas

KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.	,793
Bartlett's Test of Sphericity	Approx. Chi-Square 234,225
	df 66
	Sig. ,000

Anti-image Matrices

		RW1	RW2	RW3	RW4	RW5	RW6	RW7	RW8	RW9	RW10	RW11	RW12
Anti-image Covariance	RW1	,608	-,197	-,066	-,023	-,076	-,051	-,024	-,069	-,142	,000	-,050	-,010
	RW2	-,197	,617	-,124	-,007	-,101	-,033	-,032	-,022	-,041	,099	-,038	-,104
	RW3	-,066	-,124	,628	,069	-,113	-,005	-,013	-,032	-,006	-,166	-,054	-,110
	RW4	-,023	-,007	,069	,887	-,050	-,115	-,037	-,138	,043	,002	-,151	,086
	RW5	-,076	-,101	-,113	-,050	,699	-,083	,022	-,123	-,052	,009	,019	-,083
	RW6	-,051	-,033	-,005	-,115	-,083	,705	-,158	,131	-,103	-,167	,128	-,133
	RW7	-,024	-,032	-,013	-,037	,022	-,158	,859	-,086	,001	-,045	-,065	-,028
	RW8	-,069	-,022	-,032	-,138	-,123	,131	-,086	,834	-,027	-,130	,079	,037
	RW9	-,142	-,041	-,006	,043	-,052	-,103	,001	-,027	,755	-,063	-,142	,108
	RW10	,000	,099	-,166	,002	,009	-,167	-,045	-,130	-,063	,658	-,201	-,020
	RW11	-,050	-,038	-,054	-,151	,019	,128	-,065	,079	-,142	-,201	,733	-,063
	RW12	-,010	-,104	-,110	,086	-,083	-,133	-,028	,037	,108	-,020	-,063	,776
Anti-image Correlation	RW1	,848 ^a	-,322	-,107	-,031	-,116	-,078	-,033	-,098	-,209	,000	-,075	-,015
	RW2	-,322	,812 ^a	-,200	-,009	-,154	-,051	-,044	-,031	-,060	,155	-,057	-,150
	RW3	-,107	-,200	,847 ^a	,092	-,170	,000	-,017	-,044	-,008	-,259	-,079	-,158
	RW4	-,031	-,009	,092	,615 ^a	-,063	-,145	-,042	-,160	,052	,003	-,187	,104
	RW5	-,116	-,154	-,170	-,063	,870 ^a	-,118	,029	-,161	-,072	,014	,026	-,113
	RW6	-,078	-,051	,000	-,145	-,118	,721 ^a	-,204	,171	-,141	-,245	,178	-,180
	RW7	-,033	-,044	-,017	-,042	,029	-,204	,849 ^a	-,102	,001	-,059	-,082	-,034
	RW8	-,098	-,031	-,044	-,160	-,161	,171	-,102	,688 ^a	-,034	-,175	,101	,046
	RW9	-,209	-,060	-,008	,052	-,072	-,141	,001	-,034	,818 ^a	-,090	-,191	,141
	RW10	,000	,155	-,259	,003	,014	-,245	-,059	-,175	-,090	,736 ^a	-,289	-,028
	RW11	-,075	-,057	-,079	-,187	,026	,178	-,082	,101	-,191	-,289	,718 ^a	-,084
	RW12	-,015	-,150	-,158	,104	-,113	-,180	-,034	,046	,141	-,028	-,084	,798 ^a

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA)

b. Reabilitas

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	104	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	104	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,767	,774	12

Summary Item Statistics

	Mean	Minimum	Maximum	Range	Maximum / Minimum	Variance	N of Items
Item Means	3,371	2,067	4,250	2,183	2,056	,502	12

Lampiran 5

Frequency Table

JENIS KELAMIN

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Laki-laki	84	80,8	80,8	80,8
Valid Perempuan	20	19,2	19,2	100,0
Total	104	100,0	100,0	

USIA

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid kurang dari 36 Tahun	24	23,1	23,1	23,1
Valid 37 - 53 Tahun	67	64,4	64,4	87,5
Valid 54 - 70 Tahun	13	12,5	12,5	100,0
Total	104	100,0	100,0	

PENDIDIKAN

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Sarjana	40	38,5	38,5	38,5
Valid Sarjana Muda/Diploma	33	31,7	31,7	70,2
Valid SMA	29	27,9	27,9	98,1
Valid SMP	2	1,9	1,9	100,0
Total	104	100,0	100,0	

PEKERJAAN

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid PNS, TNI, Polri dan BUMN	32	30,8	30,8	30,8
Valid Pedagang, Wiraswasta	69	66,3	66,3	97,1
Valid Lain-lain	3	2,9	2,9	100,0
Total	104	100,0	100,0	

PENGHASILAN

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Rp. 1.000.000,- s/d Rp. 1.500.000,-	9	8,7	8,7	8,7
Rp. 1.500.000,- s/d Rp. 2.000.000,-	13	12,5	12,5	21,2
Lebih dari Rp. 2.000.000,-	82	78,8	78,8	100,0
Total	104	100,0	100,0	

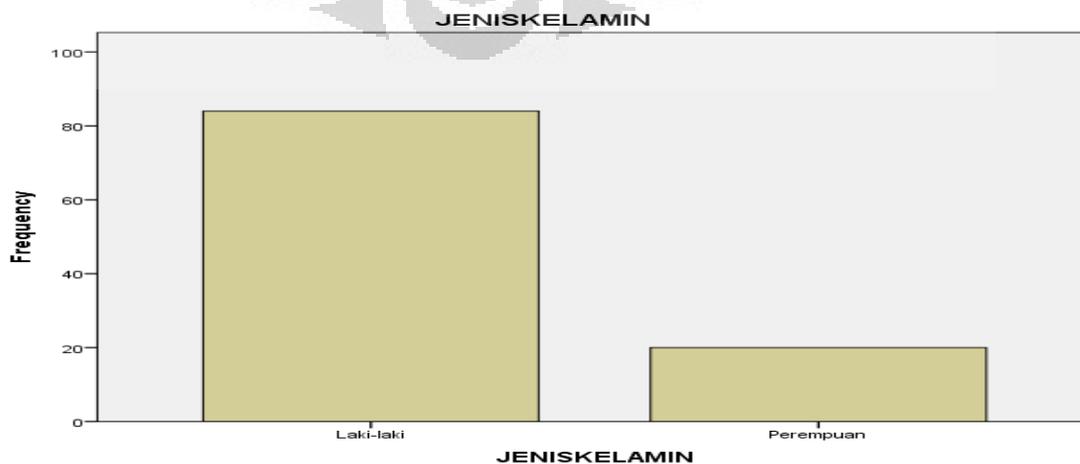
LAMATINGGAL

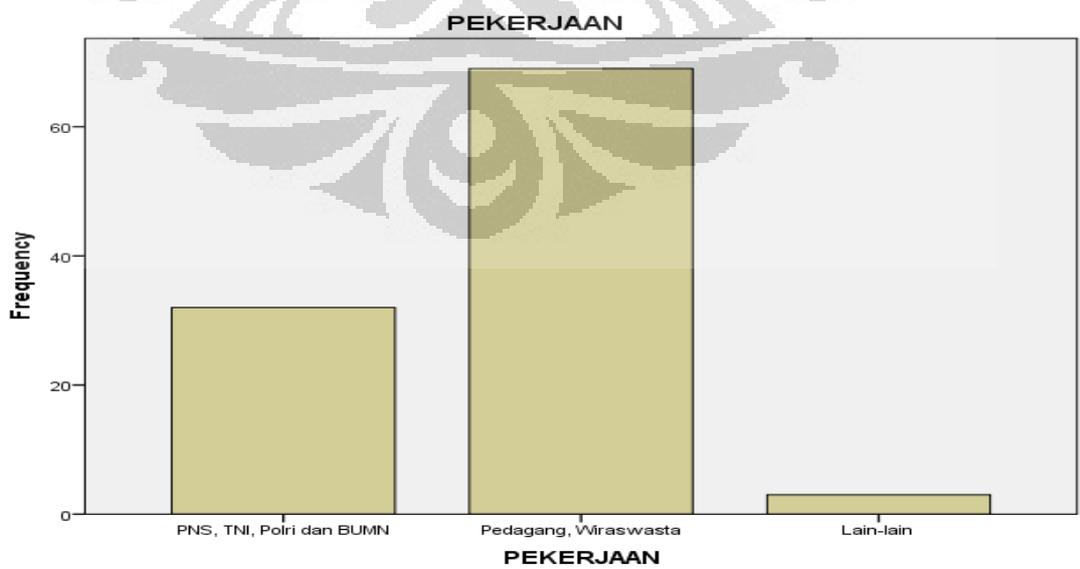
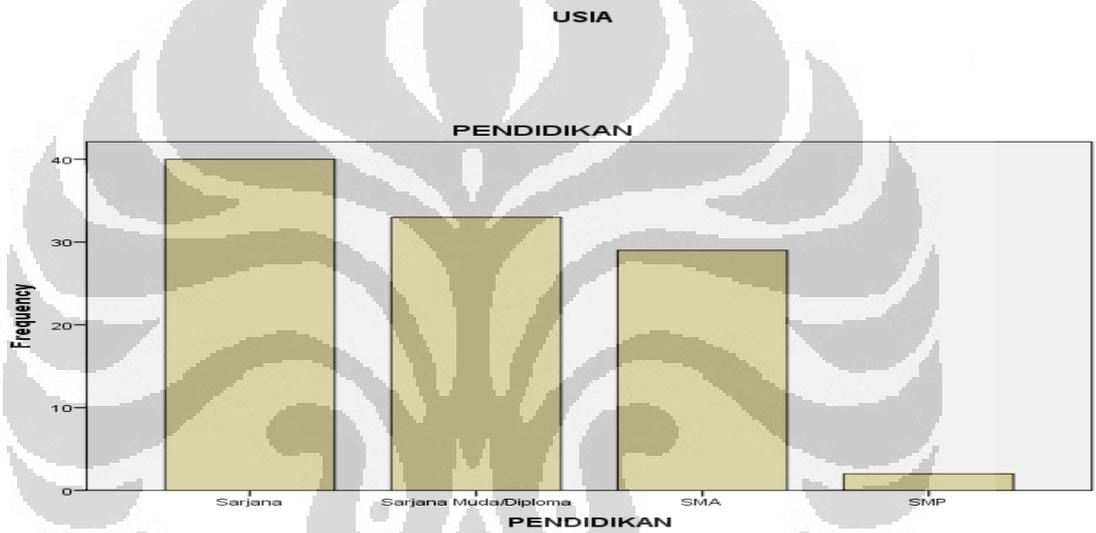
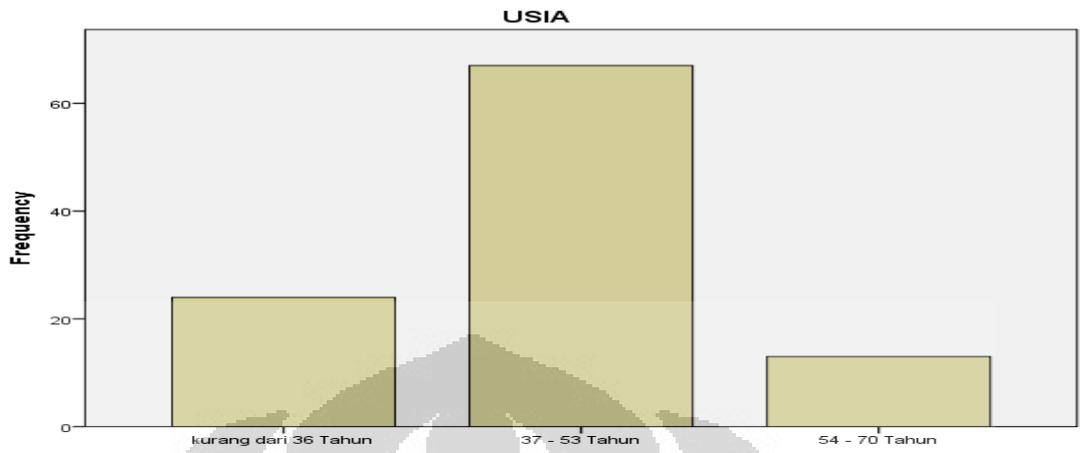
	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 4 – 16 Tahun	23	22,1	22,1	22,1
17 - 30 Tahun	49	47,1	47,1	69,2
31 – 44 Tahun	27	26,0	26,0	95,2
45 tahun ke atas	5	4,8	4,8	100,0
Total	104	100,0	100,0	

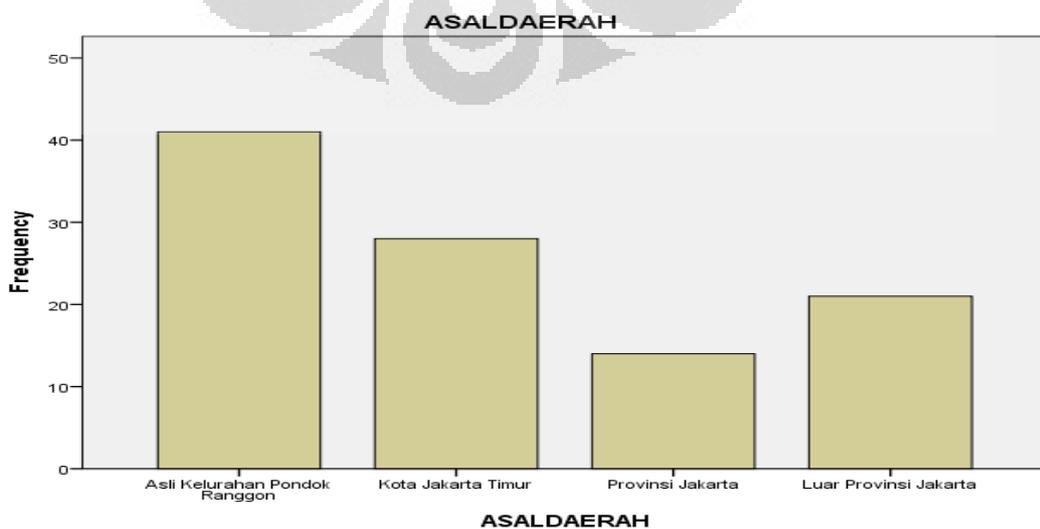
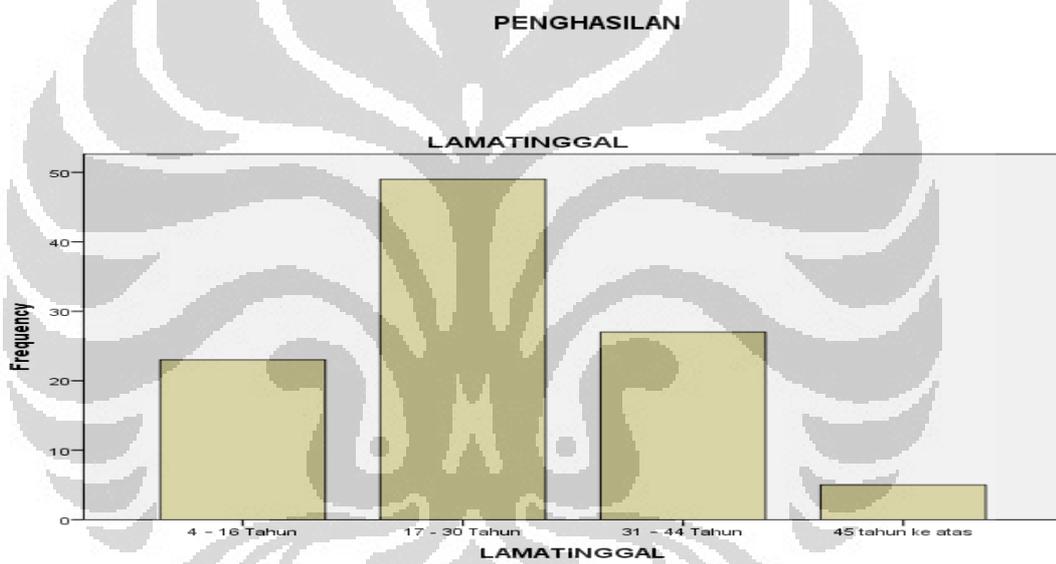
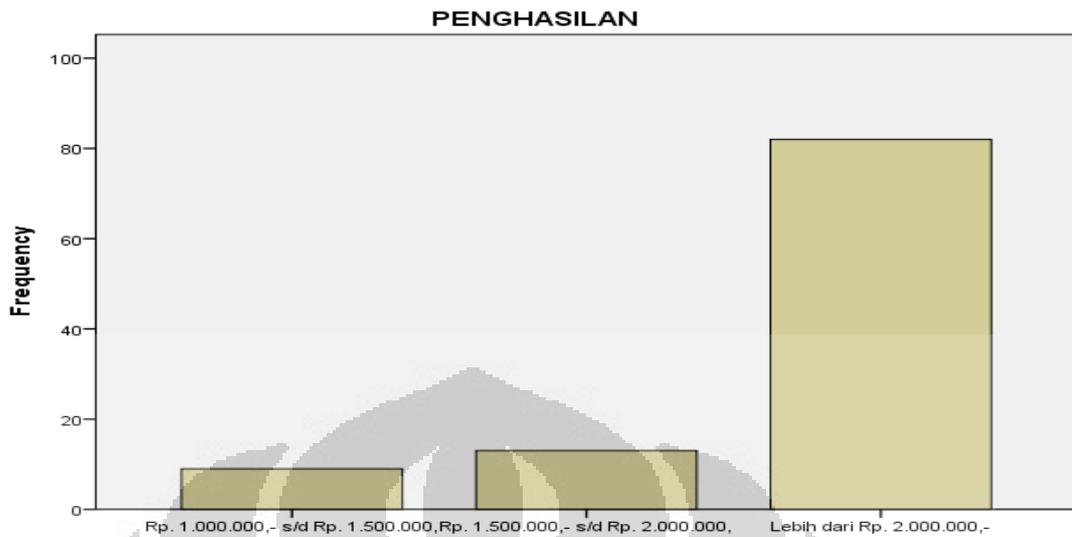
ASALDAERAH

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Asli Kelurahan Pondok Ranggon	41	39,4	39,4	39,4
Kota Jakarta Timur	28	26,9	26,9	66,3
Provinsi Jakarta	14	13,5	13,5	79,8
Luar Provinsi Jakarta	21	20,2	20,2	100,0
Total	104	100,0	100,0	

Bar Chart







Lampiran 6

Tingkat Partisipasi RT

Statistics

		tingkat partisipasi RT	Tingkat Partisipasi RT
N	Valid	104	104
	Missing	0	0
Mean		42,8365	1,3558
Median		43,0000	1,0000
Mode		43,00	1,00
Minimum		29,00	1,00
Maximum		54,00	2,00

Frequency Table

tingkat partisipasi RT

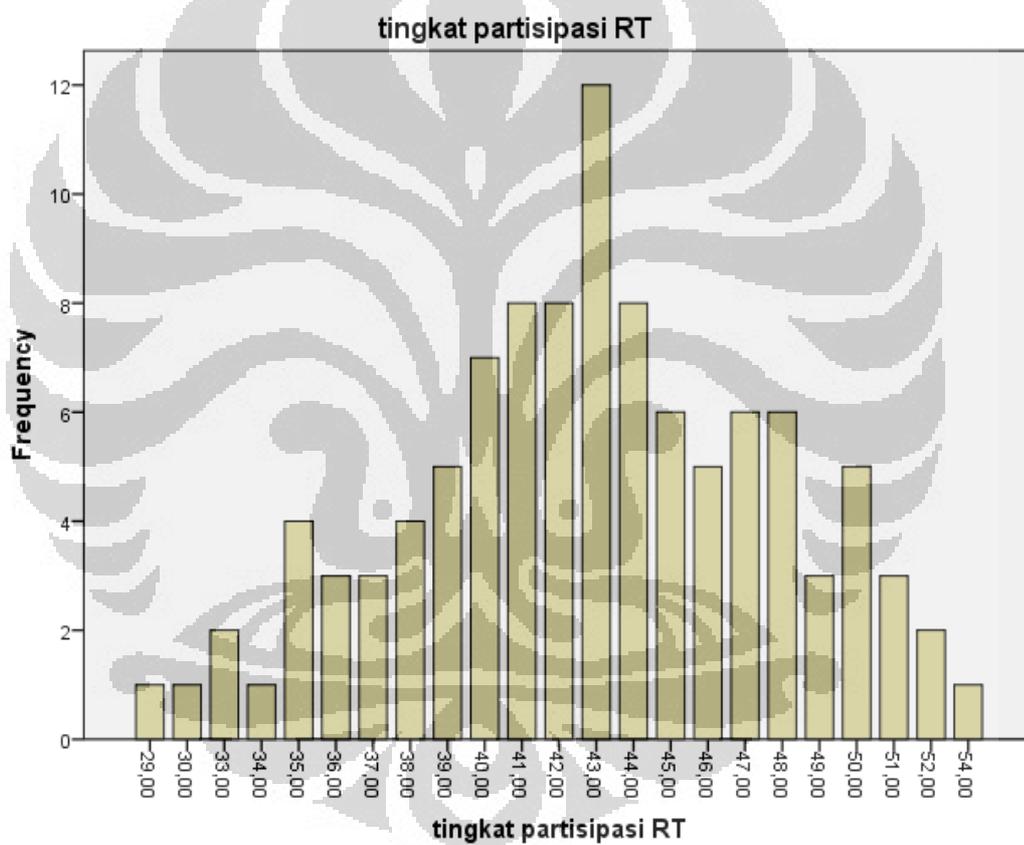
	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
29,00	1	1,0	1,0	1,0
30,00	1	1,0	1,0	1,9
33,00	2	1,9	1,9	3,8
34,00	1	1,0	1,0	4,8
35,00	4	3,8	3,8	8,7
36,00	3	2,9	2,9	11,5
37,00	3	2,9	2,9	14,4
38,00	4	3,8	3,8	18,3
39,00	5	4,8	4,8	23,1
40,00	7	6,7	6,7	29,8
41,00	8	7,7	7,7	37,5
Valid 42,00	8	7,7	7,7	45,2
43,00	12	11,5	11,5	56,7
44,00	8	7,7	7,7	64,4
45,00	6	5,8	5,8	70,2
46,00	5	4,8	4,8	75,0
47,00	6	5,8	5,8	80,8
48,00	6	5,8	5,8	86,5
49,00	3	2,9	2,9	89,4
50,00	5	4,8	4,8	94,2
51,00	3	2,9	2,9	97,1
52,00	2	1,9	1,9	99,0
54,00	1	1,0	1,0	100,0

Total	104	100,0	100,0
-------	-----	-------	-------

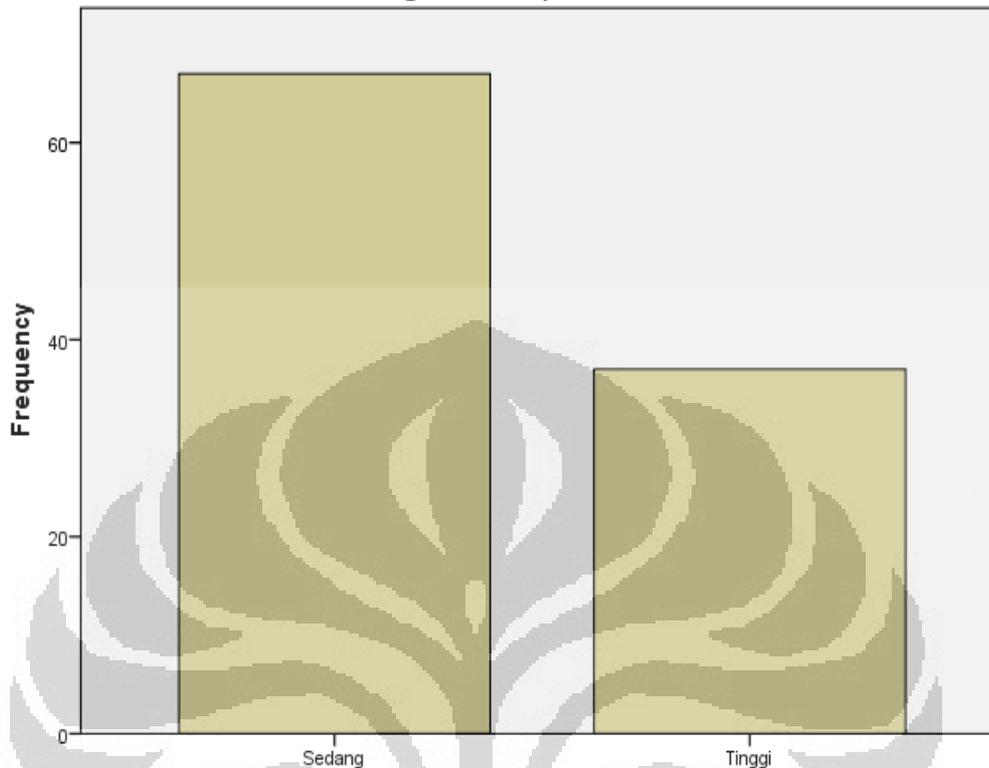
Tingkat Partisipasi RT

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Sedang	67	64,4	64,4	64,4
Valid Tinggi	37	35,6	35,6	100,0
Total	104	100,0	100,0	

Bar Chart



Tingkat Partisipasi RT



Tingkat Partisipasi RT

Frequency Table

rt1

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 2,00	1	1,0	1,0	1,0
3,00	12	11,5	11,5	12,5
4,00	47	45,2	45,2	57,7
5,00	44	42,3	42,3	100,0
Total	104	100,0	100,0	

rt2

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 2,00	3	2,9	2,9	2,9
3,00	19	18,3	18,3	21,2
4,00	62	59,6	59,6	80,8
5,00	20	19,2	19,2	100,0
Total	104	100,0	100,0	

rt3

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
2,00	3	2,9	2,9	2,9
3,00	15	14,4	14,4	17,3
Valid 4,00	65	62,5	62,5	79,8
5,00	21	20,2	20,2	100,0
Total	104	100,0	100,0	

rt4

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
2,00	2	1,9	1,9	1,9
3,00	17	16,3	16,3	18,3
Valid 4,00	57	54,8	54,8	73,1
5,00	28	26,9	26,9	100,0
Total	104	100,0	100,0	

rt5

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
2,00	2	1,9	1,9	1,9
3,00	25	24,0	24,0	26,0
Valid 4,00	59	56,7	56,7	82,7
5,00	18	17,3	17,3	100,0
Total	104	100,0	100,0	

rt6

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
2,00	1	1,0	1,0	1,0
3,00	30	28,8	28,8	29,8
Valid 4,00	50	48,1	48,1	77,9
5,00	23	22,1	22,1	100,0
Total	104	100,0	100,0	

rt7

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
2,00	7	6,7	6,7	6,7
3,00	33	31,7	31,7	38,5
Valid 4,00	47	45,2	45,2	83,7
5,00	17	16,3	16,3	100,0
Total	104	100,0	100,0	

rt8

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
2,00	9	8,7	8,7	8,7
3,00	38	36,5	36,5	45,2
Valid 4,00	39	37,5	37,5	82,7
5,00	18	17,3	17,3	100,0
Total	104	100,0	100,0	

rt9

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
1,00	1	1,0	1,0	1,0
2,00	18	17,3	17,3	18,3
Valid 3,00	29	27,9	27,9	46,2
4,00	44	42,3	42,3	88,5
5,00	12	11,5	11,5	100,0
Total	104	100,0	100,0	

rt10

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
1,00	6	5,8	5,8	5,8
2,00	31	29,8	29,8	35,6
Valid 3,00	35	33,7	33,7	69,2
4,00	31	29,8	29,8	99,0
5,00	1	1,0	1,0	100,0
Total	104	100,0	100,0	

rt11

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1,00	4	3,8	3,8	3,8
2,00	51	49,0	49,0	52,9
3,00	37	35,6	35,6	88,5
4,00	11	10,6	10,6	99,0
5,00	1	1,0	1,0	100,0
Total	104	100,0	100,0	

rt12

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1,00	17	16,3	16,3	16,3
2,00	41	39,4	39,4	55,8
3,00	29	27,9	27,9	83,7
4,00	16	15,4	15,4	99,0
5,00	1	1,0	1,0	100,0
Total	104	100,0	100,0	

Lampiran 7

Tingkat Partisipasi RW Statistics

		Tingkat Partisipasi RW	tingkat partisipasi RW
N	Valid	104	104
	Missing	0	0
Mean		40,4519	1,2019
Median		40,0000	1,0000
Mode		40,00	1,00
Minimum		30,00	1,00
Maximum		52,00	2,00
Sum		4207,00	125,00

Frequency Table

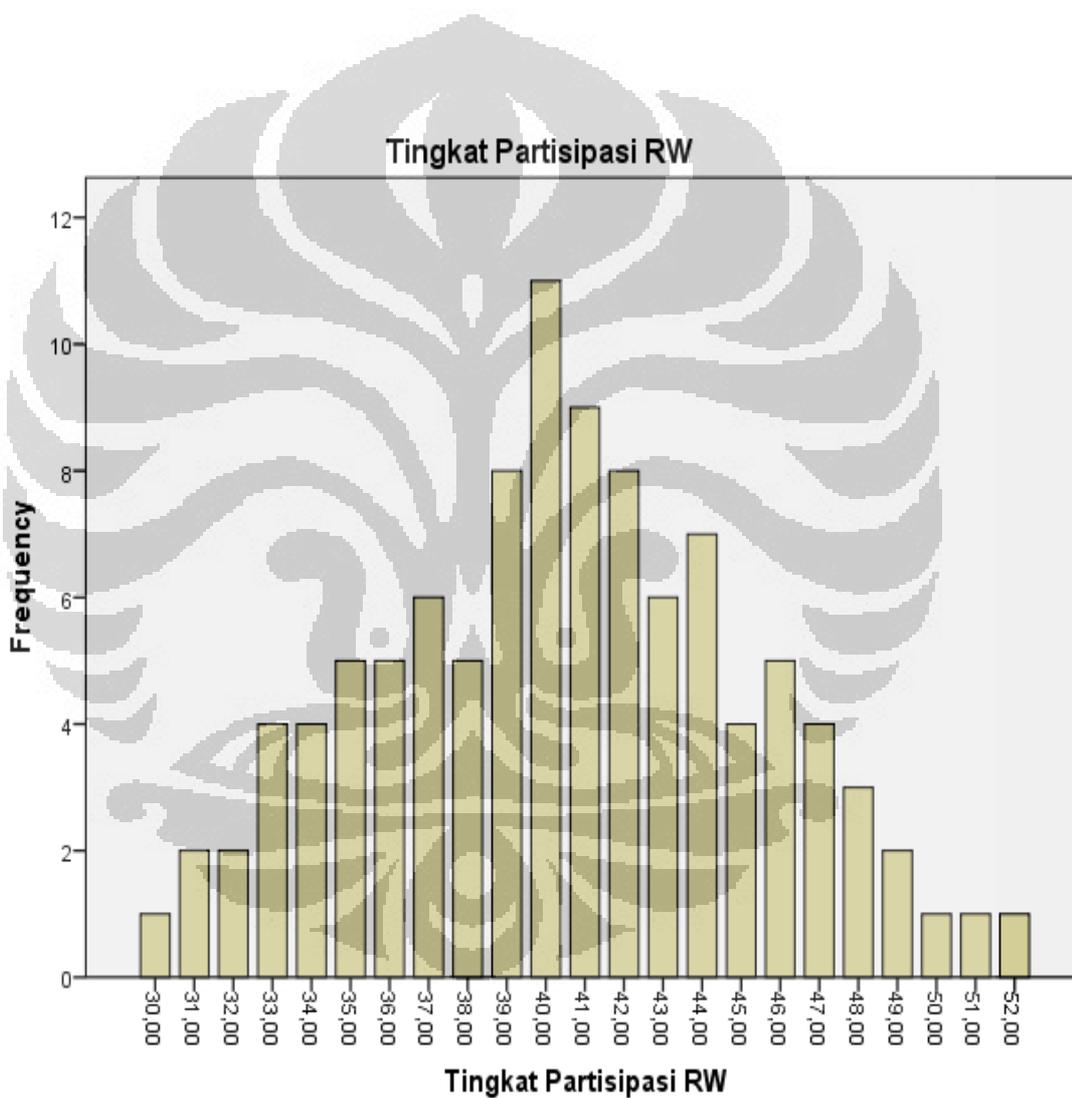
Tingkat Partisipasi RW

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	30,00	1	1,0	1,0	1,0
	31,00	2	1,9	1,9	2,9
	32,00	2	1,9	1,9	4,8
	33,00	4	3,8	3,8	8,7
	34,00	4	3,8	3,8	12,5
	35,00	5	4,8	4,8	17,3
	36,00	5	4,8	4,8	22,1
	37,00	6	5,8	5,8	27,9
	38,00	5	4,8	4,8	32,7
	39,00	8	7,7	7,7	40,4
	40,00	11	10,6	10,6	51,0
	41,00	9	8,7	8,7	59,6
	42,00	8	7,7	7,7	67,3
	43,00	6	5,8	5,8	73,1
	44,00	7	6,7	6,7	79,8
	45,00	4	3,8	3,8	83,7
	46,00	5	4,8	4,8	88,5
	47,00	4	3,8	3,8	92,3
	48,00	3	2,9	2,9	95,2
	49,00	2	1,9	1,9	97,1
50,00	1	1,0	1,0	98,1	
51,00	1	1,0	1,0	99,0	
52,00	1	1,0	1,0	100,0	
Total		104	100,0	100,0	

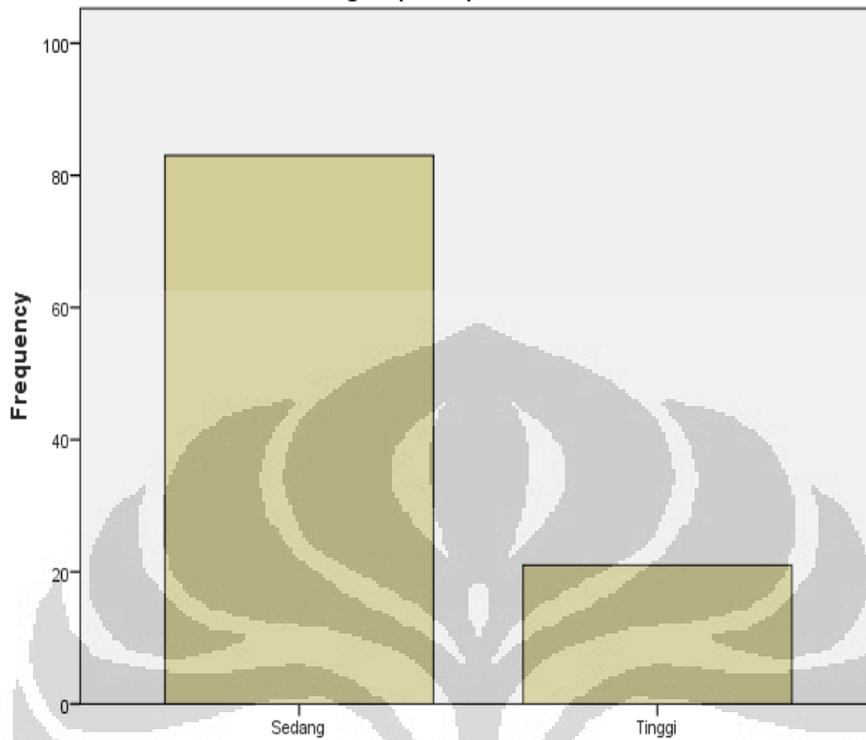
tingkat partisipasi RW

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Sedang	83	79,8	79,8	79,8
Valid Tinggi	21	20,2	20,2	100,0
Total	104	100,0	100,0	

Bar Chart



tingkat partisipasi RW



tingkat partisipasi RW

Frequency Table

RW 1

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 3,00	11	10,6	10,6	10,6
Valid 4,00	56	53,8	53,8	64,4
Valid 5,00	37	35,6	35,6	100,0
Total	104	100,0	100,0	

RW 2

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 2,00	2	1,9	1,9	1,9
Valid 3,00	12	11,5	11,5	13,5
Valid 4,00	68	65,4	65,4	78,8
Valid 5,00	22	21,2	21,2	100,0
Total	104	100,0	100,0	

RW 3

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
	2,00	3	2,9	2,9
	3,00	19	18,3	21,2
Valid	4,00	66	63,5	84,6
	5,00	16	15,4	100,0
Total	104	100,0	100,0	

RW 4

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
	2,00	2	1,9	1,9
	3,00	22	21,2	23,1
Valid	4,00	64	61,5	84,6
	5,00	16	15,4	100,0
Total	104	100,0	100,0	

RW 5

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
	2,00	8	7,7	7,7
	3,00	29	27,9	35,6
Valid	4,00	60	57,7	93,3
	5,00	7	6,7	100,0
Total	104	100,0	100,0	

RW 6

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
	1,00	1	1,0	1,0
	2,00	6	5,8	6,7
Valid	3,00	25	24,0	30,8
	4,00	61	58,7	89,4
	5,00	11	10,6	100,0
Total	104	100,0	100,0	

RW 7

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
	2,00	23	22,1	22,1
	3,00	38	36,5	58,7
Valid	4,00	37	35,6	94,2
	5,00	6	5,8	100,0
Total	104	100,0	100,0	

RW 8

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
	2,00	11	10,6	10,6
	3,00	49	47,1	57,7
Valid	4,00	36	34,6	92,3
	5,00	8	7,7	100,0
Total	104	100,0	100,0	

RW 9

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
	1,00	2	1,9	1,9
	2,00	17	16,3	18,3
Valid	3,00	43	41,3	59,6
	4,00	32	30,8	90,4
	5,00	10	9,6	100,0
Total	104	100,0	100,0	

RW 10

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
	1,00	6	5,8	5,8
	2,00	31	29,8	35,6
Valid	3,00	45	43,3	78,8
	4,00	22	21,2	100,0
Total	104	100,0	100,0	

RW 11

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
1,00	17	16,3	16,3	16,3
2,00	61	58,7	58,7	75,0
Valid 3,00	18	17,3	17,3	92,3
4,00	8	7,7	7,7	100,0
Total	104	100,0	100,0	

RW 12

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
1,00	21	20,2	20,2	20,2
2,00	59	56,7	56,7	76,9
Valid 3,00	20	19,2	19,2	96,2
4,00	4	3,8	3,8	100,0
Total	104	100,0	100,0	

Tabulasi Silang RT

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Partisipasi Tingkat RT * Jenis Kelamin	104	100,0%	0	0,0%	104	100,0%
Partisipasi Tingkat RT * Usia	104	100,0%	0	0,0%	104	100,0%
Partisipasi Tingkat RT * Pendidikan	104	100,0%	0	0,0%	104	100,0%
Partisipasi Tingkat RT * Pekerjaan	104	100,0%	0	0,0%	104	100,0%
Partisipasi Tingkat RT * Penghasilan	104	100,0%	0	0,0%	104	100,0%
Partisipasi Tingkat RT * Lama Tinggal	104	100,0%	0	0,0%	104	100,0%
Partisipasi Tingkat RT * Asal Daerah	104	100,0%	0	0,0%	104	100,0%

Partisipasi Tingkat RT * Jenis Kelamin

Crosstab

			Jenis Kelamin		Total
			Laki-laki	Perempuan	
Partisipasi Tingkat RT	Sedang	Count	53	14	67
		% of Total	51,0%	13,5%	64,4%
	Tinggi	Count	31	6	37
		% of Total	29,8%	5,8%	35,6%
Total		Count	84	20	104
		% of Total	80,8%	19,2%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2- sided)	Exact Sig. (1- sided)
Pearson Chi-Square	,336 ^a	1	,562		
Continuity Correction ^b	,102	1	,749		
Likelihood Ratio	,343	1	,558		
Fisher's Exact Test				,614	,380
Linear-by-Linear Association	,333	1	,564		
N of Valid Cases	104				

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 7,12.

b. Computed only for a 2x2 table

Partisipasi Tingkat RT * Usia

Crosstab

			Usia			Total
			kurang dari 36 Tahun	37 - 53 Tahun	54 - 70 Tahun	
Partisipasi Tingkat RT	Sedang	Count	17	40	10	67
		% of Total	16,3%	38,5%	9,6%	64,4%
	Tinggi	Count	7	27	3	37
		% of Total	6,7%	26,0%	2,9%	35,6%
Total		Count	24	67	13	104
		% of Total	23,1%	64,4%	12,5%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	1,968 ^a	2	,374
Likelihood Ratio	2,033	2	,362
Linear-by-Linear Association	,001	1	,976
N of Valid Cases	104		

a. 1 cells (16,7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4,63.

Partisipasi Tingkat RT * Pendidikan

Crosstab

			Pendidikan				Total
			Sarjana	Sarjana Muda/Diploma	SMA	SMP	
Partisipasi Tingkat RT	Sedang	Count	22	18	25	2	67
		% of Total	21,2%	17,3%	24,0%	1,9%	64,4%
	Tinggi	Count	18	15	4	0	37
		% of Total	17,3%	14,4%	3,8%	0,0%	35,6%
Total		Count	40	33	29	2	104
		% of Total	38,5%	31,7%	27,9%	1,9%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	10,063 ^a	3	,018
Likelihood Ratio	11,602	3	,009
Linear-by-Linear Association	7,480	1	,006
N of Valid Cases	104		

a. 2 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,71.

Partisipasi Tingkat RT * Pekerjaan

Crosstab

			Pekerjaan			Total
			PNS, TNI, Polri dan BUMN	Pedagang, Wiraswasta	Lain-lain	
Partisipasi Tingkat RT	Sedang	Count	20	45	2	67
		% of Total	19,2%	43,3%	1,9%	64,4%
	Tinggi	Count	12	24	1	37
		% of Total	11,5%	23,1%	1,0%	35,6%
Total	Count	32	69	3	104	
	% of Total	30,8%	66,3%	2,9%	100,0%	

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	,077 ^a	2	,962
Likelihood Ratio	,077	2	,962
Linear-by-Linear Association	,065	1	,799
N of Valid Cases	104		

a. 2 cells (33,3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,07.

Partisipasi Tingkat RT * Penghasilan

Crosstab

			Penghasilan			Total
			Rp. 1.000.000,- s/d Rp. 1.500.000,-	Rp. 1.500.000,- s/d Rp. 2.000.000,-	Lebih dari Rp. 2.000.000,-	
Partisipasi Tingkat RT	Sedang	Count	4	9	54	67
		% of Total	3,8%	8,7%	51,9%	64,4%
	Tinggi	Count	5	4	28	37
		% of Total	4,8%	3,8%	26,9%	35,6%
Total	Count	9	13	82	104	
		% of Total	8,7%	12,5%	78,8%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	1,772 ^a	2	,412
Likelihood Ratio	1,695	2	,429
Linear-by-Linear Association	,959	1	,327
N of Valid Cases	104		

a. 2 cells (33,3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3,20.

Partisipasi Tingkat RT * Lama Tinggal

Crosstab

			Lama Tinggal				Total
			4 – 16 Tahun	17 - 30 Tahun	31 – 44 Tahun	45 tahun ke atas	
Partisipasi Tingkat RT	Sedang	Count	13	35	17	2	67
		% of Total	12,5%	33,7%	16,3%	1,9%	64,4%
	Tinggi	Count	10	14	10	3	37
		% of Total	9,6%	13,5%	9,6%	2,9%	35,6%
Total	Count	23	49	27	5	104	
		% of Total	22,1%	47,1%	26,0%	4,8%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	3,002 ^a	3	,391
Likelihood Ratio	2,949	3	,399
Linear-by-Linear Association	,066	1	,797
N of Valid Cases	104		

a. 2 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,78.

Partisipasi Tingkat RT * Asal Daerah

Crosstab

			Asal Daerah				Total
			Asli Kelurahan Pondok Ranggon	Kota Jakarta Timur	Provinsi Jakarta	Luar Provinsi Jakarta	
Partisipasi Tingkat RT	Sedang	Count	26	19	9	13	67
		% of Total	25,0%	18,3%	8,7%	12,5%	64,4%
Tinggi	Tinggi	Count	15	9	5	8	37
		% of Total	14,4%	8,7%	4,8%	7,7%	35,6%
Total		Count	41	28	14	21	104
		% of Total	39,4%	26,9%	13,5%	20,2%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	,220 ^a	3	,974
Likelihood Ratio	,222	3	,974
Linear-by-Linear Association	,014	1	,906
N of Valid Cases	104		

a. 1 cells (12,5%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4,98.

Tabulasi Silang RW

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Partisipasi Tingkat RW * Jenis Kelamin	104	100,0%	0	0,0%	104	100,0%
Partisipasi Tingkat RW * Usia	104	100,0%	0	0,0%	104	100,0%
Partisipasi Tingkat RW * Pendidikan	104	100,0%	0	0,0%	104	100,0%
Partisipasi Tingkat RW * Pekerjaan	104	100,0%	0	0,0%	104	100,0%
Partisipasi Tingkat RW * Penghasilan	104	100,0%	0	0,0%	104	100,0%
Partisipasi Tingkat RW * Lama Tinggal	104	100,0%	0	0,0%	104	100,0%
Partisipasi Tingkat RW * Asal Daerah	104	100,0%	0	0,0%	104	100,0%

Partisipasi Tingkat RW * Jenis Kelamin

Crosstab

			Jenis Kelamin		Total
			Laki-laki	Perempuan	
Partisipasi Tingkat RW	Sedang	Count	69	14	83
		% of Total	66,3%	13,5%	79,8%
	Tinggi	Count	15	6	21
		% of Total	14,4%	5,8%	20,2%
Total		Count	84	20	104
		% of Total	80,8%	19,2%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	1,478 ^a	1	,224		
Continuity Correction ^b	,821	1	,365		
Likelihood Ratio	1,372	1	,241		
Fisher's Exact Test				,229	,180
Linear-by-Linear Association	1,464	1	,226		
N of Valid Cases	104				

a. 1 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4,04.

b. Computed only for a 2x2 table

Partisipasi Tingkat RW * Usia

Crosstab

			Usia			Total
			kurang dari 36 Tahun	37 - 53 Tahun	54 - 70 Tahun	
Partisipasi Tingkat RW	Sedang	Count	20	53	10	83
		% of Total	19,2%	51,0%	9,6%	79,8%
	Tinggi	Count	4	14	3	21
		% of Total	3,8%	13,5%	2,9%	20,2%
Total	Count	24	67	13	104	
		% of Total	23,1%	64,4%	12,5%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	,273 ^a	2	,872
Likelihood Ratio	,279	2	,870
Linear-by-Linear Association	,256	1	,613
N of Valid Cases	104		

a. 2 cells (33,3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2,63.

Partisipasi Tingkat RW * Pendidikan

Crosstab

			Pendidikan				Total
			Sarjana	Sarjana Muda/Diploma	SMA	SMP	
Partisipasi Tingkat RW	Sedang	Count	30	24	27	2	83
		% of Total	28,8%	23,1%	26,0%	1,9%	79,8%
	Tinggi	Count	10	9	2	0	21
		% of Total	9,6%	8,7%	1,9%	0,0%	20,2%
Total	Count	40	33	29	2	104	
		% of Total	38,5%	31,7%	27,9%	1,9%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	5,288 ^a	3	,152
Likelihood Ratio	6,421	3	,093
Linear-by-Linear Association	3,484	1	,062
N of Valid Cases	104		

a. 2 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,40.

Partisipasi Tingkat RW * Pekerjaan

Crosstab

		Pekerjaan			Total	
		PNS, TNI, Polri dan BUMN	Pedagang, Wiraswasta	Lain-lain		
Partisipasi Tingkat RW	Sedang	Count	24	56	3	83
		% of Total	23,1%	53,8%	2,9%	79,8%
Tinggi		Count	8	13	0	21
		% of Total	7,7%	12,5%	0,0%	20,2%
Total		Count	32	69	3	104
		% of Total	30,8%	66,3%	2,9%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	1,296 ^a	2	,523
Likelihood Ratio	1,868	2	,393
Linear-by-Linear Association	1,239	1	,266
N of Valid Cases	104		

a. 2 cells (33,3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,61.

Partisipasi Tingkat RW * Penghasilan

Crosstab

			Penghasilan			Total
			Rp. 1.000.000,- s/d Rp. 1.500.000,-	Rp. 1.500.000,- s/d Rp. 2.000.000,-	Lebih dari Rp. 2.000.000,-	
Partisipasi Tingkat RW	Sedang	Count	7	11	65	83
		% of Total	6,7%	10,6%	62,5%	79,8%
	Tinggi	Count	2	2	17	21
		% of Total	1,9%	1,9%	16,3%	20,2%
Total	Count	9	13	82	104	
		% of Total	8,7%	12,5%	78,8%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	,224 ^a	2	,894
Likelihood Ratio	,236	2	,889
Linear-by-Linear Association	,010	1	,919
N of Valid Cases	104		

a. 2 cells (33,3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,82.

Partisipasi Tingkat RW * Lama Tinggal

Crosstab

			Lama Tinggal				Total
			4 – 16 Tahun	17 - 30 Tahun	31 – 44 Tahun	45 tahun ke atas	
Partisipasi Tingkat RW	Sedang	Count	20	39	20	4	83
		% of Total	19,2%	37,5%	19,2%	3,8%	79,8%
	Tinggi	Count	3	10	7	1	21
		% of Total	2,9%	9,6%	6,7%	1,0%	20,2%
Total	Count	23	49	27	5	104	
		% of Total	22,1%	47,1%	26,0%	4,8%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	1,282 ^a	3	,733
Likelihood Ratio	1,328	3	,722
Linear-by-Linear Association	,908	1	,341
N of Valid Cases	104		

a. 3 cells (37,5%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,01.

Partisipasi Tingkat RW * Asal Daerah

Crosstab

		Asal Daerah				Total
		Asli Kelurahan Pondok Ranggon	Kota Jakarta Timur	Provinsi Jakarta	Luar Provinsi Jakarta	
Partisipasi Tingkat RW	Sedang	Count 33	Count 20	Count 11	Count 19	Count 83
		% of Total 31,7%	% of Total 19,2%	% of Total 10,6%	% of Total 18,3%	% of Total 79,8%
Tinggi	Count 8	Count 8	Count 3	Count 2	Count 21	
	% of Total 7,7%	% of Total 7,7%	% of Total 2,9%	% of Total 1,9%	% of Total 20,2%	
Total	Count 41	Count 28	Count 14	Count 21	Count 104	
	% of Total 39,4%	% of Total 26,9%	% of Total 13,5%	% of Total 20,2%	% of Total 100,0%	

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	2,728 ^a	3	,435
Likelihood Ratio	2,903	3	,407
Linear-by-Linear Association	,729	1	,393
N of Valid Cases	104		

a. 2 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2,83.